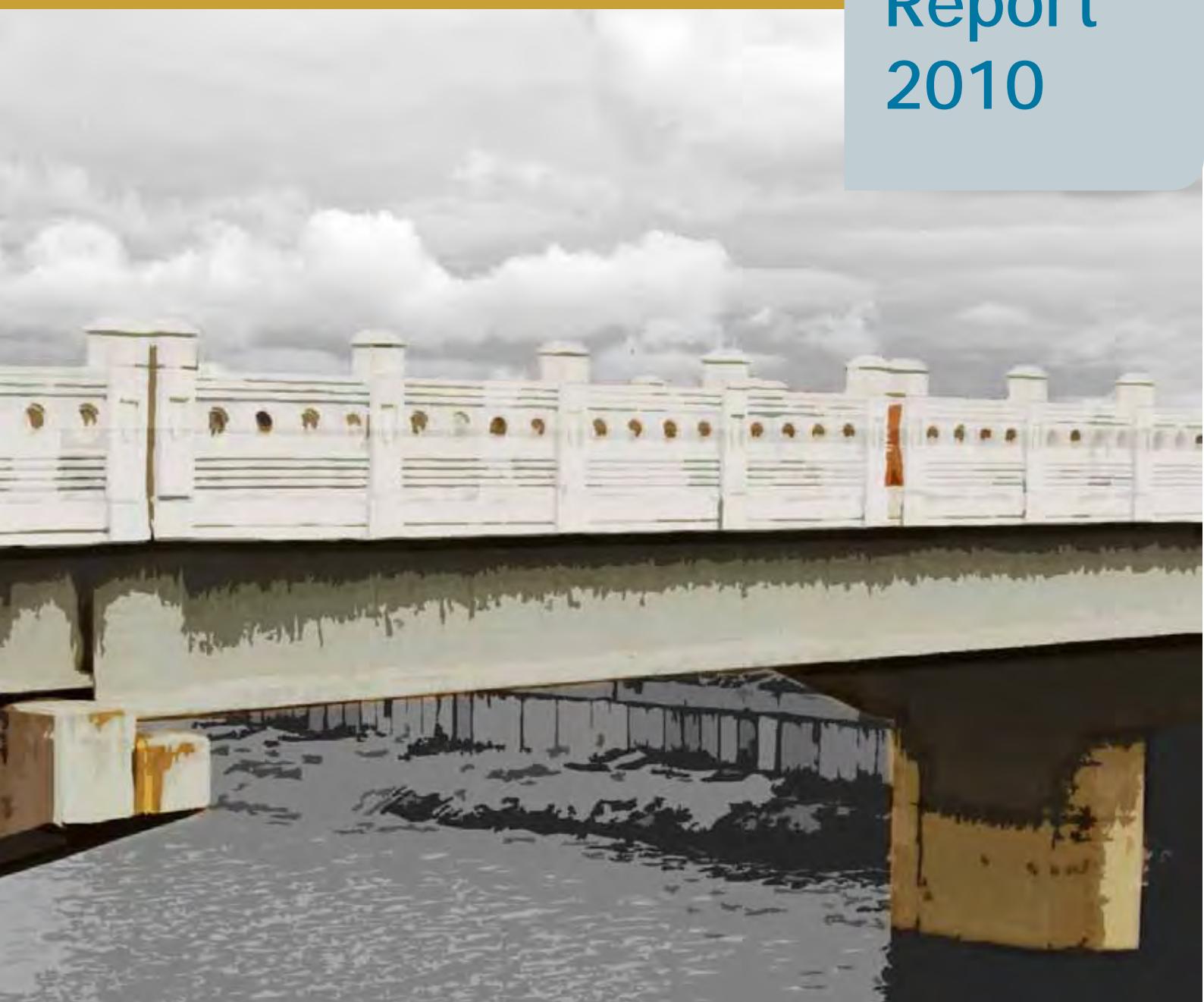




Catalyst in Accelerating Indonesia
Infrastructure Development

Annual Report 2010





Catalyst in Accelerating Indonesia Infrastructure Development

Pembangunan infrastruktur memegang peranan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, pengurangan kemiskinan, pengembangan sumber daya manusia, peningkatan daya saing industri, dan pemerataan pembangunan Indonesia.

Untuk itu, PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) berperan sebagai katalis dalam penyediaan pembiayaan proyek infrastruktur guna mendorong percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia.

Infrastructure development plays a significant role in promoting economic growth, job creation, poverty reduction, human resource development, increasing industrial competitiveness, and spreading out throughout economic growth in all regions of Indonesia.

Therefore, PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) acts as a catalyst in the provision of infrastructure project financing in order to encourage the acceleration of infrastructure development in Indonesia.

Daftar Isi

Table of Contents

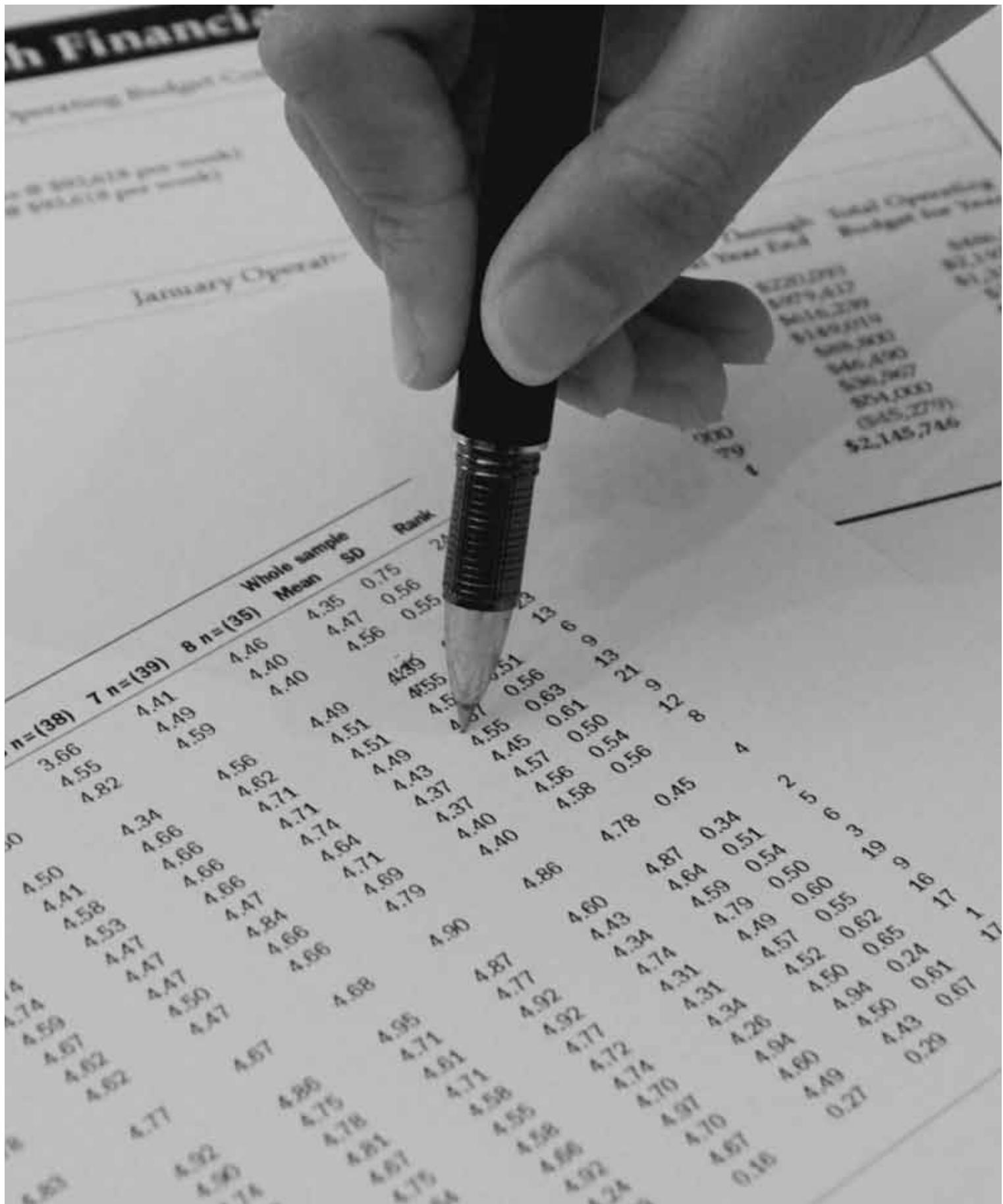
4	Ikhtisar Keuangan Financial Highlights
8	Sambutan Dewan Komisaris Letter from The Board of Commissioners
12	Laporan Direksi Report from The Board of Directors
18	Profil Perseroan Company Profile
19	19 Sekilas Perseroan Our Company
19	19 Visi dan Misi Vision and Mission
20	20 Tujuan Perseroan Company's Objectives
20	20 Tata Nilai Perusahaan Corporate Values
20	20 Motto Perseroan Company Motto
20	20 Kegiatan Usaha Business Activities
21	21 Cakupan Sektor Infrastruktur Infrastructure Sector Coverage
30	Peristiwa Penting 2010 Highlighted Events of 2010
32	Pembahasan Manajemen Management Discussion
33	33 Kondisi Infrastruktur Indonesia Condition of Indonesian Infrastructure
35	35 Kinerja Perseroan Company Performance
41	41 Pengembangan Kerjasama Partnership & Cooperation
45	45 Anak Perusahaan PT Indonesia Infrastructure Finance Subsidiary Company PT IIF
47	47 Tinjauan Keuangan Financial Outlook
53	53 Sosialisasi Tahun 2010 2010 Socialization
56	Laporan Tata Kelola Perseroan Corporate Governance Report
57	57 Organ Utama Tata Kelola Perseroan The Main Organs of the Corporate Governance
58	58 Rapat Umum Pemegang Saham General Shareholders Meeting
59	59 Dewan Komisaris & Direksi Board of Commissioners & Board of Directors
60	60 Dewan Komisaris Board of Commissioners
62	62 Sekretaris Dewan Komisaris Secretary of the Board of Commissioners
62	62 Komite Audit Audit Committee
64	64 Direksi Board of Directors
67	67 Audit Internal Internal Audit
69	69 Manajemen Risiko Risk Management
74	74 Sekretariat Perusahaan Corporate Secretary
78	Tanggung Jawab Sosial Perseroan Corporate Social Responsibility
82	Tanggung Jawab Pelaporan Perseroan Responsibility for Annual Reporting
84	Data Perseroan Corporate Data
84	84 Profil Dewan Komisaris Profile of Board of Commissioners
86	86 Profil Direksi Profile of Board of Directors
88	88 Profil Komite Audit Profile of Audit Committee
89	89 Profil Sekretaris Dewan Komisaris Profile of Secretary of The Board of Commissioners
90	90 Kepala Divisi Division Head
91	91 Profil Akuntan Publik Profile of Public Accountant
91	91 Alamat Kantor Perseroan Company Address
92	Laporan Keuangan Financial Statement



PT Indonesia Infrastructure Finance (PT IIF) resmi diluncurkan pada tanggal 9 Agustus 2010.

Grand launching of PT IIF on August 9, 2010.

Ikhtisar Keuangan



Financial Highlights

Dalam Jutaan Rupiah

In IDR Million

	2010	2009	
Pendapatan Usaha	82.114	72.820	Revenues
Beban Usaha	31.822	18.470	Operating Expenses
Laba Usaha	50.292	54.350	Operating Profit
Pendapatan Lain-lain bersih	877	49	Other Incomes-Net
Laba (Rugi) Perusahaan Asosiasi	(6.234)	0	Profit (Loss) of associated companies
Laba Sebelum Beban Pajak Penghasilan	44.935	54.399	Profit Before Income Tax
Manfaat (Beban) Pajak	(3.832)	3.437	Deferred Tax
Laba Bersih	41.103	57.836	Net Profit
Aset Lancar	1.409.973	1.058.245	Current Assets
Pinjaman Yang Diberikan	731.740	49.073	Loans
Penyertaan	34.066	0	Investments
Aset Tetap - bersih	2.621	1.753	Fixed Assets-Net
Aset Lain-lain	892	246	Other Assets
Aset Pajak Tangguhan	1.106	3.437	Deferred Tax Assets
Jumlah Aset	2.120.868	1.063.680	Total Assets
Jumlah Kewajiban	22.507	5.696	Total Liabilities
Jumlah Ekuitas	2.098.361	1.057.984	Total Equity
Arus Kas Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi	(81.623)	935	Cash Flow Provided from (Used in) Operating Activities
Arus Kas Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Investasi	(730.852)	(50.148)	Cash Flow Provided from (Used in) Investing Activities
Arus Kas Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan	999.422	1.000.000	Cash Flow Provided from (Used in) Financing Activities
Tingkat Pengembalian Investasi	4,14%	5,14%	Return on Investment
Tingkat Pengembalian Aset	3,67%	5,44%	Return on Assets
Rasio Beban Operasional Terhadap Pendapatan Operasional	38,75%	25,36%	Operating Expenses to Operating Revenue Ratio
Rasio Total Modal Sendiri Terhadap Total Aset	97,99%	99,46%	Total Equity to Total Asset Ratio
Produktivitas (Rp juta/Tenaga Kerja)	1.246	2.224	Productivity (IDR million/ No. of Employees)





Jajaran Manajemen Perseroan memiliki komitmen yang tinggi untuk melaksanakan tugas Perseroan dengan senantiasa mengedepankan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik.

The management is highly committed to the principles of Good Corporate Governance in executing the Company's roles and responsibilities.

Sambutan Dewan Komisaris



Letter from The Board of Commissioners

Pembangunan infrastruktur memegang peranan sangat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. Ketersediaan infrastruktur yang memadai mendorong peningkatan daya saing, menciptakan lapangan kerja, membuka akses bagi masyarakat miskin yang pada gilirannya berdampak pada perbaikan pemerataan kesempatan berusaha bagi masyarakat.

Pendirian PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) pada tanggal 26 Februari 2009 merupakan salah satu upaya Pemerintah di dalam mengejar percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Pada tahun kedua usianya, Perseroan telah menunjukkan kinerja yang patut dihargai. Berbagai hambatan, tantangan dan keterbatasan dari aspek sumber daya manusia maupun aspek ketersediaan pendanaan telah dapat dilalui dengan baik.

Perseroan telah berhasil mendirikan anak perusahaan PT Indonesia Infrastructure Finance ("PT IIF") pada tanggal 15 Januari 2010 dan Grand Launching PT IIF oleh Menteri Keuangan RI dilaksanakan pada tanggal 9 Agustus 2010. PT IIF merupakan perusahaan patungan antara Perseroan dengan Asian Development Bank (ADB), International Finance Corporation (IFC), dan Deutsche Investitions-und Entwicklungsgesellschaft mbH (DEG). Saat ini PT IIF sedang melakukan persiapan untuk melaksanakan jalannya operasional perusahaan dengan mengintensifkan proses penyediaan pembiayaan jangka panjang bagi proyek infrastruktur yang layak secara komersial melalui instrumen pinjaman, penyertaan modal ataupun penjaminan pembiayaan infrastruktur (credit enhancement).

Sampai dengan akhir tahun 2010 ini, Perseroan telah berhasil memberikan pembiayaan langsung kepada proyek infrastruktur untuk sektor-sektor infrastruktur kelistrikan, pengairan, minyak dan gas, transportasi dan jalan. Sektor-sektor infrastruktur tersebut merupakan bagian dari delapan sektor yang diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.010/2009 tentang Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur. Perseroan juga telah berhasil melakukan pembiayaan project finance terhadap beberapa proyek infrastruktur. Hal ini merupakan pencapaian yang berarti bagi Perseroan di usia yang baru menginjak tahun kedua khususnya dipandang dari segi pembiayaan project finance yang lebih kompleks dibandingkan dengan pemberian pembiayaan lainnya.

Infrastructure development holds a very important role in supporting a country's economic development. The availability of adequate infrastructures increases competitiveness, creates employment, as well as opens access for the poor, which in turn will result in the improvement of equal opportunity distribution for society.

Established on 26 February 2009, PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) ("PT SMI") was one of Government's efforts to catch up the acceleration of infrastructure development in Indonesia. In its second year, PT SMI has showed significant achievement. Various obstacles, challenges, and limitation in human resources and in funding availability were well-handled.

PT SMI has successfully established PT Indonesia Infrastructure Finance ("IIF"), a subsidiary company, on 15 January 2010 with Grand Launching of IIF on 9 August 2010 by the Indonesian Minister of Finance Republic of Indonesia. IIF is a joint-venture company of PT SMI and Asian Development Bank ("ADB"), International Finance Corporation ("IFC"), and Deutsche Investitions-und Entwicklungsgesellschaft mbH ("DEG"). IIF is currently preparing its operation by intensifying the process of providing long-term funding for commercially-viable infrastructure projects through lending instruments, equity investments, or infrastructure financing guarantee (credit enhancement).

By the end of 2010, PT SMI had successfully provided direct funding to infrastructure projects in electricity, irrigation and waterways, oil and gas, road and transportation sectors. These infrastructure sectors are parts of the eight eligible sectors governed by the Minister of Finance Regulation No. 100/PMK.010/2009 about Infrastructure Financing Company. The Corporate has also successfully given project financing to several infrastructure projects. This has been a significant achievement of PT SMI in its second year, particularly from the aspect of the more complexity of a project financing compared to those of other financing.

Sambutan Dewan Komisaris

Guna meningkatkan kapasitas pendanaan Perseroan, maka Perseroan telah melakukan beberapa kerjasama dengan Japan Bank for International Corporation (JBIC) dan Islamic Corporation for the Development of the Private Sector (ICD). Di samping kerjasama dengan JBIC dan ICD tersebut, Perseroan juga memperoleh dukungan dari Environmental Cooperation-Asia Clean Development and Climate Program (ECO-Asia CDCP) berupa pelatihan dan technical assistant dalam melakukan analisa kelayakan proyek-proyek clean energy.

Sementara itu, Perseroan secara terus menerus melakukan penyempurnaan dengan melakukan peningkatan kapasitas (capacity building), baik secara internal maupun eksternal. Dalam hubungan ini, perlu terus dilakukan evaluasi dan penyesuaian aspek kelembagaan, proses bisnis, dan sumber daya manusia. Di samping itu, Perseroan juga telah melakukan kegiatan sosialisasi dan turut terlibat aktif dalam forum-forum infrastruktur, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Persero juga mengikuti kegiatan-kegiatan lain dalam rangka mempromosikan dan memperkenalkan keberadaan Perseroan serta berupaya menarik investor swasta untuk berinvestasi pada proyek-proyek infrastruktur di Indonesia.

Pada tahun 2010, untuk pertama kalinya Perseroan juga telah melaksanakan Program Bina Lingkungan (BL) sebagai bagian dari tanggung jawab sosial Perseroan. Realisasi program BL dalam bentuk pembinaan masyarakat yang berfokus pada pembangunan dan/ atau pemeliharaan infrastruktur dan tersebar di beberapa lokasi yaitu di Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatera Barat dan di Sorong, Papua. Kegiatan ini diharapkan mempunyai dampak yang positif bagi penerima bantuan dan masyarakat sekitar.

Untuk menjaga kesinambungan dan profesionalisme jajaran Persero, maka semenjak awal Dewan Komisaris bersama Direksi senantiasa berupaya memastikan jalannya pelaksanaan tugas Perseroan sesuai dengan tata kelola yang baik (Good Corporate Governance/ GCG). Komitmen yang tinggi terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik terus dikedepankan dan oleh karenanya pengawasan secara terintegrasi terus dilakukan. Sejauh ini, Dewan Komisaris berpendapat bahwa Manajemen Perseroan memiliki kepatuhan yang tinggi atas pelaksanaan tugas sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

To improve its funding capacity, PT SMI has built partnerships with Japan Bank for International Corporation (JBIC) and Islamic Corporation for the Development of the Private Sector (ICD). Other than that, PT SMI has also gained support from Environmental Cooperation-Asia Clean Development and Climate Program (ECO-Asia CDCP) in the form of training and technical assistance in conducting feasibility analysis of clean energy projects.

At the same time, PT SMI has been continuously making improvement by conducting capacity building both internally and externally. In connection with this, the institutional aspects, business processes, and human resources need to be continuously evaluated and adjusted accordingly. In addition, PT SMI also conducted socialization activity and took part in many infrastructure forums, both domestic and international. PT SMI also joined other activities in order to promote and introduce its existence as well as to attract private investors to invest in infrastructure projects in Indonesia.

In 2010, for the first time PT SMI also conducted Community Development Program (BL) as part of corporate social responsibility. The realization of BL program was through society development focusing on infrastructure development and/or maintenance in several locations of Jabodetabek, West Java, Central Java, West Sumatera, and Sorong, Papua. These activities were expected to give positive impact for the beneficiaries and local society.

To maintain the continuity and professionalism of the Boards of the Company, the Board of Commissioners and Directors always make sure that the PT SMI's performance is based on Good Corporate Governance (GCG). PT SMI puts high commitment upon the implementation of Good Corporate Governance and therefore, an integrated supervision is carried out on a regular basis. So far, Board of Commissioners agrees that the Management of PT SMI has a high compliance level in performing their duties in accordance with the Article of Association and the prevailing laws.

Letter from The Board of Commissioners

"Perseroan secara terus menerus melakukan penyempurnaan dengan melakukan peningkatan kapasitas (capacity building), baik secara internal maupun eksternal."

"PT SMI has been continuously making improvement by conducting capacity building both internally and externally."



Ke depan, Dewan Komisaris berharap Perseroan dapat lebih berpartisipasi dalam percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia dengan memberikan skala prioritas yang ditetapkan oleh Pemerintah, dan termasuk adanya penugasan dari Pemerintah dalam mempersiapkan feasibility study proyek-proyek infrastruktur yang dibutuhkan.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih atas segala dukungan yang diberikan oleh Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan Perseroan. Pencapaian kinerja selama tahun 2010 merupakan hasil kerja keras dan komitmen dari seluruh karyawan dan Manajemen Perseroan.

Atas nama Dewan Komisaris,
On behalf of Board of Commissioners,

Ngahim Sawega
Komisaris Utama
President Commissioner

To the future, the Board of Commissioners expects PT SMI to participate further in the acceleration of infrastructure development in Indonesia by adhering to the priorities set by the Government, including the assignment from the Government to prepare feasibility studies for infrastructure projects needed.

Finally, we would like to thank the Shareholders and the Stakeholders of PT SMI for all the supports given. The performance in 2010 reflects the result of hard work and commitment from all employees and Management PT SMI.

Laporan Direksi



Report from The Board of Directors

Manajemen mengucapkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa bahwa dalam tahun kedua operasional, Perseroan dapat menjalankan tugas dan amanah yang telah diberikan oleh Pemerintah.

Dalam waktu yang relatif sangat muda bagi suatu perusahaan, selain telah merealisasikan program Pemerintah dengan pembentukan IIF, Perseroan juga telah melakukan kegiatan investasi langsung pada beberapa proyek infrastruktur, dan menjalin kerjasama dengan berbagai institusi keuangan baik lokal maupun internasional dalam rangka meningkatkan kapasitas Perseroan sebagai sebuah perusahaan pembiayaan infrastruktur.

Pada tahun 2010 ini, Perseroan mencatat pencapaian penting bagi Perseroan, yaitu berhasil melakukan Pembiayaan Investasi (Project Financing) untuk proyek Pembangkit Listrik Tenaga Gasifikasi Batubara (PLTGB) di Melak Kabupaten Kutai Barat Kalimantan Timur dan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Kecamatan Pakkak Kabupaten Humbang Hasundutan Sumatera Utara.

PLTGB Melak merupakan proyek pembangkit listrik pertama di Indonesia (pilot project) yang menggunakan sistem gasifikasi batubara dengan biaya produksi listrik yang lebih rendah dibandingkan dengan pembangkit lain yang berbahan bakar solar dan memberikan kontribusi ketersediaan tenaga listrik di wilayah Kalimantan Timur yang saat ini masih mengalami defisit pasokan listrik. Sedangkan PLTA Pakkak merupakan renewable energy project dan bentuk kontribusi Perseroan dalam pemenuhan kebutuhan listrik di wilayah Sumatera Utara dengan biaya produksi listrik lebih rendah dibandingkan dengan pembangkit lain yang berbahan bakar minyak.

Perseroan juga telah menjalin kerjasama dengan beberapa lembaga internasional dalam rangka meningkatkan kapasitas Perseroan sebagai perusahaan pembiayaan infrastruktur, antara lain dengan Japan Bank for International Corporation (JBIC) untuk membentuk Infrastructure Fund yang khusus ditujukan untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur ramah lingkungan, Islamic Corporation for the Development of the Private Sector (ICD) untuk rencana pembentukan perusahaan pembiayaan infrastruktur berbasis syariah.

The Management would like to thank God the Almighty, that in its second operational year, PT SMI has been able to accomplish the assignments and mandates given by the Government.

In a relatively short period of time for a new company, after completing Government's program in establishing IIF, PT SMI has already made direct investment towards several infrastructure projects and built cooperations with several local and international financial institutions in order to increase Company's capacity as an infrastructure financing company.

In 2010, PT SMI recorded a significant milestone by successfully giving its first Investment Financing (Project Financing) to Coal Gassification Power Plant (PLTGB) in Melak, West Kutai Regency of East Kalimantan, and Hydro Power Plant (PLTA) in Pakkak, Humbang Hasundutan Subdistrict of North Sumatera.

PLTGB Melak is the first power plant project in Indonesia (pilot project) using coal gassification system with lower cost of electricity production than other diesel-fueled power plants and contributes the availability of electricity in East Kalimantan area which is still experiencing power supply deficit. While PLTA Pakkak is a renewable energy project and has been the Company's contribution to fulfill the electricity demand in North Sumatera areas with lower cost of electricity production than those of using oil resources.

In order to improve its financing capacity, PT SMI has established partnerships with several international institutions, such as with Japan Bank for International Corporation (JBIC) to establish Infrastructure Fund especially for financing environmental-friendly infrastructure projects and Islamic Corporation for the Development of the Private Sector (ICD) to assess the establishment of sharia-based infrastructure financing company.

Laporan Direksi

Perseroan juga mendapat bantuan dari Environmental Cooperation-Asia Clean Development and Climate Program (ECO-Asia CDCP) dalam bentuk pelatihan dan technical assistant serta analisa kelayakan proyek-proyek clean energy yang akan dibiayai oleh Perseroan.

Dalam kegiatan operasionalnya, Manajemen sangat menjunjung tinggi nilai-nilai tata kelola perusahaan yang baik (GCG). Untuk itu, Perseroan telah menjalin kerjasama dengan BPKP selaku pihak eksternal yang independen dan kompeten untuk melakukan Diagnostic Assessment atas penerapan GCG pada Perseroan sehingga diharapkan dapat meningkatkan serta menyempurnakan penerapan GCG Perseroan.

Manajemen sangat menyadari pentingnya capacity building bagi karyawan sebagai salah satu aset utama Perseroan. Oleh karena itu, Perseroan terus mendorong para karyawan untuk terus mengembangkan diri guna meningkatkan kompetensi dan memberikan kontribusi yang optimal bagi Perseroan. Capacity building dilaksanakan melalui berbagai media pelatihan, seminar dan workshop.

Dalam rangka sosialisasi dan transparansi publik, Perseroan terus menjalin hubungan baik dan koordinasi intensif baik dengan pihak regulator dan institusi terkait maupun dengan Pemangku Kepentingan lainnya melalui berbagai forum diskusi dan seminar. Hubungan dan koordinasi yang baik dengan regulator juga memungkinkan kami untuk terus berjalan di koridor regulasi dengan tujuan terjadinya aspek kepatuhan terhadap regulasi.

Terkait dengan pertanggungjawaban Perseroan tahun buku 2010, KAP Kanaka Puradireja Suhartono telah melakukan audit dan memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian untuk Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2010. Sedangkan untuk Laporan Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan menyimpulkan bahwa Perseroan telah mematuhi dalam semua hal yang material. Untuk Laporan atas Pengendalian Internal menyimpulkan bahwa tidak ada masalah berkaitan dengan pengendalian internal dan operasinya yang dipandang memiliki kelemahan material. Adapun untuk Laporan PKBL, KAP memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian.

Pencapaian dan pengalaman dalam tahun 2010 ini memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi Perseroan untuk menghadapi tantangan di tahun berikutnya. Konsolidasi internal Perseroan dan tekad

PT SMI also receives support from Environmental Cooperation-Asia Clean Development and Climate Program (ECO-AsiaCDCP) in getting trainings and technical assistance as well as feasibility analysis of clean energy projects to be financed by the Corporate.

In its operational activities, the Management upholds the values of Good Corporate Governance (GCG). PT SMI has developed partnership with BPKP as an external independent and competent party to conduct Diagnostic Assessment upon the implementation of GCG in the Company, thus, it is expected to be able to improve and complete the GCG implementation in the Company.

The Management is fully aware of the importance of capacity building for the employees as one of the Company's main assets. Therefore, PT SMI always encourages all employees to keep improving their competencies and give optimum contribution to the Company. Capacity building is conducted through various ways, including trainings, seminars and workshops.

In terms of socialization and public transparency, PT SMI keeps on building good relationships and intensive coordination with the regulator and related institutions as well as other Stakeholders through several discussion forums and seminars. Good relationship and coordination with the regulator also enable us to keep moving on the regulation corridor to be in compliance of the prevailing regulations.

In relation to Company's 2010 fiscal year accountability, KAP Kanaka Puradiredja, Suhartono (KAP) had conducted audit and produced an "Unqualified" opinion for the Corporate Financial Report in 2010 Fiscal Year. As for the Compliance with Laws and Regulations Report, it was concluded that PT SMI is in compliance with all substantial matters. According to Internal Control Report, there is no material weakness found in the internal control and its operations. And for PKBL (Community Development Program) Report, KAP has given "Unqualified" opinion as well.

Achievements and experiences in 2010 have given valuable lessons for PT SMI to face challenges in the following year. The Company's internal consolidation and strong commitment to always serve better become the

Report from The Board of Directors

" Pada tahun 2010 ini, Perseroan mencatat pencapaian penting bagi Perseroan, yaitu berhasil melakukan Pembiayaan Investasi (Project Financing) untuk proyek Pembangkit Listrik Tenaga Gasifikasi Batubara (PLTGB) di Maelak Kabupaten Kutai Barat Kalimantan Timur dan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Kecamatan Pakkat Kabupaten Humbang Hasundutan Sumatera Utara. "

" In 2010, PT SMI recorded a significant milestone by successfully giving its first Investment Financing (Project Financing) to Coal Gassification Power Plant (PLTGB) in Melak, West Kutai Regency of East Kalimantan, and Hydro Power Plant (PLTA) in Pakkat, Humbang Hasundutan Subdistrict of North Sumatera. "

untuk selalu memberikan yang lebih baik menjadi modal tersendiri bagi Perseroan untuk menjalankan misi dan mencapai visi serta tujuan Perseroan di masa yang akan datang dan memungkinkan Perseroan untuk terus bertumbuh.

Di luar kegiatan utama perseroan tersebut, dengan merujuk kepada Nota Kesepahaman antara Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas dan Kepala BKPM, Perseroan mendapat tugas dari pemerintah untuk melaksanakan fasilitasi persiapan proyek-proyek Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS).

Harus diakui bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, termasuk tingginya harapan pemerintah terhadap peran serta Perseroan di dalam pembiayaan proyek infrastruktur. Ini semua memacu semangat kami untuk memperbaiki dan meningkatkan diri dalam menjalankan tugas dan amanah. Kami percaya bahwa berbekal kerjasama tim yang solid, motivasi yang kuat dan semangat kerja yang selalu mengutamakan improvement, Insya Allah di tahun 2011 Perseroan dapat melaksanakannya dengan baik.

Pada kesempatan ini, seluruh jajaran Direksi menyampaikan terima kasih kepada seluruh pemangku kepentingan, khususnya Kementerian Keuangan, Dewan Perwakilan Rakyat - Republik Indonesia, Menko

Company's strength to accomplish its mission and achieve its vision and future objectives which will enable PT SMI to continuously grow.

Other than the company's main activities and referring to the Memorandum of Understanding between Minister of Finance, Minister of National Development Planning / Head of Bappenas and Head of Capital Investment Coordinating Board (BKPM), PT SMI is assigned by the Government to facilitate the preparation of Public Private Partnerships (PPP) projects.

PT SMI realizes that there are still many homeworks to complete, including Government's high expectation towards the Company's role in financing infrastructure project. This motivates us to improve ourselves in completing the assignments and mandates. We believe with our solid teamwork, strong motivation and work enthusiasm which always prioritize improvement, Insya Allah in 2011 PT SMI could perform well.

All members of Board of Directors would like to take this opportunity to thank all the Stakeholders, especially Ministry of Finance, House of Representatives-Republic of Indonesia, Coordinating Minister of Economy, National

Laporan Direksi

"Pencapaian dan pengalaman dalam tahun 2010 ini memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi Perseroan untuk menghadapi tantangan di tahun berikutnya."

"Achievements and experiences in 2010 have given valuable lessons for PT SMI to face challenges in the following year."

Perekonomian, Bappenas dan Dewan Komisaris atas dukungan, bimbingan dan kepercayaan yang diberikan selama tahun 2010 sehingga Perseroan dapat menjalankan tugas dan mengupayakan pencapaian target yang telah ditetapkan dengan kondisi dan kendala yang harus dihadapi.

Tidak lupa pula Direksi menyampaikan terima kasih kepada seluruh karyawan, mitra bisnis, rekan-rekan media massa, dan pihak-pihak terkait lainnya, serta masyarakat umum atas kepercayaan serta kerjasamanya sepanjang tahun 2010.

Akhir kata, kami berharap untuk tetap memperoleh dukungan penuh dari seluruh pemangku kepentingan agar kami dapat berkontribusi maksimal dalam rangka mendukung percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia.

Development Planning Agency (Bappenas), and Board of Commissioners for their support, guidance, and trust given in 2010, which enabled PT SMI in completing its assignments and achieving the set target with all its condition and constraints.

Board of Directors would also like to thank all the employees, business partners, media, and other related parties, as well as general society for their trust and good cooperation throughout the year 2010.

Last but not least, we expect to continuously obtain full support from all stakeholders to enable us to contribute in maximum to support the acceleration of infrastructure development in indonesia.

Atas nama Direksi,
On behalf of Board of Directors



Emma Sri Martini
Direktur Utama
President Director

Report from The Board of Directors



Profil Perseroan



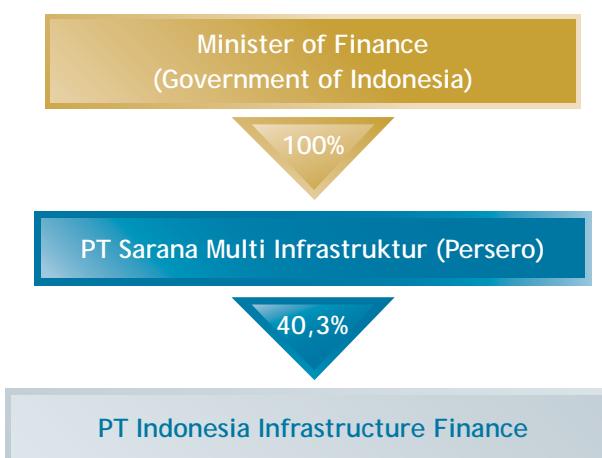
Company Profile

Perseroan merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang didirikan pada tanggal 26 Februari 2009 dengan Akta Pendirian No. 17 yang dibuat di hadapan Notaris Lolani Kurniati Irdham-Idroes, SH, LLM di Jakarta berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2007, tanggal 10 Desember 2007 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Pembiayaan Infrastruktur, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor: 75 Tahun 2008, tanggal 16 Desember 2008. Pendirian Perseroan ini ditujukan guna mendorong percepatan penyediaan pembiayaan infrastruktur nasional melalui kemitraan dengan pihak swasta dan/ atau lembaga keuangan multilateral.

Saham Perseroan seluruhnya dimiliki oleh Pemerintah Indonesia melalui Menteri Keuangan Republik Indonesia. Perseroan memiliki 40,3% saham di anak perusahaannya yaitu PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF) yang dibentuk bersama-sama dengan 3 (tiga) lembaga multilateral yaitu ADB, IFC dan DEG.

PT SMI is a State-Owned Enterprise (SOE), established on 26 February 2009 by the Deed of Establishment No. 17 by Notary Lolani Kurniati Irdham-Idroes, SH, LLM in Jakarta based on Government Regulation No. 66 of 2007, dated 10 December 2007 on the State Equity Investment of Republic of Indonesia for the Establishment of the Company (Persero) in the field of infrastructure financing, as amended by Government Regulation No. 75 of 2008, dated 16 December 2008. PT SMI establishment is intended to accelerate provision for national infrastructure funding through partnerships with private and/ or multilateral financial institutions.

PT SMI is 100% owned by the Government of Indonesia through the Minister of Finance Republic of Indonesia. PT SMI owns 40.3% shares in its subsidiary, IIF, along with 3 multilateral institutions, ADB, IFC and DEG.



Visi

Menjadi katalis percepatan pembangunan infrastruktur nasional yang handal dan terpercaya.

Misi

- Menjadi mitra strategis pemerintah dalam pengembangan dan upaya percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia.
- Melakukan sinergi dengan pihak ketiga baik swasta, Pemda, BUMN maupun organisasi-organisasi multilateral untuk meningkatkan kapasitas pendanaan untuk pembangunan infrastruktur dan mendorong pertumbuhan nasional.

Vision

A leading catalyst in the acceleration of the National Infrastructure Development Program.

Mission

- To become a strategic partner to the government in promoting and accelerating infrastructure development in Indonesia.
- To establish synergy with third parties, e.g. private institutions, banking sector, local governments, State Owned Enterprises, or multilateral organizations in order to increase the capacity of infrastructure fund.

Profil Perseroan

Tujuan

- Sebagai katalis dalam percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia
- Memberikan alternatif sumber dana untuk pembiayaan proyek
- Mempromosikan Kerjasama Pemerintah-Swasta/Public Private Partnerships (PPP)
- Meningkatkan jumlah, kapasitas dan efektivitas melalui kemitraan dengan pihak ketiga.

Corporate Values

• Partnership with Trust

kami meyakini bahwa kerjasama dengan berbagai pihak (stakeholders) dalam mencapai tujuan percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia harus dilakukan dengan menumbuhkan rasa saling percaya.

• Integrity and Teamwork

Seluruh pelaksanaan tugas yang dilakukan dengan integritas tinggi dan dilakukan dalam tata kelola yang baik dengan dukungan kerjasama internal.

• Skilled and Innovative

penyediaan alternatif pembiayaan bagi para stakeholders hanya dapat dilakukan bila didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten, inovatif dan memiliki kredibilitas tinggi.

• Quality for Customer Satisfaction

perusahaan mengedepankan kualitas pelayanan yang berdampak pada kepuasan pelanggan.

• Accelerate to Build

semua upaya yang dilakukan perusahaan diarahkan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur di Indonesia.

Company Motto

"Build Now for a Better Future"

Kegiatan Usaha

1. Kerjasama dengan pihak swasta, Badan Usaha Milik Negara, Pemerintah Daerah, maupun lembaga keuangan multilateral, dalam rangka pendirian perusahaan yang khusus bergerak di bidang pembiayaan infrastruktur;
2. Kegiatan pembiayaan kepada badan hukum lain berupa penyertaan modal maupun pinjaman terkait bidang infrastruktur;

Company's Objectives

- A catalyst in acceleration of the infrastructure development in Indonesia
- To provide alternative source of fund to financing project
- To promote Public Private Partnerships (PPP)
- To increase the size, capacity and its effectiveness through the partnership with third parties.

Corporate Values

• Partnership with Trust

We believe that partnerships with the stakeholders to achieve the objective to accelerate infrastructure development in Indonesia must be done through mutual trust.

• Integrity and Teamwork

All tasks are conducted with high integrity and in good governance with internal coordination support.

• Skilled and Innovative

Supplying alternative financing for the stakeholders can only be done with the support of competent, innovative and high credible human resources.

• Quality for Customer Satisfaction

The Corporate prioritizes service quality resulting in customer satisfaction.

• Accelerate to Build

All the Company efforts are focused on accelerating infrastructure development in Indonesia.

Company Motto

"Build Now for a Better Future"

Scope of Work

1. Collaborating with private parties, State Owned Enterprises, Local Governments and multilateral financial institutions to establish a company specialising in infrastructure financing company;
2. Providing financing to other corporations through equity participation or infrastructure-related loan;

Corporate Profile

3. Pengembangan kemitraan dan/atau kerjasama dengan pihak ketiga dalam mendorong percepatan pembangunan infrastruktur;
4. Penyediaan jasa pendukung untuk investor baik investor domestik maupun investor asing seperti konsultasi investasi dan aktivitas lainnya untuk mewujudkan peningkatan investasi dalam bidang infrastruktur;
5. Kegiatan penelitian dan pengembangan serta sosialisasi terkait kegiatan infrastruktur;
6. Pengelolaan dana dalam rangka optimalisasi dana pembiayaan infrastruktur; dan
7. Kegiatan lainnya terkait upaya percepatan pembangunan infrastruktur.

Cakupan Sektor Infrastruktur

Cakupan sektor-sektor infrastruktur yang dapat dibiayai oleh Perseroan dan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 100/PMK.010/2009 tentang Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur:

3. Developing partnerships and/ or collaborations with third parties to accelerate infrastructure development;
4. Providing supporting services for domestic and foreign investor such as investment consultation and other activities to promote infrastructure investment;
5. Conducting research and development, and infrastructure-related socialization;
6. Managing fund to optimize infrastructure financing fund; and
7. Other activities related to acceleration of infrastructure development;

Infrastructure Sector Coverage

Infrastructure sectors coverage which are eligible to be financed by the Corporate and based on Minister of Finance Regulation No. 100/PMK.010/2009 on Infrastructure Financing Company:



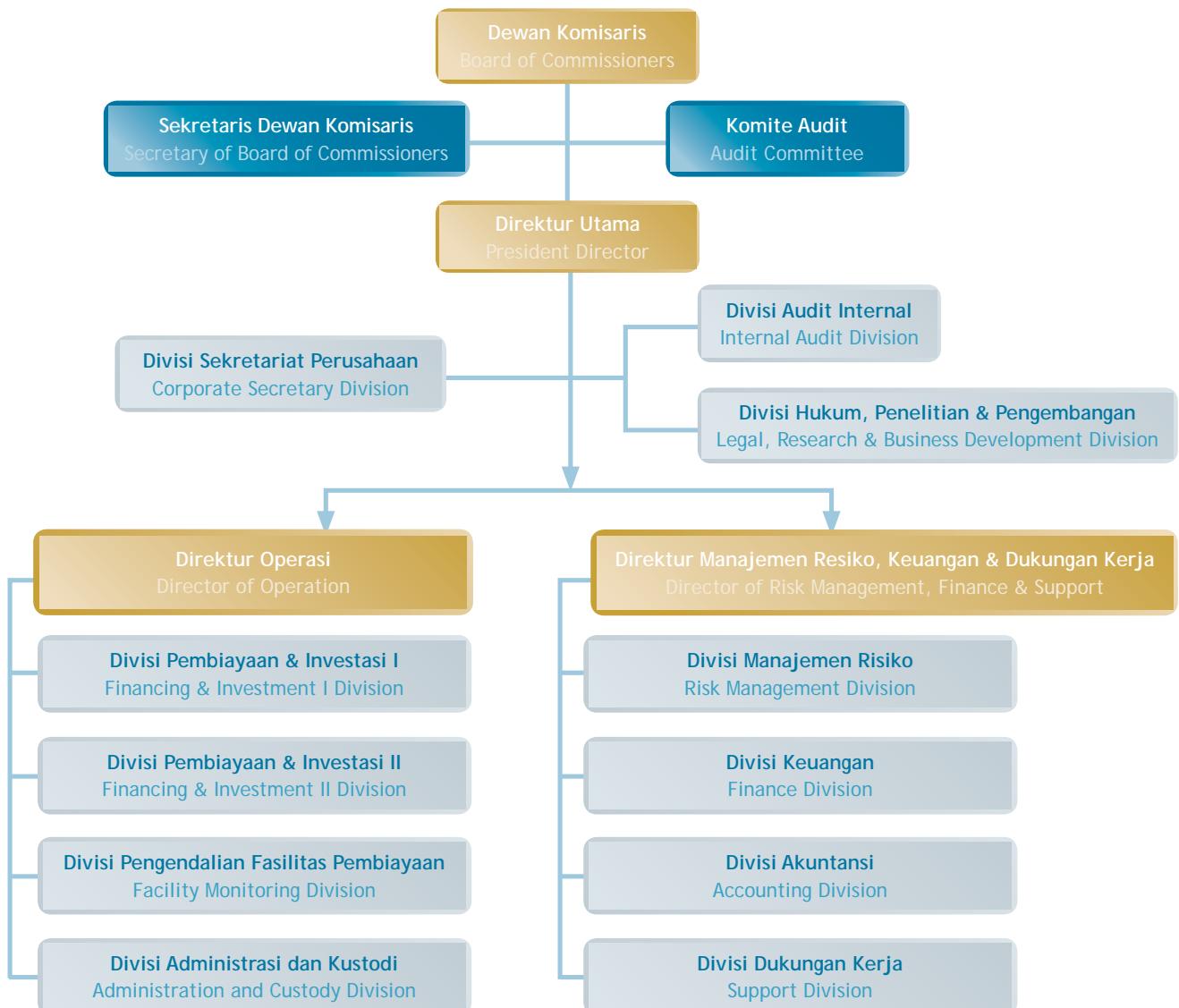
Profil Perseroan

Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Perseroan adalah sebagai berikut:

Organization Structure

The Company's organization structure is outlined below:



Corporate Profile

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris	
Komisaris Utama	Ngalim Sawega
Komisaris	Langgeng Subur
Komisaris	Wahyu Utomo
Direksi	
Direktur Utama	Emma Sri Martini
Direktur Operasi	Frans Nembo Sukardi
Direktur Manajemen Risiko, Keuangan dan Dukungan Kerja	Farida Astuti

Jumlah karyawan per 31 Desember 2010 adalah 33 karyawan.

Kerangka Kerja

Sebagai perpanjangan tangan Pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan pembangunan infrastruktur di Indonesia, Perseroan berperan sebagai Fasilitator dan Katalisator bagi Pemilik Proyek dan Pemberi Dana/ Investor dengan kerangka kerja sebagaimana dimuat dalam bagan di bawah ini:

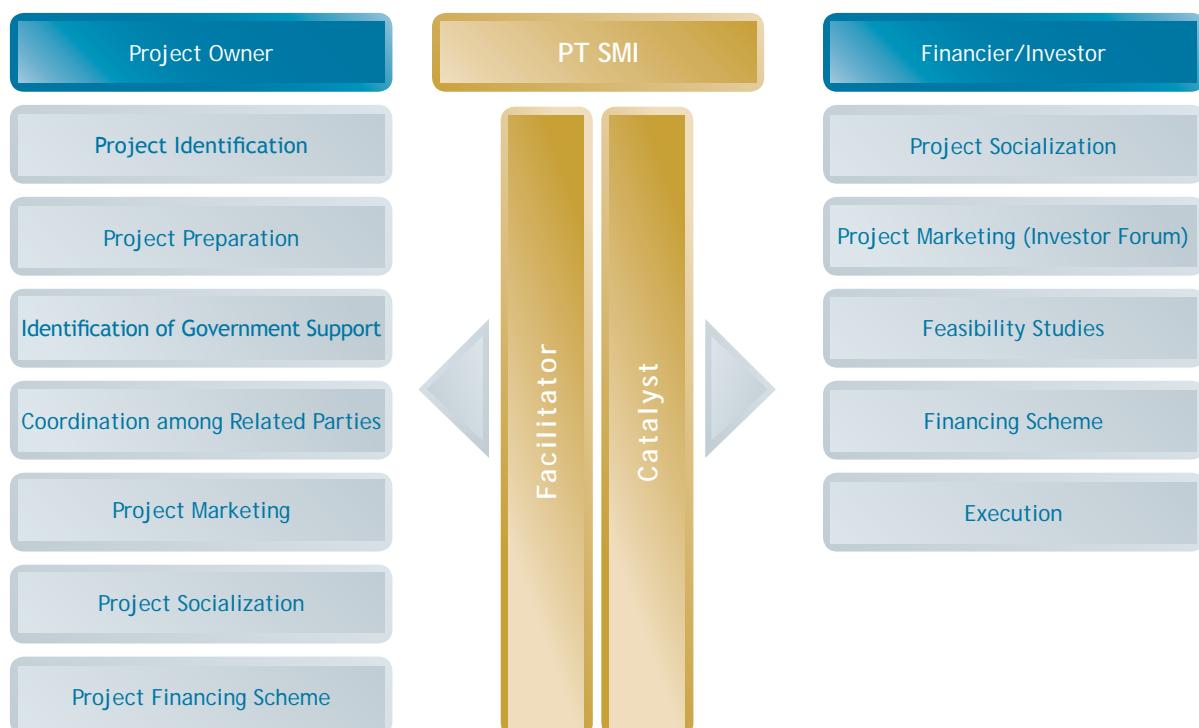
Board of Commissioners and Board of Directors structure are outlined below:

Board of Commissioners	
President Commissioner	Ngalim Sawega
Commissioner	Langgeng Subur
Commissioner	Wahyu Utomo
Board of Directors	
President Director	Emma Sri Martini
Director of Operations	Frans Nembo Sukardi
Director of Risk Management, Finance and Support	Farida Astuti

Number of employees as of 31 December 2010 is 33.

Operational Framework

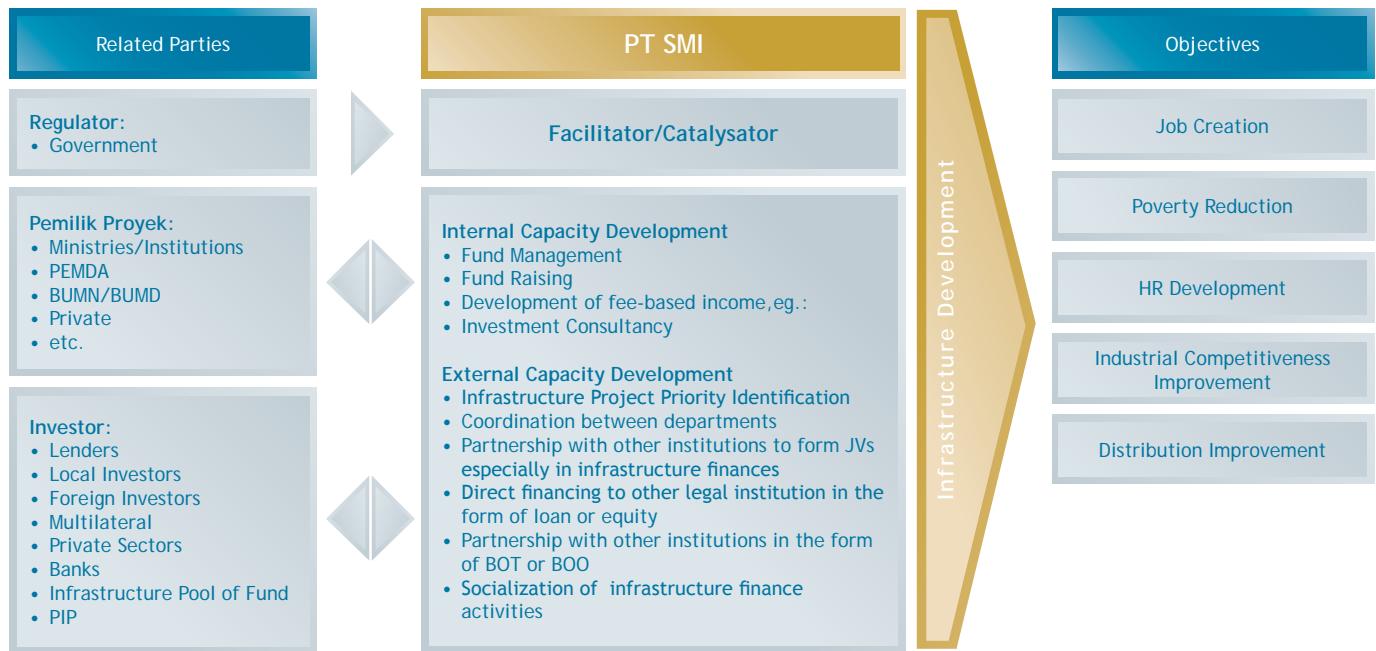
As the Government's arms length in improving infrastructure development growth in Indonesia, PT SMI acts as a Facilitator and Catalyst to Project Owners and Funders / Investors with the following framework:



Profil Perseroan

Perseroan akan bekerjasama dengan pihak-pihak terkait, seperti regulator, pemilik proyek dan investor untuk meningkatkan kapasitas pembiayaan pembangunan infrastruktur sebagaimana bagan di bawah ini:

PT SMI will cooperate with related parties, such as regulators, project owners and investors to increase the financing capacity of infrastructure development in a scheme as outlined below:



Perseroan senantiasa menjalin kerjasama yang kuat dengan sektor swasta, BUMN, PEMDA, Pemerintah Pusat, Institusi Multilateral (World Bank, ADB, IFC, dll.) dan institusi lain untuk meningkatkan kapasitas dana infrastruktur dan mempercepat pembangunan infrastruktur nasional. Dalam kegiatan pembiayaannya Perseroan melaksanakan kegiatan pembiayaan di berbagai sektor infrastruktur dengan memberikan pembiayaan hutang, ekuitas dan pembiayaan mezzanine. Di samping itu, Perseroan menyediakan dukungan yang dibutuhkan oleh investor lokal maupun asing dengan kegiatan advisory. Kegiatan advisory ini diharapkan dapat menarik investasi baru di sektor infrastruktur. Oleh karena itu, kegiatan penelitian dan pengembangan dan sosialisasi mengenai pembiayaan infrastruktur di Indonesia terus dijalankan oleh Perseroan.

Sinkronisasi dengan Kebijakan dan Prioritas Pemerintah

Perseroan berusaha untuk berjalan beriringan dengan kebijakan-kebijakan dan prioritas Pemerintah dalam pembangunan infrastruktur nasional. Pembiayaan proyek-proyek infrastruktur diarahkan untuk mendukung

PT SMI continuously develops strong partnerships with private sector, State Owned Enterprises, Local Governments, Central Government and Multilateral Institutions (World Bank, ADB, IFC etc.) and other institutions to increase the infrastructure fund capacity and to accelerate national infrastructure development. In its financing activities, PT SMI provides financing for various infrastructure sectors through debt financing, equity and mezzanine financing. PT SMI also provides supports needed by local and foreign investors through advisory services. This activity is expected to be able to attract new investments in infrastructure sector. Therefore, PT SMI continuously conducts research, development and socialization activities relating to infrastructure financing in Indonesia.

Synchronization with the Government's Policies and Priorities

PT SMI strives to comply in accordance with the Government's policies and priorities in national infrastructure development programs. Financing infrastructure projects are prioritized to support labor-

Corporate Profile

proyek-proyek yang padat karya dan mendorong pembangunan ekonomi skala besar, proyek-proyek yang ramah lingkungan dan berkontribusi pada pengurangan emisi karbon serta proyek infrastruktur yang dapat meningkatkan kemakmuran dan mengurangi kemiskinan.

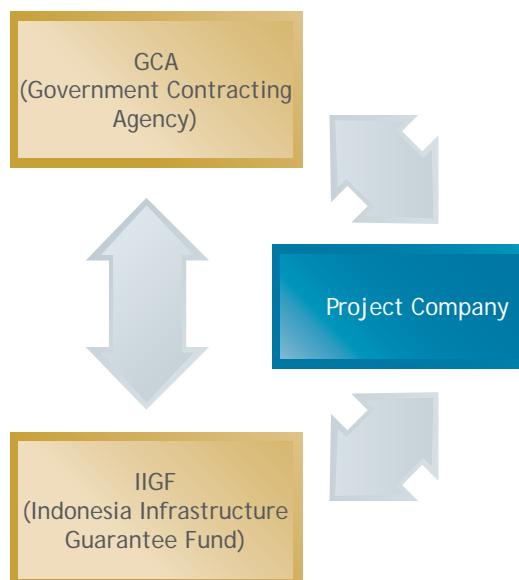
Mengisi kekosongan dan nilai tambah

Perseroan memposisikan diri untuk mengembangkan pasar pembiayaan ekuitas dan mezzanine yang belum sepenuhnya dapat diserap oleh perbankan, antara lain dengan mengusahakan pemberian tenor pembiayaan yang lebih fleksibel.

Selain itu, Perseroan juga dapat membantu mengembangkan proyek-proyek sejak tahap awal sehingga menjadi layak untuk memperoleh pembiayaan, mencari solusi pembiayaan bagi para calon debitur yang masih belum bankable serta ikut serta mengembangkan sektor baru dan mendukung inovasi yang berdasar potensi dan manfaat.

Sinergi di dalam Kerjasama Pemerintah Swasta

Unsur-unsur di dalam KPS akan bersinergi dalam pelaksanaannya sebagaimana digambarkan dalam bagan berikut ini :



Badan Usaha yang terpilih sebagai pelaksana pembangunan proyek infrastruktur akan menandatangani perjanjian konsesi dengan Pemilik Proyek Sektor Publik/ Government Contracting Agency (GCA).

intensive projects and promote large-scale economic development, environmental-friendly projects which contribute to carbon emission reduction as well as infrastructure projects to increase prosperity and reduce poverty.

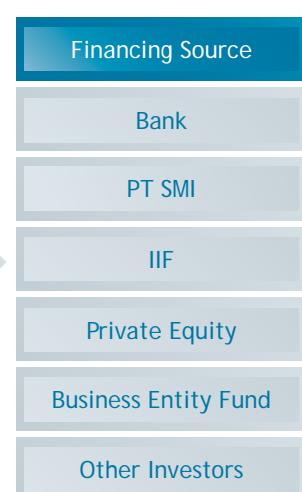
Filling the gap and creating additional value

PT SMI positions itself to develop equity and mezzanine financing markets which are not fully absorbed by the banks, among others by providing more flexible financing tenor.

In addition, PT SMI can also supports projects development from early stage to feasible stage for financing, seeks financing solutions for potential debtors who are not yet bankable as well as participates in developing new sectors and supporting potential and beneficial innovations.

Synergy in the Public Private Partnerships (PPP)

The elements of PPP will synergize as described in the following scheme:



A Project Company selected as the executor of infrastructure project construction will enter into a concession agreement with Government Contracting Agency (GCA).

Profil Perseroan

PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) (PT PII) akan memberikan penjaminan dari Pemerintah yang dituangkan dalam perjanjian penjaminan dengan Badan Usaha, yang mana akan didukung dengan perjanjian regresi antara Perusahaan Penjaminan Infrastruktur dengan GCA dalam mengamankan proyek apabila risiko yang dijaminkan termaterialisasi.

Dalam menjalankan fungsinya sebagai perusahaan pembiayaan, Perseroan dapat menjalin kerjasama dengan sumber-sumber pendanaan bagi pembangunan infrastruktur lain seperti perbankan, IIF, private equity dan para investor untuk melakukan pembiayaan terhadap proyek-proyek infrastruktur yang dilaksanakan oleh Badan Usaha.

Model Bisnis

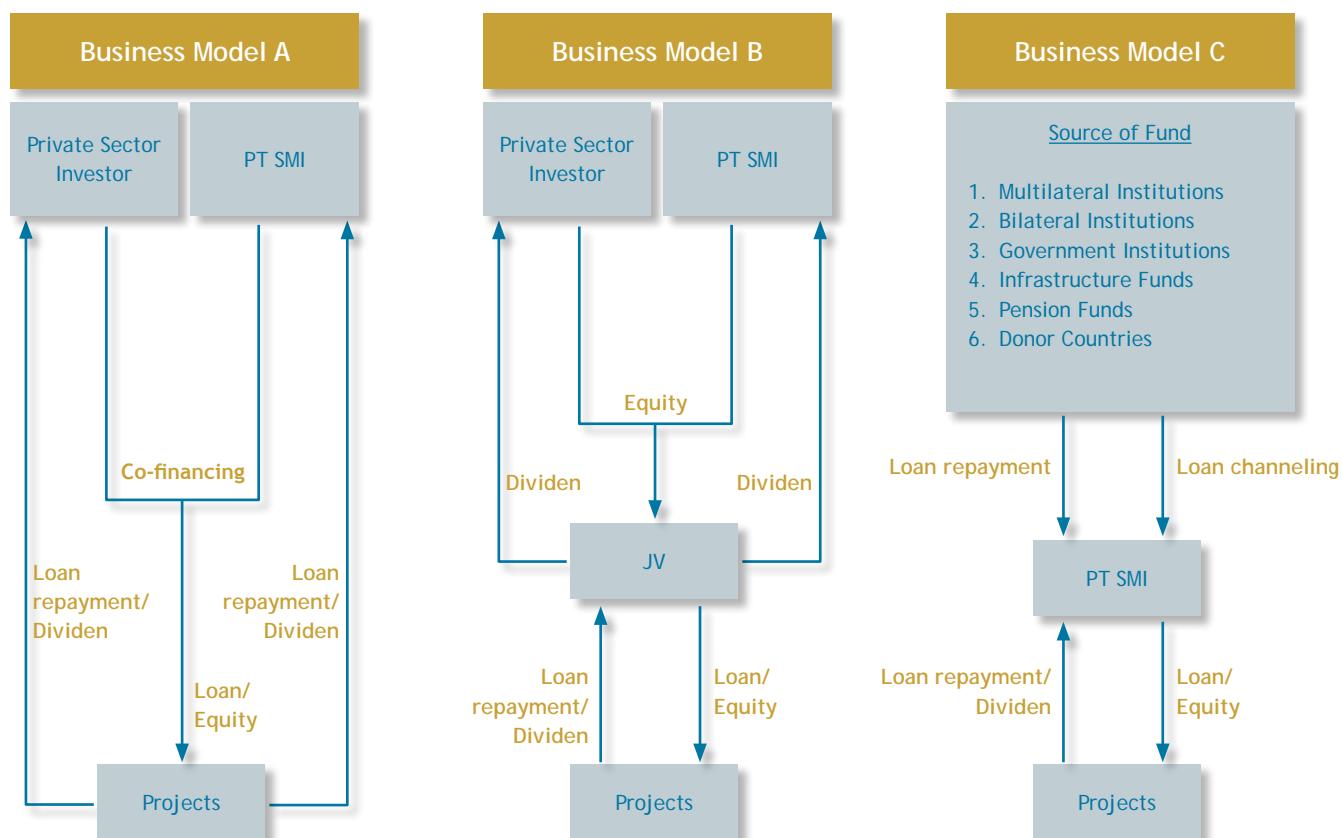
Dalam menjalankan fungsinya sebagai katalis pembiayaan infrastruktur di Indonesia, Perseroan mengembangkan skema-skema kerjasama dengan pihak-pihak pemberi dana lainnya dari dalam maupun luar negeri seperti pemerintah pusat dan daerah, investor swasta, sektor perbankan, dana investasi, dan institusi pendanaan internasional. Ada tiga skema model kerjasama bisnis (business model) yang telah dikembangkan seperti tergambar dan diuraikan sebagai berikut:

PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero) / Indonesia Infrastructure Guarantee Fund (IIGF) will issue a Government guarantee in the form of a guarantee agreement with the Project Company, which will be supported by a regression agreement between the Infrastructure Guarantee Company and GCA in securing the projects if the insured risks materialize.

In performing its function as a financing company, PT SMI can cooperate with other financing sources for infrastructure development such as banks, IIF, private equity and investors to finance the infrastructure projects undertaken by the Project Company.

Business Model

In performing its function as a catalyst for infrastructure financing in Indonesia, PT SMI has developed cooperation schemes with other funding sources either local or foreign partners, such as central and local governments, private investors, banks, investment funds, and international funding institutions. There are three schemes of business models which have been developed as illustrated and described below:



Corporate Profile

Business Model A

Perseroan secara bersama-sama dengan co-investor/ financier melakukan co-investment/ financing langsung kepada proyek infrastruktur. Model bisnis ini secara umum akan cocok untuk ditawarkan kepada calon co-investor/ financier lokal dan untuk nilai pembiayaan yang relatif kecil. Karena fleksibilitas dan kesederhanaan struktur pembiayaannya, model ini juga cocok digunakan untuk melayani kebutuhan pembiayaan yang relatif cepat. Tipe pengembalian tergantung pada tipe pembiayaan yang diberikan (pinjaman atau penyertaan modal).

Business Model B

Perseroan secara bersama-sama dengan co-investor/ financier melakukan co-investment/ financing kepada proyek infrastruktur secara tidak langsung. Sebelum membiayai proyek, Perseroan dan co-investor/ financier membentuk sebuah Joint Venture Company (JV) dengan menyetujui penyertaan modal yang akan diberikan kepada JV tersebut. Selanjutnya JV tersebut dapat melakukan pembiayaan secara langsung kepada proyek infrastruktur. Model ini dikembangkan terutama untuk melayani permintaan calon-calon co-investor/ financier asing maupun untuk melayani kebutuhan pembiayaan proyek yang relatif besar. Menimbang kompleksitas proses untuk mencapai pembiayaan kepada proyek sehingga membutuhkan persiapan dan waktu yang relatif lama, model ini lebih cocok untuk digunakan sebagai media pembiayaan yang sifatnya berulang atau multi projects. Tipe pengembalian kepada JV tergantung pada tipe pembiayaan yang diberikan (pinjaman atau penyertaan modal).

Business Model C

Selain kedua model di atas, Perseroan juga mengembangkan model ketiga untuk mengakomodasi penyaluran hutang (loan/ grant channeling) untuk membiayai proyek melalui Perseroan. Model ini banyak digunakan oleh lembaga publik asing maupun multilateral yang mempunyai skema pembiayaan bunga rendah namun khusus untuk kegiatan tertentu (misalnya suatu sektor infrastruktur tertentu). Tipe pengembalian kepada Perseroan tergantung pada tipe pembiayaan yang diberikan (pinjaman atau penyertaan modal).

Selain ketiga business model di atas, Perseroan menawarkan kesempatan kepada calon investor untuk mendiskusikan bentuk kerjasama lain yang paling sesuai bagi calon investor tersebut.

Business Model A

PT SMI together with a co-investor/ financier conducts direct co-investment/ financing to infrastructure projects. This business model is generally appropriate for prospective local co-investors/ financiers and for relatively small amount of financing. Because of its flexible and simple structure, this model is also suitable to serve a relatively urgent financing needs. The types of return will depend on the types of financing facilities provided (loan or equity participation).

Business Model B

PT SMI together with co-investor/ financier conducts indirect co-investment/ financing to infrastructure projects. Prior to financing the projects, PT SMI and co-investor/ financier will form a Joint Venture Company (JV) by approving equity investment given to the JV. The JV then can provide direct financing to infrastructure projects. This model is developed primarily to meet foreign co-investors/ financiers demands as well as to serve large projects financing needs. Considering the complexity in processing to reach the financing stage, this model is more suitable for repetitive financing or for financing multiple projects. The types of return to the JV will depend on the types of financing facilities provided (loan or equity participation).

Business Model C

In addition to the two models above, PT SMI has also developed the third model to accommodate debt distribution (loan / grant channeling) to finance projects through PT SMI. This model is widely used by foreign or multilateral public institutions which have a low interest financing scheme for particular activities (such as for a particular infrastructure sector). The types of returns for PT SMI depend on the types of financing facilities provided (loan or equity participation).

Besides the three business models described above, PT SMI offers opportunities for potential investors to discuss other forms of cooperations which are suitable for each respective investor.

Profil Perseroan

Jenis Pembiayaan

Perseroan menawarkan beberapa produk pembiayaan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan calon debitur:

Financing Type

PT SMI offers several financing products which can be tailored to debtor needs:

Pinjaman Senior Senior Loan

Perseroan akan bertindak sebagai pemberi pinjaman utama (senior) di dalam struktur pinjaman yang diperuntukkan bagi proyek-proyek infrastruktur.
PT SMI acts as the main lender (senior) in the loan structure for infrastructure projects.

Pinjaman Subordinasi/ Mezzanine Subordinated / Mezzanine Loan

Perseroan akan bertindak sebagai pemberi pinjaman junior di dalam struktur pinjaman yang diperuntukkan bagi proyek-proyek infrastruktur.
In this type of loan, PT SMI will act as a junior lender in the loan structure for infrastructure projects.

Pinjaman Convertible Convertible Loan

Skema pinjaman ini memungkinkan dilaksanakannya skenario pinjaman dikonversi menjadi saham saat jatuh tempo.
This loan scheme allows scenario of loan conversion into equity at the loan maturity date.

Investasi Ekuitas Equity Investment

Investasi langsung ke proyek-proyek infrastruktur melalui kepemilikan saham.
Direct investment to infrastructure projects through equity ownership.

Pembiayaan Kontrak Contract Financing

Pinjaman modal kerja kepada para kontraktor yang mengerjakan proyek-proyek infrastruktur. Pembayaran pinjaman berdasarkan kontrak dari pemilik proyek.
This working capital loan is for contractors working on infrastructure projects.
Disbursement of loan is based on contracts awarded by project owners.

Pembiayaan Invoice Invoice Financing

Pinjaman modal kerja kepada para kontraktor yang mengerjakan proyek-proyek infrastruktur. Pembayaran pinjaman berdasarkan piutang proyek.
This working capital loan is for contractors working on infrastructure projects.
Disbursement of loan is based on receivables of projects.

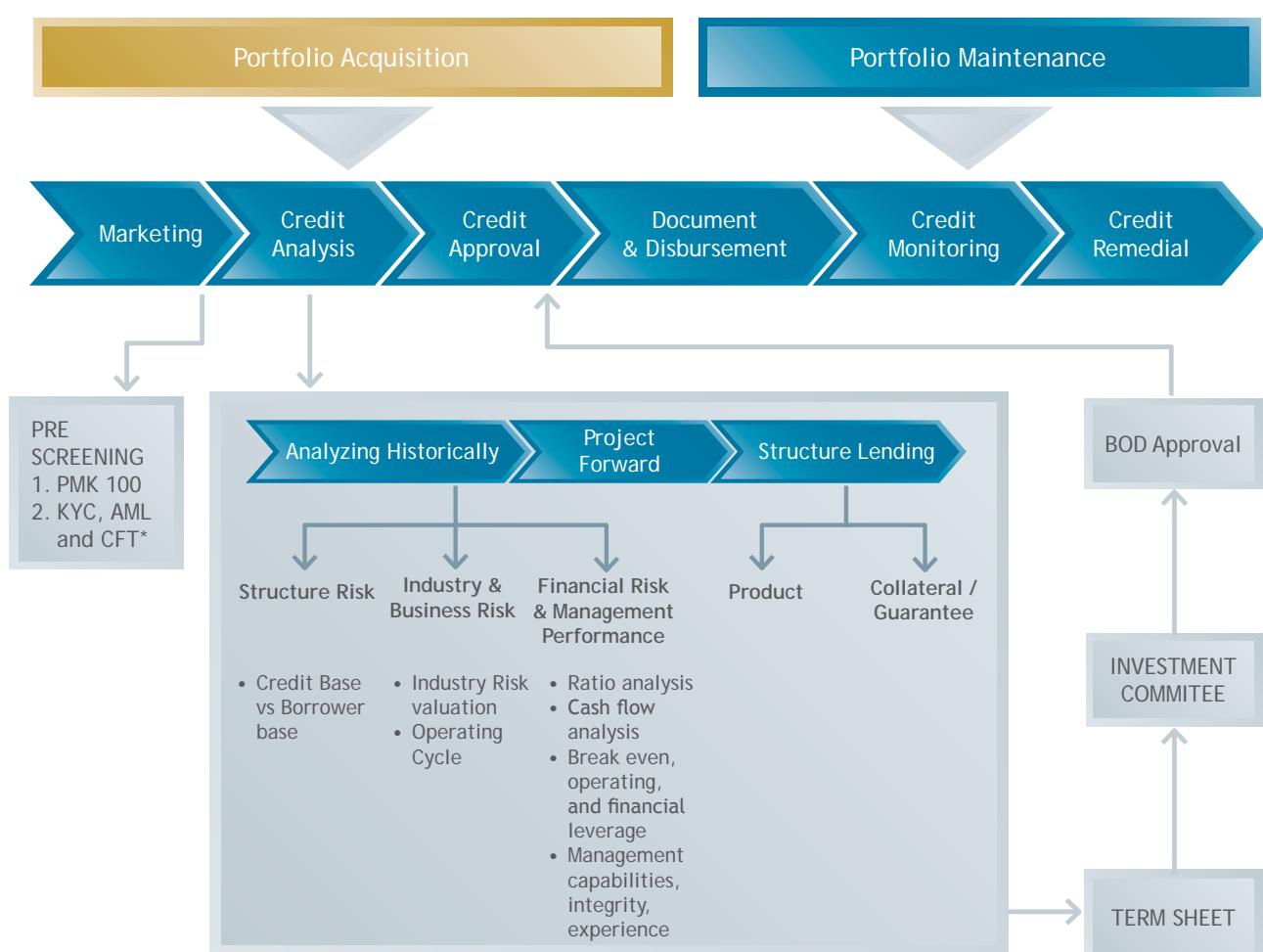
Corporate Profile

Tata Kelola Pemberian Pembiayaan

Dalam memberikan pembiayaan, Perseroan melakukan serangkaian proses due diligence dan analisa menyeluruh seperti tampak pada bagan di bawah ini :

Financing Approval Governance

In financing, PT SMI carries out series of due diligence processes and thorough analysis as seen in the following scheme:



* KYC: Know Your Customers

AML: Anti Money Laundering

CFT: Crime, Fraudulence & Terrorism

Peristiwa Penting 2010



15 Januari 2010

Soft Launching PT Indonesia Infrastructure Finance (PT IIF).

15 January 2010

Soft Launching of PT Indonesia Infrastructure Finance (PT IIF).



26 Februari 2010

Ulang Tahun Perseroan ke-1

26 February 2010

The Corporate's first anniversary



22-24 Maret 2010

Peserta PPP Days 2010 di Manila, Filipina

22-24 March 2010

Participant of PPP Days 2010 in Manila, Philippines



31 Juli 2010

Sosialisasi Perseroan pada Forum Wartawan Ekonomi dan Moneter (FORKEM)

31 July 2010

The Corporate dissemination at the Economic and Monetary Reporters Forum (FORKEM)

3 Agustus 2010

- Penandatanganan MoU antara Perseroan dengan JBIC dalam rangka membentuk Infrastructure Fund untuk pembiayaan proyek-proyek infrastruktur ramah lingkungan

3 August 2010

- MoU signing between PT SMI and JBIC to establish Infrastructure Fund to finance environmentally friendly infrastructure projects



Highlighted Events of 2010



14-17 April 2010

Sosialisasi Perseroan di Infrastructure Asia 2010

14-17 April 2010

Corporate Socialization at Infrastructure Asia 2010



24 Juni 2010

RUPS Tahunan Perseroan Tahun Buku 2009

24 June 2010

Corporate's Annual GMS - Financial Year 2009



29-30 Juni 2010

Sosialisasi Perseroan pada Business Forum, Kementerian Keuangan di Paviliun Indonesia - World Expo Shanghai China 2010

29-30 June 2010

The Corporate dissemination at Business Forum, Ministry of Finance at Indonesian Pavilion - World Expo Shanghai China 2010

6 September 2010

Sosialisasi Awareness GCG kepada Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan Perseroan oleh Badan Pengawasan Pembangunan & Keuangan (BPKP)

6 September 2010

GCG Awareness Session to Board of Commissioners, Board of Directors and Employees by the Board of Finance & Development Control (BPKP)

7-10 Oktober 2010

Sosialisasi Perseroan pada Kawasan Timur Indonesia (KTI) Expo di Makassar

7-10 October 2010

Corporate dissemination at the Eastern Indonesia (KTI) Expo in Makassar

15 Oktober 2010

Penandatangan Perjanjian Kredit kepada PT Cipta Daya Nusantara untuk project finance atas pembangunan PLTGB Melak

15 October 2010

Signing Project Financing Loan Agreement with PT Cipta Daya Nusantara for its PLTGB Melak construction.



Pembahasan Manajemen



Management Discussion

I. KONDISI INFRASTRUKTUR INDONESIA

Kerjasama Pemerintah Swasta dalam Pembangunan Infrastruktur

Banyak inisiatif yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia beberapa tahun terakhir ini guna mempercepat pembangunan infrastruktur melalui KPS.

Ada tiga kebijakan pemerintah yang mendasar yang dikeluarkan dalam rangka mempercepat program KPS yaitu: 1) Kesamaan hak dan keterbukaan melalui penghapusan monopoli dan membuka pintu bagi investor lokal dan asing untuk berinvestasi di semua sektor infrastruktur (dengan tetap mempertimbangkan regulasi-regulasi sektor terkait), 2) Seleksi secara fair dan kompetitif dengan melaksanakan tender terbuka bagi proyek-proyek KPS, 3) Peran pemerintah daerah dengan otonominya yang terefleksi di dalam regulasi-regulasi KPS dan sektor-sektor tertentu.

Keseriusan Pemerintah ini dibuktikan dengan dikeluarkannya berbagai peraturan yang pada dasarnya dapat mempermudah calon investor untuk membiayai proyek-proyek KPS. Belum lagi peraturan-peraturan lain yang terkait dengan masing-masing sektor infrastruktur seperti peraturan-peraturan di sektor transportasi, jalan, irigasi, air minum, air limbah dan persampahan, telekomunikasi, ketenagalistrikan dan minyak dan gas bumi.

Regulasi terbaru terkait pengaturan KPS adalah Peraturan Presiden No. 13 tahun 2010 mengenai Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 67 tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur menjadi salah satu usaha pemerintah dalam mempercepat pembangunan infrastruktur. Di dalam regulasi ini, disebutkan bahwa Pemerintah memberikan kompensasi kepada proyek unsolicited yang disetujui dengan penambahan nilai 10%, right to match dan pemerintah akan membeli hak intelektual inisiator proyek.

I. CONDITION OF INDONESIAN INFRASTRUCTURE

Public Private Partnerships in Infrastructure Development

There have been many initiatives undertaken by Indonesian Government to accelerate infrastructure development through PPP in the recent years.

There are three Government's fundamental policies issued to accelerate PPP program. They are: 1) Equality of rights and openness by eliminating monopoly and opening doors for local and foreign investors to invest in all infrastructure sectors (by considering related sectors regulations), 2) Fair and competitive selection process through open tenders for PPP projects, and 3) Roles of local governments with their autonomy to be reflected in PPP regulations and specific sectors.

The Government's seriousness is proven by issuing several regulations which basically can ease prospective investors to finance PPP projects. There are other regulations related to each infrastructure sector such as regulations on transportation, roads, irrigation, drinking water, waste water and solid waste, telecommunications, electricity and oil and gas sectors.

The latest regulation related to PPP is Presidential Regulation No. 13/ 2010 on the Amendment of Presidential Regulation No. 67/ 2005 concerning Public Private Partnership in Infrastructure Provision becomes one of Government's effort to accelerate infrastructure development. In this regulation, it is stated that the Government provides compensation to unsolicited projects approved with an added value of 10%, right to match and the Government will buy intellectual rights of the project initiator.

Pembahasan Manajemen

Regulasi terbaru yang menjadi salah satu bukti keseriusan Pemerintah dalam mendukung skema KPS ini adalah dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan No.21/PMK.011/2010 mengenai Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang untuk Kegiatan Usaha Hulu Eksplorasi Minyak dan Gas Bumi serta Kegiatan Usaha Eksplorasi Panas Bumi untuk Tahun Anggaran 2010. Dengan mengeluarkan peraturan ini, pemerintah berharap bahwa pajak pertambahan nilai dan impor barang akan menarik investasi dan meningkatkan competitiveness di dalam penggunaan energi terbarukan. Fasilitas yang diberikan adalah: fasilitas pajak penghasilan, fasilitas VAT, import duty facility, dan pajak yang menjadi beban Pemerintah

Banyak hal yang masih menjadi tantangan bagi Pemerintah dalam melaksanakan skema KPS ini. Beberapa diantaranya adalah proses percepatan dalam pengadaan lahan bagi proyek infrastruktur, proses tender yang transparan dan reliable, peningkatan infrastruktur dasar, dan perlunya sinkronisasi regulasi atau kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Selain itu, membuat regulasi yang cocok dan pas bagi semua sektor infrastruktur menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah dalam pengembangan KPS. Hal ini menjadi penting karena implementasi KPS bersifat kontraktual yang memerlukan kepastian hukum. Tantangan lainnya adalah peningkatan kapasitas dalam persiapan proyek, peningkatan project viability, dan pemberian insentif bagi para investor. Sedangkan di pihak investor, mereka mempunyai tantangan tersendiri yaitu terbatasnya akses kepada sumber-sumber pembiayaan jangka panjang dan terbatasnya akses kepada proyek-proyek yang viable.

The latest regulation as an evidence of the Government's seriousness in supporting PPP scheme is by issuing Minister of Finance Regulation No. 21/PMK.011/2010 on Value Added Tax borne by Government on Goods Import for Upstream Oil and Gas Exploration and Geothermal Exploration Activities for 2010 Fiscal Year. By issuing this regulation, the Government expects that the value added and import tax for goods will attract investment and improve competitiveness in the use of renewable energy. Facilities provided are: income tax facility, VAT facility, import duty facility, and taxes borne by the Government.

Many challenges remain for the Government in implementing PPP scheme. Some of them are the acceleration process of land provision for infrastructure projects, a transparent and reliable bidding process, improving basic infrastructure, and the need for regulatory or policy synchronization between central and local governments.

In addition to that, formulating a regulation which is appropriate and suitable for all infrastructure sectors is itself a challenge for the Government in developing PPP. This becomes important because PPP implementation is contractual requiring legal certainty. Other challenges are uplifting capacity in project preparation, improving project viability, and giving incentives to investors. Meanwhile, on the investors' side, they are facing their own challenges such as limited access to long-term financing sources and limited access to viable projects.

Management Discussion

II. KINERJA PERSEROAN

Project Pipeline

Sepanjang tahun 2010 ini, Perseroan telah menerima banyak proposal permohonan pembiayaan untuk proyek-proyek infrastruktur yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia, baik dari Kawasan Timur Indonesia maupun Kawasan Barat Indonesia. Proposal-proposal tersebut mencakup pembiayaan investasi untuk sektor-sektor infrastruktur jalan tol, air minum, air limbah, ketenagalistrikan dan pembiayaan modal kerja untuk kontraktor.

Setelah melalui proses analisa, Perseroan menetapkan 44 proyek untuk dimasukkan ke dalam project pipeline tahun 2010 seperti terlihat di dalam tabel Komposisi Project Pipeline di bawah ini.

II. COMPANY PERFORMANCE

Project Pipeline

During 2010, PT SMI received many financing proposals for infrastructure projects from various regions in Indonesia, both from Eastern and Western Indonesia. These proposals included investment financing for infrastructure sectors such as toll roads, drinking water, waste water, electricity and working capital financing for contractors.

After a thorough analysis, PT SMI had established 44 projects to be included into the project pipeline for 2010 as shown in the Pipeline Projects Composition table below.

Jenis Usaha Type of Business	Jumlah Proyek Number of Projects	Kawasan Indonesia Indonesia Zone		Jenis Pembiayaan Type of Financing	Project Cost (Rp Miliar) (IDR Million)
		Barat Western	Timur Eastern		
Pembangkit Listrik Power Plants	25	21	4	Investasi Investment	8.199
Pelabuhan Ports	6	1	5	Investasi Investment	2.520
Jalan Tol Toll Roads	5	5	0	Investasi Investment	17.500
Air Bersih Clean Water	2	2	0	Investasi Investment	3.500
Kontraktor Contractors	4	3	1	Modal Kerja Working Capital	658
Rel Kereta Api Railroads	1	1	0	Investasi Investment	7.000
Minyak dan Gas Bumi Oil & Gas	1	0	1	Investasi Investment	430
TOTAL	44	33	11		39.807

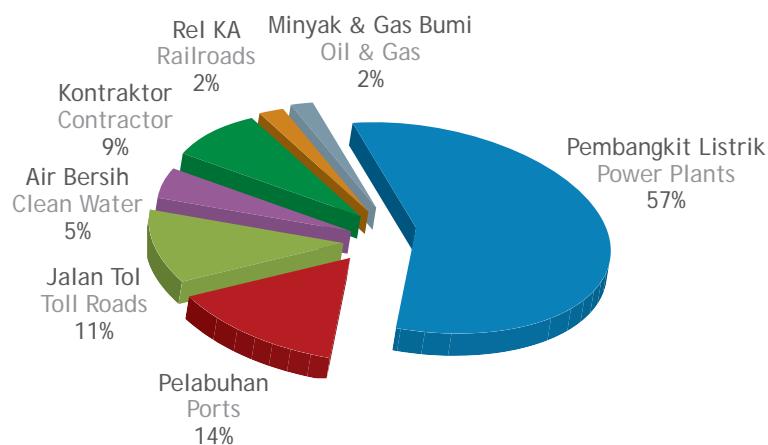
Pembahasan Manajemen

Jumlah Proyek Berdasarkan Sektor

Sektor ketenagalistrikan merupakan kontributor terbesar dari total pipeline proyek infrastruktur yang dibuat, yaitu sekitar 57%. Kondisi ini sejalan dengan urgensi pemerintah untuk segera mungkin mengatasi permasalahan ketersediaan pasokan listrik demi menjaga kesinambungan pertumbuhan ekonomi nasional.

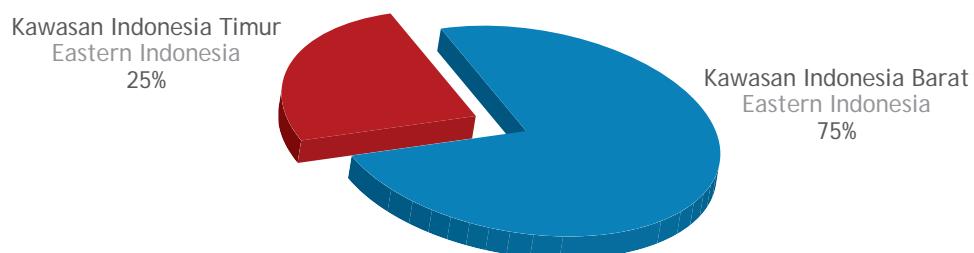
Number of Projects by Sector

The electricity sector was the largest contributor for the total infrastructure projects pipeline, which was 57%. This condition was consistent with the Government's urgency to immediately addresses problem of power supply availability in order to maintain a sustainable national economic growth.



Jumlah Proyek Berdasarkan Wilayah dan Jenis Pembiayaan

Number of Projects based on Zone and Type of Financing

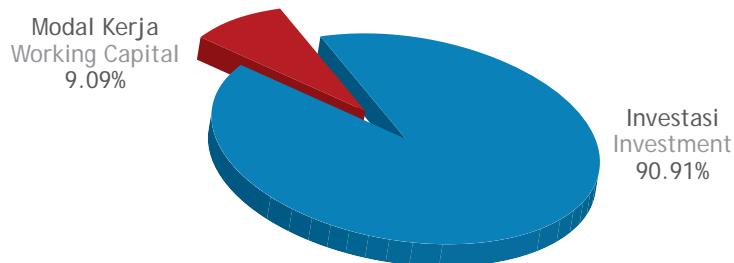


Kawasan Indonesia Timur telah terwakili sebanyak 11 proposal atau 25% dari total proposal yang diterima. Sedangkan proposal dari Kawasan Indonesia Barat yang diterima sebanyak 33 buah atau sebesar 75% dari total proposal. Perseroan masih mempunyai peluang besar untuk terlibat dalam pengembangan dan pembangunan infrastruktur di Kawasan Indonesia Timur.

Eastern Indonesia had been represented by 11 proposals or 25% of the total proposals received. Whereas proposals received from Western Indonesia were 33 proposals or 75% of the total proposals received. Many opportunities were still available for PT SMI to be involved in the expanding and infrastructure development in Eastern Indonesia.

Management Discussion

Jenis pemberian investasi juga mendominasi proposal yang telah diterima oleh Perseroan di tahun 2010 ini yakni sebesar 90,91% berbanding 9,09% pemberian modal kerja, yang dapat digambarkan dengan tabel berikut ini:



Realisasi Pemberian Investasi 2010

Sampai dengan akhir tahun 2010, Perseroan telah memberikan komitmen pemberian dengan total komitmen sebesar Rp480.397.000.000,- yang mencakup lima sektor infrastruktur dengan total project cost sebesar Rp1.479.357.855.097,- (USD110.356.610). Komposisi Komitmen Pemberian sampai dengan tahun 2010 dapat digambarkan seperti tabel berikut ini:

Type of investment financing had also dominated the proposals received by PT SMI in 2010 with 90.91% compared to 9.09% for working capital financing, which could be described by the following diagram:

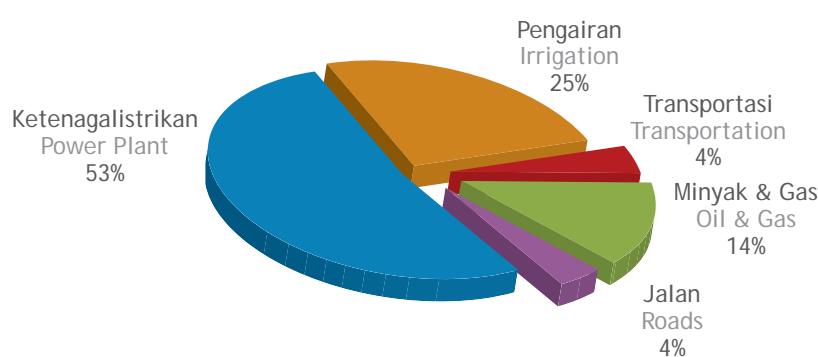
2010 Financing Realization

By the end of 2010, PT SMI had given its commitment to financing with a total commitment of IDR 480,397,000,000 which included five infrastructure sectors with total project cost of IDR 1,479,357,855,097 (US\$ 110,356,610). The composition of Financing Commitment for the year 2010 was as described in the following table:

Sector	Commitment (IDR)	Project Cost (IDR)	Type of Financing
Irrigation	120.000.000.000	544.510.863.000	Working Capital
Transportation	20.000.000.000	40.328.250.000	Working Capital
Oil & Gas	68.000.000.000	441.073.151.925 + USD 110.356.610,58	Working Capital
Roads	20.000.000.000	38.689.322.172	Working Capital
Power Plants	252.397.000.000	354.756.268.000	Investment Financing
Total	480.397.000.000	1.479.357.855.097 + USD 110.356.610,58	

Komitmen Pemberian oleh Perseroan Berdasarkan Sektor Infrastruktur

Financing Commitment by the Company based on Infrastructure Sectors



Pembahasan Manajemen



Sektor ketenagalistrikan menjadi yang terbesar dalam menyerap komitmen pembiayaan dengan prosentase sebesar 53%. Kesiapan investor ketenagalistrikan untuk menyerap komitmen pembiayaan menjadi faktor besarnya prosentase penarikan komitmen ini. Mereka telah siap baik dari sisi persyaratan maupun persiapan proyek yang akan dibiayai.

Pada tahun 2010 ini juga, Perseroan melakukan Pembiayaan Investasi untuk proyek Pembangkit Listrik Tenaga Gasifikasi Batubara (PLTGB) yang terletak di Melak Kabupaten Kutai Barat di Kalimantan Timur dan untuk proyek pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Kecamatan Pakkak Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara. Pembiayaan terhadap Proyek PLTGB tersebut merupakan bentuk dukungan Perseroan kepada Pemerintah (PLN) dalam usaha untuk menurunkan biaya produksi menjadi lebih rendah dari Rp1.500 per Kwh atau lebih rendah daripada pembangkit listrik berbahan bakar solar (>Rp1.500 per Kwh) serta bentuk kontribusi dalam penyediaan tenaga listrik di wilayah Kalimantan Timur yang saat ini masih mengalami defisit pasokan listrik.

Power plants sector was the largest recipient of financing commitments with a percentage of 53%. The readiness of the electricity investors to receive financing commitments became the factor of the high percentage of the drawdown of the commitment. They were ready for both the prerequisites and project preparations for financing.

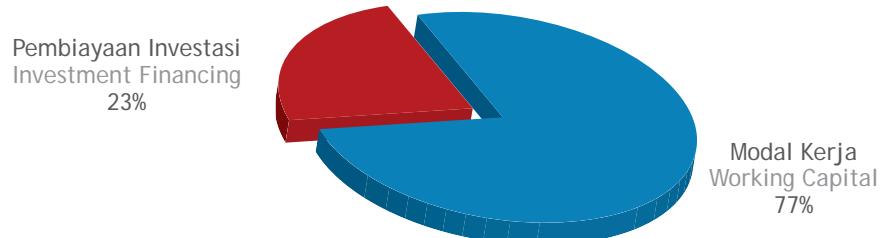
Also in 2010, PT SMI gave Investment Financing to Coal Gassification Power Plant (PLTGB) project located in Melak West Kutai Regency in East Kalimantan, and to Hydroelectric Power Plant (HEPP) project development in Pakkak Subdistrict, Hasundutan Humbang Regency, North Sumatra. Financing this PLTGB Project was a form of support to the Government (PLN) as an effort to lowering production costs to become less than IDR 1,500 per Kwh or lower than diesel-fueled power plants (> IDR 1,500 per Kwh) as well as a contribution form in providing electricity supply in East Kalimantan area which was still experiencing power supply deficit.

Management Discussion

Wilayah Kalimantan Timur ini memiliki sumber alam batubara dalam jumlah besar sehingga mempermudah untuk memperoleh sumber bahan bakar bagi pembangkit tersebut dan membuat material handling cost menjadi rendah. Dengan adanya pembangkit listrik baru ini maka pasokan listrik PLN kepada pelanggannya akan lebih stabil dan diharapkan tidak terjadi pemadaman bergilir lagi.

Sedangkan Proyek PLTA di Kecamatan Pakkat, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara merupakan kontribusi Perseroan terhadap kebutuhan listrik di wilayah Sumatera Utara. Proyek ini juga memberikan kontribusi kepada Pemerintah (PLN) dalam menurunkan biaya produksi listrik di wilayah tersebut. Biaya produksi listrik untuk PLTA Pakkat lebih rendah dibandingkan dengan pembangkit-pembangkit lain yang berbahan bakar minyak, karena proyek ini merupakan proyek renewable energy.

Komitmen Pembiayaan oleh Perseroan Berdasarkan Jenis Pembiayaan



Komitmen pembiayaan di tahun 2010 ini lebih banyak diserap oleh pembiayaan modal kerja yaitu sebesar 77% dibandingkan dengan komitmen pembiayaan investasi sebesar 23%. Pembiayaan modal kerja relatif lebih cepat terserap karena proyek yang dibiayai telah siap untuk dikerjakan bahkan sebagian telah dikerjakan sebelum diperoleh fasilitas pembiayaan. Sedangkan pembiayaan investasi (project financing) memerlukan proses yang lebih panjang karena tahapan di dalam project finance lebih banyak terutama mengenai kesiapan dokumen-dokumen perijinan terkait dengan proyek yang akan dibiayai serta proses analisa/ due diligence terhadap kelayakan dan eligibility suatu proyek. Penarikan fasilitas pembiayaan investasi ini tidak dilakukan sekaligus tetapi berdasarkan progress pekerjaan yang riil yang telah dilakukan oleh debitur.

East Kalimantan area had a large quantity of coal which made it easier to obtain fuel sources for the generators and hence lessens the material handling costs. With this new power plant in place, PLN power supply to its customers would be more stable and no more scheduled blackouts expected to reoccur.

Whereas the Hydro Power Plant Project in Pakkat Subdistrict, Hasundutan Humbang Regency, North Sumatra was the Company's contribution to the electricity demand in North Sumatra. The project also contributed to the Government (PLN) in lowering the cost of electricity production in the region. The electricity production costs for this Pakkat Hydro Power Plant was lower than other power plants which were using oil, because this project is a renewable energy project.

Financing Commitments Based on Financing Type

The financing commitments in 2010 were mostly absorbed by working capital financing, which was 77% compared to investment financing commitments, which was 23%. The working capital financing was relatively quick to be absorbed by the projects because the projects were ready and had been partially underway before obtaining financing facilities. Whilst, the investment financing (project financing) requires a longer process due to more stages in the project finance, particularly on the availability of documents for licenses related to the projects to be funded as well as analysis process/due diligence on the feasibility and eligibility of the projects. The investment facilities were not withdrawn at once, but based on real works progress done by debtors.

Pembahasan Manajemen

Penyaluran pembiayaan infrastruktur memerlukan waktu yang panjang dalam proses realisasinya. Negosiasi, proses internal rating, penyiapan fasilitas, sampai dengan pemenuhan persyaratan penyaluran, merupakan tahapan-tahapan yang harus dilalui sehingga dapat menyebabkan proses ini melewati batas waktu anggaran tahun berjalan.

Untuk pembiayaan investasi (project financing), seringkali dokumen yang terkait dengan perijinan proyek belum siap sehingga fasilitas pembiayaan tidak dapat diproses lebih lanjut. Setelah melakukan financial closing pun masih ada beberapa yang belum dapat menarik pinjamannya akibat persyaratan-persyaratan penarikan yang belum dapat dipenuhi antara lain porsi self financing (equity yang harus disediakan oleh debitur), telah terpenuhinya progress pekerjaan proyek underlying kontrak/ proyek yang dibiayai dan lain-lain.

Terdapat beberapa hal yang dapat menyebabkan mundurnya realisasi penarikan fasilitas dari yang telah direncanakan, antara lain sebagai berikut:

a. Pembiayaan Modal kerja

1. Proses penarikan dana pinjaman dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan realisasi proyek, tidak bisa sekaligus untuk menghindari penyalahgunaan dana untuk tujuan di luar kontrak yang disepakati
2. Kesiapan underlying proyek yang dibiayai

b. Pembiayaan Investasi

1. Proses penarikan dana pinjaman dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan realisasi proyek, tidak bisa sekaligus untuk menghindari penyalahgunaan dana untuk tujuan di luar kontrak yang disepakati
2. Porsi equity yang belum dapat dipenuhi

Untuk mengantisipasi kendala-kendala dalam pelaksanaan pembiayaan modal kerja, Perseroan berupaya untuk lebih intensif lagi menjalin komunikasi dengan debitur untuk memastikan bahwa plafond yang diberikan akan digunakan secara maksimal. Untuk mengantisipasi permasalahan di dalam pembiayaan investasi, Perseroan mengupayakan monitoring yang ketat dan meminta debitur untuk menyelesaikan proyek sesuai dengan tahapan yang telah diusulkan.

It took a long process to implement the infrastructure financing distribution. Negotiation, internal rating processes, facility setting, fulfilling the drawdown requirements were the required stages that might cause this process passing the ongoing budget deadline.

In the investment financing (project financing), it was often that the documents related to project lisences were not ready on time, consequently, the financing facilities could not be processed further. Even after financial closing stage, there were several debtors could not withdraw the loan. This is due to they still could not fullfil the drawdown requirements, such as their self financing portion (equity which had to be provided by debtors), fullfilment of underlying project work progress to be financed, etc.

There were several issues which could cause delay on facility drawdown realization, among others:

a. Working Capital Financing

1. The loan was withdrawn in stages according to the project realization needs. It could not be done at once to avoid misuse of funds for other purposes not included in the agreed contract.
2. the readiness of underlying projects to be financed

b. Investment Financing

1. The loan was withdrawn in stages according to the project realization needs. It could not be done at once to avoid misuse of funds for other purposes not included in the agreed contract.
2. The equity portion which had not been fulfilled

In anticipating obstacles in the working capital financing, PT SMI sought to establish more intensive communications with the debtors to ensure that the credit limit given would be used in maximum. In anticipating problems in the investment financing, PT SMI had conducted strict monitoring efforts and required debtors to complete the project according to the stages proposed.

Management Discussion

Penyebaran Lokasi Proyek

Pembiayaan yang diberikan oleh Perseroan kepada Debitur telah merambah berbagai daerah di Indonesia mulai dari proyek di Kabupaten Humbang Hasundutan Sumatera Utara sampai dengan proyek di Kabupaten Sorong Papua. Berikut ini distribusi lokasi proyek-proyek yang memperoleh fasilitas pembiayaan dari Perseroan:



III. PENGEMBANGAN KERJASAMA

Sebagai pelaksanaan kegiatan usaha seperti yang tercantum di dalam Anggaran Dasar, Perseroan telah menjalankan berbagai kegiatan guna membangun kemitraan dan kerjasama dengan berbagai pihak. Beberapa kerjasama telah terwujud dalam bentuk kesepakatan yang telah ditandatangani bersama oleh Perseroan dan institusi-institusi tersebut, beberapa yang lain masih dalam proses pembicaraan maupun penjajakan. Kerjasama-kerjasama tersebut adalah sebagai berikut:

Project Location

The financing provided by PT SMI for Debtors had been distributed throughout Indonesia, starting from the project in Humbang Hasundutan Regency in North Sumatra to the project in Sorong Regency in Papua. The following was the project location receiving financing facilities from PT SMI:

III. PARTNERSHIP & COOPERATION

As the implementation of business activities stated in Articles of Association, PT SMI had been conducting various activities to build partnerships and cooperation with various parties. Some of them had been realized through agreements signed by both PT SMI and the institution while other cooperations were still in process of discussion and assessment. The cooperation agreements were as follow:

Pembahasan Manajemen

- Project Development Fund/ Facility (“PDF”)

PDF adalah fasilitas yang disediakan untuk mendukung pengembangan proyek-proyek KPS sehingga proyek dimaksud menjadi credible dan bankable untuk ditawarkan ke sektor swasta. Tujuan utama PDF adalah untuk mempercepat transaksi proyek KPS. Bentuk PDF berupa bantuan dana kepada penanggung jawab KPS (Menteri/ Kepala Lembaga/ Kepala Daerah/ BUMN/ BUMD) untuk menyiapkan proyek KPS dan melaksanakan pelelangan serta negosiasi dengan investor. PDF memberikan bantuan dana untuk mengadakan konsultan bagi Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) dalam tahap studi kelayakan, proses tender, dan negosiasi.

Berikut ini adalah beberapa kegiatan PDF yang melibatkan Perseroan:

- i) Perseroan bersama-sama dengan ADB, Bappenas dan BKF/ Departemen Keuangan membahas mengenai rencana ke depan pelaksanaan fungsi PDF/ Infrastructure Reform Sector Development Program (“IRSDP”) yang menggunakan dana pinjaman dari ADB bagi penyiapan proyek-proyek infrastruktur di Indonesia.
- ii) Perseroan terlibat dalam pembahasan pelaksanaan PDF yang akan dibiayai oleh Japan International Cooperation Agency (JICA) dan Japan Ministry of Economy, Trade and Industry (METI) yang bekerjasama dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.
- iii) Pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal

Perseroan berkoordinasi secara intensif dengan instansi Pemerintah terkait yaitu Badan Kebijakan Fiskal, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Direktorat Jenderal Anggaran dan Biro Hukum Kementerian Keuangan membahas rencana pelaksanaan peran Perseroan dalam penyiapan proyek KPS, sebagai tindak lanjut dari ditandatanganinya Nota Kesepahaman tersebut. Perseroan juga bertemu dengan instansi lain terkait guna memperoleh

- Project Development Fund/ Facility (“PDF”)

PDF is a facility provided to support PPP project development so that these projects become credible and bankable to be offered to the private sector. PDF main purpose is to accelerate PPP project transactions. PDF is a form of funding assistance to the Government Contracting Agencies (Minister/ Chairman of an Institution/ Head of Regional/ State-Owned Companies) to prepare, to implement the bid and to negotiate with investors of PPP projects. PDF provides funding assistance to the Government Contracting Agencies to procure consultants for feasibility study, tender process and negotiation.

The following are some of PDF activities involving the Company:

- i) PT SMI, together with ADB, Bappenas and BKF/ Ministry of Finance had been discussing plans for future implementation of PDF/Infrastructure Reform Sector Development Program (“IRSDP”) functions that would utilize loans from ADB to prepare infrastructure projects in Indonesia.
- ii) PT SMI had been engaged in the discussion of PDF implementation which would be financed by Japan International Cooperation Agency (JICA) and Japan Ministry of Economy, Trade and Industry (METI) in cooperation with Coordinating Ministry for Economic Affairs.
- iii) Implementation of Memorandum of Understanding (“MoU”) between Minister of Finance, Minister for National Development Planning/Head of National Development Planning Agency and Head of Investment Coordinating Board.

PT SMI had coordinated intensively with related government agencies, namely Fiscal Policy Office, Directorate General of State Assets, Directorate General of Budget and Bureau of Justice, Ministry of Finance to discuss the implementation plan of the Company’s role in PPP projects preparation, as a follow up to the MoU signing. PT SMI had also met other relevant institutions in order to obtain inputs related to the facility implementation. To date, PT SMI

Management Discussion

masukan-masukan terkait dengan pelaksanaan fasilitas ini. Sampai saat ini, Perseroan masih secara aktif dan intensif mengkaji peran baru Perseroan tersebut.

- **Japan Bank for International Corporation (“JBIC”)**
Perseroan dan JBIC sepakat untuk mempererat hubungan kerjasama kedua belah pihak dengan menandatangani Nota Kesepahaman pada tanggal 3 Agustus 2010. Tujuan dari Nota Kesepahaman ini adalah membentuk Fund yang akan mendanai proyek-proyek ramah lingkungan. Kedua pihak akan berkoordinasi dalam membentuk kerangka pembiayaan ini. Guna memfasilitasi pembentukan Fund ini, Perseroan bersama JBIC melaksanakan capacity building.
- **Islamic Development Bank (“IDB”)**
Perseroan menjajaki kemungkinan kerjasama pembentukan Joint Venture (JV) untuk pembiayaan infrastruktur dalam skema syariah dengan IDB dan Bank Muamalat serta Bank-bank syariah lokal lainnya. Skema-skema pembentukan JV ini telah dikemukakan dalam pertemuan-pertemuan antara Perseroan dan IDB. Selanjutnya Perseroan akan mengkaji lebih jauh lagi guna menyatakan kerjasama ini sebagai pelaksanaan peran Perseroan dan sebagai alternatif bentuk dukungan terhadap pembangunan infrastuktur di Indonesia.

has actively and intensively been examining its new role.

- **Japan Bank for International Corporation (“JBIC”)**
PT SMI and JBIC have agreed to strengthen the cooperative relationships among both parties by signing a Memorandum of Understanding on August 3, 2010. The purpose of this MoU was to establish a Fund that would finance environmental-friendly projects. Both parties would coordinate to form the financing framework. In order to facilitate the establishment of this Fund, PT SMI and JBIC were implementing capacity buildings.
- **Islamic Development Bank (“IDB”)**
PT SMI was exploring the possibility of forming a Joint Venture (JV) for infrastructure financing by the sharia scheme with IDB, Bank Muamalat and other local sharia banks. The JV establishment schemes had been proposed in the meetings between PT SMI and IDB. PT SMI would review further in order to declare this cooperation as the implementation of the Company's role and as an alternative support for infrastructure development in Indonesia.



Pembahasan Manajemen

- Islamic Corporation for the Development of the Private Sector ("ICD")

Perseroan dan ICD sepakat untuk bekerja sama membentuk Indonesia Islamic Infrastructure Company/Fund (I3C). I3C ini nantinya akan menjadi alternatif sumber pembiayaan pembangunan infrastruktur dari sektor swasta dan menggunakan pola pembiayaan syariah. Rencana ini di awali dengan penandatanganan Nota Kesepahaman oleh Perseroan dan ICD. Sektor infrastruktur yang akan menjadi prioritas adalah ketenagalistrikan, telekomunikasi, jalan tol, rel kereta api, pelabuhan, pelabuhan udara dan infrastruktur pertambangan. Selanjutnya kedua belah pihak sepakat untuk melakukan kajian-kajian atas rencana tersebut.
- Frontier Markets Fund Managers ("FMFM")/ Guarant Co.

Perseroan dan FMFM/Guarant Co sepakat untuk terlibat dalam diskusi mengenai sejumlah proyek yang telah disepakati yang memerlukan pembiayaan dan penjaminan. Kedua belah pihak sepakat untuk berbagi info terkait dengan proyek-proyek potensial dan sepakat untuk menjamin kerahasiaannya. Kesepakatan ini tertuang di dalam Perjanjian Kerahasiaan yang ditandatangi pada tanggal 28 Juni 2010.
- Environmental Cooperation-Asia Clean Development and Climate Program ("ECO-ASIA CDCP")

Perseroan telah menandatangani nota kesepahaman dengan ECO-Asia CDCP untuk bekerja sama dalam proyek-proyek clean energy. Perseroan akan memperoleh dukungan dalam pelatihan dan technical assistance terkait dengan promosi proyek-proyek clean energy serta memperoleh informasi mengenai proyek-proyek yang telah memperoleh dukungan ECO-Asia CDCP dan telah menunjukkan technical and financial viability. Selain itu, ECO-Asia CDCP juga akan memfasilitasi eksekusi-eksekusi financial close terhadap proyek-proyek clean energy. Selanjutnya kedua belah pihak bersama-sama mengembangkan dan mengimplementasikan joint action plan yang telah disepakati.
- Islamic Corporation for the Development of the Private Sector ("ICD")

PT SMI and ICD have agreed to work together to form Indonesia Islamic Infrastructure Corporate/ Fund (I3C). I3C would become an alternative financing source for infrastructure development from the private sector and would implement sharia financing scheme. This plan was initiated with the signing of a Memorandum of Understanding by PT SMI and ICD. The infrastructure sectors which would become priorities were electricity, telecommunications, toll roads, railroads, ports, airports and mining infrastructure. Both parties has agreed to conduct further studies on the plan.
- Frontier Markets Fund Managers ("FMFM")/Guarant Co.

PT SMI and FMFM/Guarant Co. have agreed to engage in discussions regarding a number of agreed projects which requires financing and guarantee. Both parties have agreed to share information related to potential projects and to ensure the projects' confidentiality. This was set forth in the Confidentiality Agreement signed on June 28, 2010.
- Environmental Cooperation-Asia Clean Development and Climate Program ("ECO-ASIA CDCP")

PT SMI has signed a Memorandum of Understanding with ECO-Asia CDCP to cooperate in clean energy projects. PT SMI would receive supports in the Training and Technical Assistance related to the promotion of clean energy projects and information about several projects which had been supported by ECO-Asia CDCP and had demonstrated technical and financial viability. In addition, ECO-Asia CDCP would facilitate executions for financial closing of clean energy projects as well. Furthermore, both parties would develop and implement an agreed joint action plan.

Management Discussion

IV. ANAK PERUSAHAAN PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE (IIF)

IIF adalah anak perusahaan Perseroan yang dibentuk bersama-sama dengan lembaga multilateral ADB, IFC, dan DEG, yang akan dikelola secara profesional oleh swasta. IIF diharapkan dapat menarik para investor lainnya untuk melakukan investasi langsung maupun tidak langsung di IIF sehingga dapat meningkatkan kapasitas pembiayaan infrastruktur di Indonesia.

IIF didirikan pada tanggal 15 Januari 2010 dan telah memperoleh Ijin Usaha sebagai Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pada tanggal 6 Agustus 2010 sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 439/KM.10/2010 tentang Pemberian Izin Usaha Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur kepada PT Indonesia Infrastructure Finance.

Pendirian IIF ini merupakan rencana dan program Pemerintah sebagai salah satu dukungan Pemerintah terhadap keterlibatan swasta di dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia.

Bentuk komitmen Pemerintah melalui Perseroan terhadap pembentukan IIF ini adalah dengan investasi sebesar Rp600 miliar dalam bentuk penyertaan atau kepemilikan awal Perseroan di IIF sebesar 40,3% atau sebesar Rp40,3 miliar dan dalam bentuk Convertible Subordinated Loan sebesar Rp559,7 miliar.

Modal disetor awal IIF adalah sebesar Rp100 miliar yang akan meningkat sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan perusahaan.

Berikut adalah komposisi modal disetor IIF berikut komitmen dari para pemegang saham.

III. SUBSIDIARY COMPANY PT INDONESIA INFRASTRUCTURE FINANCE (IIF)

IIF is PT SMI's subsidiary company which was established together with multilateral institutions of ADB, IFC and DEG and will be managed professionally by the private sector. IIF is expected to attract other investors to invest either directly or indirectly in IIF so that it will increase infrastructure financing capacity in Indonesia.

IIF was established on 15 January 2010 and obtained a business license as an Infrastructure Financing Company on 6 August 2010 according to Minister of Finance Decree No. 439/KM.10/2010 concerning Issuance of License for Infrastructure Financing Company to PT Indonesia Infrastructure Finance.

The establishment of IIF was the Government's plan and program as the form of Government's supports for the private involvement in infrastructure development in Indonesia.

As its commitment through PT SMI to the establishment of IIF, the Government had invested IDR 600 billion in the form of initial Company's shares in IIF for 40.3% or IDR 40.3 billion and in the form of Convertible Subordinated Loan for IDR 559.7 billion.

IIF initial paid up capital was IDR 100 billion, which would increase according to the needs and development of the company.

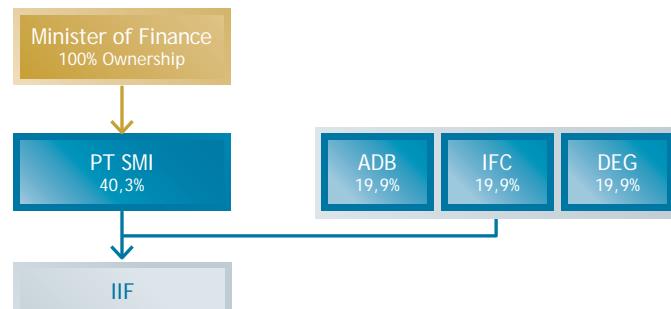
The following is the IIF paid up capital composition and the commitment from the shareholders.

Investor	Jumlah Modal Disetor Initial Paid Up Capital (IDR)	% Kepemilikan Shares	Komitmen Maksimum Commitment Max (ekuivalen IDR)
PT SMI	40.300.000.000	40,3%	600.000.000.000
IFC	19.900.000.000	19,9%	400.000.000.000
ADB	19.900.000.000	19,9%	400.000.000.000
DEG	19.900.000.000	19,9%	200.000.000.000
Total	100.000.000.000	100%	1.600.000.000.000

Pembahasan Manajemen

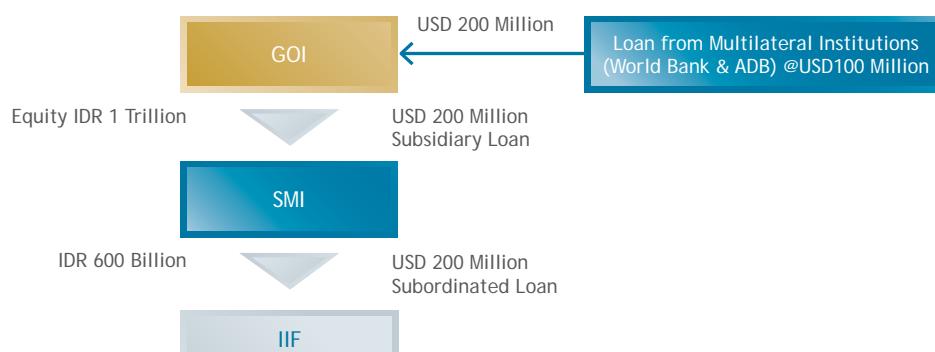
Struktur kepemilikan IIF adalah sebagai berikut

The Structure of IIF Ownership is as the following



Selain dukungan penyertaan modal yang diperoleh dari lembaga multilateral tersebut, ADB dan World Bank juga memberikan dukungan berupa pinjaman jangka panjang kepada Pemerintah untuk diteruspinjamkan kembali kepada IIF melalui Perseroan sebagai Subordinated Loan masing-masing sebesar USD100 juta atau ekuivalen dengan Rp1 triliun. Berikut adalah skema Pinjaman dari kedua lembaga multilateral tersebut:

In addition to capital investment support from the multilateral institutions, ADB and World Bank had also provided supports in the form of long-term loans to the Government which then be channelling to IIF through PT SMI as a Subordinated Loan; each of them of USD100 million or equivalent to IDR 1 trillion. Below is the loan scheme from the two multilateral institutions:



Sebagai lembaga keuangan non bank, IIF akan beroperasi sebagai perusahaan pembiayaan infrastruktur swasta murni dan berorientasi komersial.

As a non-bank financial institution, IIF will operate as a purely private infrastructure financing company and would be commercially oriented.

Dalam melakukan kegiatan usahanya, IIF akan bersinergi dengan Perseroan antara lain dengan bersama-sama melakukan co-financing atas proyek infrastruktur dan/ atau membantu percepatan pembangunan infrastruktur melalui advisory services, melaksanakan kegiatan sosialisasi terkait pembangunan dan pengembangan infrastruktur (seperti investor forum dan infrastructure forum) dan kegiatan menarik partisipasi swasta untuk terlibat dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia.

In conducting its business, IIF will synergize with PT SMI by co-financing infrastructure projects and/or accelerating infrastructure development through advisory services (which includes preparation of project feasibility studies, financing solutions and others), giving advice to the Government on field issues found (such as incentives for investors, fiscal policy support, necessary adjustments in regulations/laws) and carrying out dissemination activities related to infrastructure development (such as Investor Forum and the Infrastructure Forum) and attracting private sector to participate in infrastructure development in Indonesia.

Management Discussion

V. TINJAUAN KEUANGAN

Laba Perseroan

Dalam Jutaan Rupiah

	Financial Data	2010	2009	In IDR Million Growth
1	Revenues	82.114	72.820	12,76%
2	Operating Expense	31.822	18.470	72,29%
3	Operating Profit	50.292	54.350	(7,47%)
4	Other Incomes-Net	877	49	1.689,80%
5	Profit (Loss) of Associated Companies	(6.234)	0	-
6	Profit Before Income Tax	44.935	54.399	(17,40%)
7	Deferred Tax	(3.832)	3.437	(311,49%)
8	Net Profit	41.103	57.836	(28,93%)

Di awal tahun kedua operasionalnya (2010), pada bulan Januari 2010, Perseroan telah merealisasikan investasi Pemerintah sebesar Rp600 miliar melalui Perseroan dengan membentuk anak perusahaan (IIF) bersama-sama dengan ADB, IFC, dan DEG dalam bentuk penyertaan modal sebesar 40,3% (Rp40,3 miliar) dan sisanya sebesar Rp559,7 miliar sebagai Convertible Subordinated Loan. Investasi pada IIF tersebut secara umum telah mempengaruhi perolehan laba Perseroan pada tahun 2010 dibandingkan periode tahun sebelumnya yang merupakan tahun awal pendirian Perseroan.

Selain itu terdapat faktor-faktor lain di luar kendali Perseroan yang juga cukup material mempengaruhi perolehan laba bersih perseroan tahun 2010 sebesar Rp41.103 juta atau 71,07% dibandingkan periode tahun sebelumnya, yaitu pembebanan kerugian anak perusahaan sebesar Rp6.234 juta dan dampak perhitungan pajak tangguhan. Pada tahun 2009 Perseroan mengalami rugi fiskal sehingga menikmati Manfaat Pajak Tangguhan sebesar Rp3.437 juta yang menambah Laba Bersih Perseroan tahun 2009.

1. Pendapatan Usaha

Dalam Jutaan Rupiah

	Revenues	2010	2009	In IDR Million Growth
1	Financing Income	40.689	890	4.473,55%
2	Investment Income	41.425	71.930	(42,41%)
Jumlah Pendapatan Usaha Total Revenue		82.114	72.820	12,76%

Dari sisi pendapatan, realisasi pendapatan usaha di tahun 2010 sebesar Rp82.114 juta atau meningkat sebesar 12,76% dibandingkan periode tahun sebelumnya.

V. FINANCIAL OUTLOOK

Company Profit

In the beginning of the second year of its operations (2010), in January 2010, PT SMI had realized a Government investment of IDR 600 billion through PT SMI by establishing a subsidiary company (IIF), together with ADB, IFC and DEG in the form of a 40.3% capital investment (IDR 40.3 billion) and the remaining of IDR 559.7 billion as a convertible subordinated loan. This investment in IIF had generally affected the Company's profits for 2010 compared to that of the previous year period which was the initial year of the Company's establishment.

In addition, there were other factors beyond the Company's control which also had a sufficient material affecting the Company's net profit in 2010 which amounted to IDR 41,103 million or 71.07% over the previous year, which the imposition of losses of the subsidiary company amounting to IDR 6,234 million and the impact on calculation for deferred tax. In 2009, PT SMI suffered a fiscal loss, therefore, it enjoyed Deferred Tax Benefits amounting to IDR 3,437 million which increased the 2009 Net Profit.

1. Revenue

In terms of revenues, the actual revenues in 2010 amounted to IDR 82,114 million or an increase of 12.76% compared to the previous year.

Pembahasan Manajemen



Dalam tahun 2010 terjadi perubahan komposisi pendapatan usaha yang tercermin dari peningkatan pendapatan pembiayaan sebesar 4.473,55% dari pendapatan pembiayaan tahun 2009 sedangkan pendapatan pengelolaan dana di tahun 2010 sebesar 57,59% dari tahun 2009. Hal ini merefleksikan bahwa pada tahun kedua operasionalnya Perseroan sudah lebih berkonsentrasi pada bisnis intinya di bidang pembiayaan infrastruktur.

2. Beban Usaha

In 2010, there was a change in the composition of operating revenues reflected by the increase in the financing income which amounted to 4,473.55% of the financing income in 2009, while investment income in 2010 was 57.59% from the year 2009. This reflects that in the second operational year, PT SMI had concentrated on its core business, which was infrastructure financing field.

2. Operating Expenses

Dalam Jutaan Rupiah

Operating Expenses		2010	2009	In IDR Million Pertumbuhan
1	Interest Expense	0	0	-
2	Business Development Expenses	6.209	3.667	69,32%
3	General and Administrative Expenses	23.215	14.080	64,88%
4	Other Expenses	652	723	(9,82%)
5	Impairment Loss Financial Instrument	1.746	0	-
Total Operating Expenses		31.822	18.470	72,29%
Profit (Loss) of Associated Corporate		6.234	0	-

Di sisi beban, realisasi beban usaha meningkat 72,29% dari Rp18.470 juta di tahun 2009 menjadi Rp31.822 juta di tahun 2010. Hal tersebut sejalan dengan berkembangnya kegiatan bisnis dan operasional Perseroan.

On the expense side, the actual operating expenses increased by 72.29% from IDR 18,470 million in 2009 to IDR 31,822 million in 2010. This was consistent with the business activities development and the Company operations.

Management Discussion

Selain itu Perseroan mencatat Bagian Rugi anak perusahaan - IIF sebesar Rp6.234 juta, jumlah tersebut sebesar porsi kepemilikan Perseroan yaitu 40,3%.

In addition, PT SMI recorded a Loss from subsidiary company - IIF at IDR 6,234 million, the amount was as the ownership portion of the Company which was 40.3%.

Aset

Dalam Jutaan Rupiah

	Assets	2010	2009	In IDR Million Growth
1	Current Assets	1.409.973	1.058.244	33,24%
2	Non current Assets	710.895	5.436	12.977,54%
	Total Assets	2.120.868	1.063.680	99,39%

Jumlah aset Perseroan tahun 2010 sebesar Rp2.120.868 juta, mengalami peningkatan sebesar 99,39% dari Rp1.063.680 juta di tahun 2009. Peningkatan tersebut bersumber dari dana hasil penambahan setoran modal pemerintah (Penyertaan Modal Negara) senilai Rp1.000.000 juta yang diterima pada tanggal 31 Desember 2010.

Aset Lancar mengalami kenaikan sebesar 33,24% menjadi Rp1.409.973 juta di tahun 2010. Kenaikan tersebut terutama disebabkan peningkatan kas dan setara kas sebesar 19,66%, berupa penempatan dana dalam Deposito Berjangka yang sebagian besar bersumber dari penambahan setoran modal pemerintah (Penyertaan Modal Negara) yang baru diterima pada 31 Desember 2010. Selain itu juga berasal dari Surat Berharga yang meningkat sebesar 276,71% menjadi Rp188.913 juta, dan Aset Lancar Lainnya yang meningkat sebesar 363,82% menjadi Rp19.485 juta.

Aset tidak lancar mengalami kenaikan yang signifikan dari Rp5.436 juta di tahun 2009 menjadi Rp710.895 juta di tahun 2010. Kenaikan tersebut terutama disebabkan meningkatnya kegiatan usaha Perseroan melalui investasi di anak perusahaan, IIF, dalam bentuk Convertible Subordinate Loan sebesar Rp559.700 juta dan penyertaan dengan nilai tercatat sebesar Rp34.066 juta (nilai perolehan sebesar Rp40.300 juta), serta realisasi pemberian pinjaman jangka panjang sebesar Rp112.510 juta.

Aset tetap Perseroan mengalami peningkatan sebesar 70,72% menjadi Rp3.358 juta berupa penambahan peralatan, perabot, partisi kantor, dan perangkat lunak akuntansi.

Assets

The Company's total assets in 2010 are amounted to IDR 2,120,868 million, an increase of 99.39% from IDR 1,063,680 million in 2009. The increase was due to the Government capital injection fund (State Equity Participation) worth of IDR 1,000,000 million received on 31 December 2010.

The current assets increased by 33.24% to IDR 1,409,973 million in 2010. The increase was primarily due to the increase in cash and cash equivalents which is amounted to 19.66%, in the form of Time Deposit, which most of them was from the Government capital injection (State Equity Participation) received on 31 December 2010. It also came from the Securities increased by 276.71% to IDR 188,913 million, and Other Current Assets, which increased by 363.82% to IDR 19,485 million.

The non-current assets increased significantly from IDR 5,436 million in 2009 to IDR 710,895 million in 2010. The increase was primarily due to the increase of the Company business activities through its investment in its subsidiary, IIF, in the form of Convertible Subordinated Loans (CSL) which was of IDR 559,700 million and an investment with a carrying value of IDR 34,066 million (the acquisition value was IDR 40,300 million), and the realization of long term loans amounted to IDR 112,510million.

The Company's fixed assets increased by 70.72% to IDR 3,358 million in the form of additional equipment, furniture, office partitions, and accounting software.

Pembahasan Manajemen

Kewajiban dan Ekuitas

Dalam Jutaan Rupiah

Liabilities and Equity		2010	2009	In IDR Million Growth
1	Current Liabilities	21.319	5.370	297,00%
2	Non Current Liabilities	1.188	326	264,42%
Total Liabilities		22.507	5.696	295,14%
3	Equity	2.098.361	1.057.984	98,34%
Total Liabilities and Equity		2.120.868	1.063.680	99,39%

Jumlah kewajiban Perseroan tahun 2010 sebesar Rp22.507 juta, mengalami peningkatan sebesar 295,14% dari Rp5.696 juta di tahun 2009.

Kewajiban Lancar tahun 2010 mengalami peningkatan sebesar 297% menjadi Rp21.319 juta, khususnya hutang lain-lain sebesar Rp16.494 juta.

Kewajiban Tidak Lancar tahun 2010 berupa kewajiban imbalan pasca kerja yang mengalami peningkatan sebesar 264,42% menjadi Rp1.188 juta di tahun 2010 dari Rp326 juta di tahun 2009, yang merupakan penambahan pembentukan kewajiban estimasi imbalan pasca kerja sesuai PSAK No. 24 (revisi 2004) Imbalan Kerja dan Undang-undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Ekuitas mengalami peningkatan sebesar 98,34% menjadi Rp2.098.361 juta di tahun 2010 dari Rp1.057.984 juta di tahun 2009. Peningkatan ekuitas tersebut terutama dari penambahan setoran modal pemerintah (Penyertaan Modal Negara) senilai Rp1.000.000 juta yang diterima pada 31 Desember 2010. Selain itu peningkatan ekuitas juga seiring dengan perolehan laba bersih Perseroan di tahun 2010 sebesar Rp41.103 juta, pemupukan cadangan umum sebesar Rp5.784 juta dan laba ditahan sebesar Rp51.474 juta.

Liabilities and Equity

The Company's total liabilities in 2010 is amounted to IDR 22,507 million, an increase of 295.14% from IDR 5,696 million in 2009.

The current liabilities in 2010 increased by 297% to IDR 21,319 million, especially other payables amounting to IDR 16,494 million.

The Non-Current Liabilities in 2010 were in the form of post-employment benefit liability which increased by 264.42% to IDR 1,188 million in 2010 from IDR 326 million in 2009, which represents an increase in the form of estimated post-employment benefit liability in accordance with PSAK No. 24 (revised 2004) on Employee Benefits and Law No.13 of 2003 on Manpower.

The equity increased by 98.34% to IDR 2,098,361 million in 2010 from IDR 1,057,984 million in 2009. The increase in equity was mainly due to the Government capital injection (State Equity Participation) worth IDR 1,000,000 million received on 31 December 2010. In addition, the equity increase was in line with the Company's net profit in 2010 amounted to IDR 41,103 million, the building-up of general reserves amounting to IDR 5,784 million and the retained earnings amounting to IDR 51,474 million.

Management Discussion

Arus Kas

Dalam Jutaan Rupiah

	2010	2009	In IDR Million
Net Cash from (Used in) Operating Activities	(81.623)	935	
Net Cash Used in Investment Activities	(730.852)	(50.148)	
Net Cash from Investment Activities	999.421	1.000.000	
Net Increase in Cash and Cash Equivalents	186.946	950.787	

Pada tanggal 31 Desember 2010, Kas dan Setara Kas tercatat sebesar Rp1.137.734 juta, meningkat sebesar 19,66% dibandingkan posisi pada 31 Desember 2009 yang mencapai Rp950.787 juta.

1. Aktivitas Operasional

Posisi arus kas bersih yang berasal dari aktivitas operasi mengalami penurunan dari arus kas positif sebesar Rp935 juta pada tahun 2009 menjadi negatif Rp81.623 juta pada tahun 2010.

Penurunan tersebut terutama disebabkan dalam tahun 2010 penggunaan arus kas operasional untuk penyaluran pinjaman/pembiayaan meningkat sebesar 1.074,04% dibanding tahun sebelumnya, yaitu sebesar Rp206.226 juta ditahun 2010.

Disisi perolehan arus kas dari aktivitas operasi yang berasal dari bunga dan provisi pembiayaan serta penerimaan hasil investasi juga meningkat sebesar 815,30% menjadi Rp169.789 juta di tahun 2010 dari Rp18.550 juta di tahun 2009.

2. Aktivitas Investasi

Seiring dengan peningkatan kegiatan usaha perseroan, arus kas yang digunakan untuk kegiatan investasi mencapai Rp 730.852 juta pada tahun 2010 dari Rp50.148 juta pada tahun 2009, atau meningkat sebesar 1.357,40%. Besarnya dana investasi tersebut digunakan untuk investasi di anak perusahaan, IIF, sebesar Rp600.000 juta, pembelian surat berharga sebesar Rp138.913 juta dan pembelian aset tetap dan aset tak berwujud sebesar Rp1.879 juta.

Cash Flow

On 31 December 2010, Cash and Cash Equivalents was recorded at IDR 1,137,734 million, an increase of 19.66% compared to the position on 31 December 2009 which was at IDR 950,787 million.

1. Operational Activities

The net cash flow position from operational activities decreased from positive cash flow amounted to IDR 935 million in 2009 to negative cash flow amounted to IDR 81,623 million in 2010.

The decrease was primarily due to the use of operational cash flow for the loan disbursement in 2010 increased by 1,074.04% from the previous year, amounted to IDR 206,226 million in 2010.

The cash flow acquisition side from operational activities derived from interest, and financing provision, and investment revenue, also increased by 815.30% to IDR 169,789 million in 2010 from IDR 18,550 million in 2009.

2. Investing Activities

Along with the increase of the company business activities, the cash flow used for investment reached IDR 730,852 million in 2010 from IDR 50,148 million in 2009, an increase of 1,357.40%. This huge investment funds was used for the investment in the subsidiary, IIF, amounted to IDR 600,000 million, for purchasing marketable securities amounting to IDR 138,913 million, and for purchasing fixed assets and intangible assets amounted to IDR 1,879 million.

Pembahasan Manajemen

Sedangkan perolehan arus kas dari aktivitas investasi berasal dari penerimaan hasil investasi surat berharga sebesar Rp9.940 juta yang meningkat sebesar 480,77% dibandingkan tahun sebelumnya.

3. Aktivitas Pendanaan

Posisi arus kas bersih yang berasal dari aktivitas pendanaan sebesar Rp999.422 juta berasal dari tambahan Setoran Modal Pemerintah sebesar Rp1.000.000 juta, dikurangi penggunaan untuk alokasi Program Bina Lingkungan tahun 2010 sebesar Rp578 juta.

Aspek Keuangan Lain

- Profitabilitas

Tingkat profitabilitas Perseroan pada tahun 2010 tercermin dari Tingkat Pengembalian Modal (Return on Equity), Tingkat Pengembalian Investasi (Return on Investment), dan Tingkat Pengembalian Aset (Return on Asset) masing-masing sebesar 3,74%, 4,14% dan 3,67%. Pencapaian tersebut lebih rendah dibandingkan tahun 2009 masing-masing sebesar 5,47%, 5,14% dan 5,44%, hal tersebut terutama karena sebagian besar dana modal digunakan untuk investasi di anak perusahaan dalam bentuk CSL dan penyertaan, serta adanya pembebanan kerugian anak perusahaan yang sangat mempengaruhi pencapaian target Laba Bersih Perseroan.

- Produktivitas

Tingkat produktivitas Perseroan yang tercermin dari realisasi produktivitas per masing-masing tenaga kerja Perseroan pada tahun 2010 sebesar Rp1.246 juta lebih rendah dibandingkan tahun 2009 sebesar Rp2.224 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh penurunan realisasi laba bersih Perseroan.

- Efisiensi

Tingkat efisiensi Perseroan tercermin melalui realisasi pencapaian efisiensi biaya. Rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional Perseroan tahun 2010 masih rendah, yaitu sebesar 38,75%, dibandingkan tahun 2009 pencapaian tersebut sedikit lebih tinggi yaitu sebesar 25,36%. Hal ini terutama karena peningkatan realisasi Beban Operasional berupa pengeluaran beban-beban terkait penyaluran pembiayaan, dan beban operasional kantor.

Whereas, the cash flow acquisition from investment activities derived from return on investment in the securities amounting to IDR 9,940 million, an increase of 480.77% over the previous year.

3. Financing Activities

The net cash flow position from financing activities is amounted to IDR 999,422 million from the Government capital injection amounted IDR 1,000,000 million, deducted by allocation for Community Development Program in 2010 amounted to IDR 578 million.

Other Financial Aspects

- Profitability

The Company profitability level in 2010 was reflected in the Return on Equity, Return on Investment, and Return on Assets, with each was 3.74%, 4.14% and 3.67% respectively. This achievement is lower than in 2009, each was 5.47%, 5.14% and 5.44% respectively. This was mainly because most of the capital funds were used for investments in the subsidiary and equity in the form of CSL and participation, as well as imposition of losses from the subsidiary which greatly affected the Corporate's Net Profit targets.

- Productivity

The Company productivity level reflected in the productivity realization per employee in 2010 was IDR 1,246 million, which was lower than in 2009 of IDR 2,224 million. This was mainly due to the decrease in the Company's net profit realization.

- Efficiency

The Company efficiency level is reflected through the achievement of cost efficiency. Ratio of Operating Expenses to Operating Income for 2010 was still low, which was at 38.75%, slightly higher than 2009 though, which was at 25.36%. This was mainly due to the realization increase of Operational Expenses on expenditures associated to financing distribution and office operating expenses.

Management Discussion

VI. SOSIALISASI TAHUN 2010

Perseroan telah melaksanakan sejumlah kegiatan sosialisasi kepada para pemangku kepentingan sebagai salah satu wujud pelaksanaan prinsip-prinsip GCG. Kegiatan-kegiatan tersebut bertujuan memberikan informasi yang menyeluruh dan utuh atas keberadaan dan peran Perseroan sehingga Perseroan memperoleh dukungan yang positif.

Fokus kegiatan sosialisasi pada tahun 2010 adalah membuka jalur komunikasi yang intensif dan membangun networking yang lebih luas dengan para pemilik proyek, calon investor dan instansi terkait lainnya guna mendukung peran Perseroan sebagai fasilitator dan katalis dalam mendukung percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Untuk itu, prioritas kegiatan sosialisasi dilaksanakan dalam bentuk partisipasi aktif di berbagai seminar, workshop dan forum-forum diskusi dengan pertimbangan bahwa peserta yang hadir pada forum-forum tersebut merupakan pemangku kepentingan yang terkait langsung dengan Perseroan seperti pemilik proyek, calon investor, konsultan dan instansi terkait dalam bidang infrastruktur.

Seminar-seminar, workshops dan forum-forum diskusi tersebut antara lain :

- Working Group Joint Task Force Meeting (JTF) RI - ROK II di Seoul, Korea Selatan,
- PPP Days 2010 di Manila, Filipina,
- Commonwealth Public Private Partnership (PPP) Symposium di Kuala Lumpur,
- International Investment Conference for PPP di Kuala Lumpur,
- Forum Wartawan Ekonomi dan Moneter (FORKEM) di Anyer, Jawa Barat,
- Business Forum yang diselenggarakan BKF Kementerian Keuangan di Paviliun Indonesia - World Expo Shanghai China (WESC) 2010,
- Private Financing Advisory Network (PFAN) "Indonesia Clean Energy Investor Forum, Business Plan Competition" di Jakarta
- Asian Infrastructure & Property Development Summit di Macau,

VI. 2010 SOCIALIZATION

PT SMI has conducted a series of dissemination activities to stakeholders as a manifestation of the implementation of GCG principles. These activities were expected to give thorough and complete information on the existence and role of PT SMI so that the Company would gain positive support from the stakeholders.

The focus of the dissemination activities in 2010 was to open intensive communication channel and to build a wider network with project owners, prospective investors and other relevant agencies, to support the Company's role as a facilitator and a catalyst in supporting the acceleration of infrastructure development in Indonesia. Hence, the priority of these dissemination activities was to be actively participating in various seminars, workshops and discussion forums with the consideration that the participants of those events were the stakeholders who were directly related to PT SMI, such as project owners, prospective investors, consultants and institutions related to infrastructure.

The seminars, workshops and discussion forums included:

- Working Group Joint Task Force Meeting (JTF) RI - ROK II in Seoul, South Korea,
- PPP Days 2010 in Manila, Philippines,
- Commonwealth Public Private Partnerships (PPP) Symposium in Kuala Lumpur,
- International Investment Conference for PPP in Kuala Lumpur,
- Monetary and Economic Reporters Forum (FORKEM) in Anyer, West Java,
- Business Forum organized by BKF, Ministry of Finance in Indonesian Pavilion at World Expo Shanghai China (WESC) 2010,
- Private Financing Advisory Network (PFAN) "Indonesia Clean Energy Investor Forum, the Business Plan Competition" in Jakarta
- Asian Infrastructure & Property Development Summit in Macau,

Pembahasan Manajemen

- 3rd Annual Global Infrastructure Projects 2010 di Kuala Lumpur,
- Business Forum yang diselenggarakan oleh Kementerian Luar Negeri “Indonesia-Middle East Business Forum” di Palembang dan Bandung,
- IQPC Singapore : The Private Equity Indonesia Summit 2010, Infrastructure Investor: Asia Forum di Singapore,
- The IFN Asia Forum - Global Islamic Finance Forum di Kuala Lumpur,
- 15th Annual Joint Energy Working Group Meeting (JEWG) Indonesia - The Netherlands di Amsterdam,
- Dan lain-lain.

Dalam spektrum target audience yang lebih luas, sosialisasi juga dilaksanakan dalam bentuk partisipasi aktif di pameran dan event khusus guna memberikan kesempatan kepada pemangku kepentingan untuk mendapatkan informasi atas tugas-tugas Perseroan. Perseroan telah mengikuti pameran ITB Fair di Bandung bersama dengan Kementerian Keuangan, Infrastructure Asia 2010 di Jakarta, Jakarta Investment (Jakvest) 2010 di Jakarta, dan Pameran Kawasan Timur Indonesia (KTI EXPO) di Makassar.

Sosialisasi lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan awareness akan Perseroan dilaksanakan melalui wawancara dengan sejumlah media, sponsorship di berbagai event termasuk dukungan untuk program kampus, pemasangan iklan dan melalui situs resmi Perseroan.

- 3rd Annual Global Infrastructure Projects 2010 in Kuala Lumpur,
- Business Forum organized by Ministry of Foreign Affairs “Indonesia-Middle East Business Forum” in Palembang and Bandung,
- IQPC Singapore: The Indonesian Private Equity Summit 2010, Infrastructure Investors: Asia Forum in Singapore,
- The IFN Asia Forum - Global Islamic Finance Forum in Kuala Lumpur,
- 15th Annual Joint Energy Working Group Meeting (JEWG) Indonesia - The Netherlands in Amsterdam,
- And others.

In a wider target audience spectrum, the dissemination was also carried out by actively participating in exhibitions and special events in order to provide stakeholders opportunities to obtain information on the duties of the Corporate. PT SMI had participated in ITB Fair exhibition in Bandung in conjunction with Ministry of Finance, Infrastructure Asia 2010 in Jakarta, the Jakarta Investment (Jakvest) 2010 in Jakarta, and the Eastern Indonesia Exhibition (KTI EXPO) in Makassar.

Other dissemination activities to increase the awareness of PT SMI were carried out through interviews with a number of media, sponsorships in various events including support to campus programs, advertisement and through the Company official website.

Management Discussion



Laporan Tata Kelola Perseroan



Corporate Governance Report

Dalam melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik, Perseroan mendasarkan diri pada prinsip-prinsip keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian, dan kewajaran guna mewujudkan visi, misi dan tata nilai yang dianutnya.

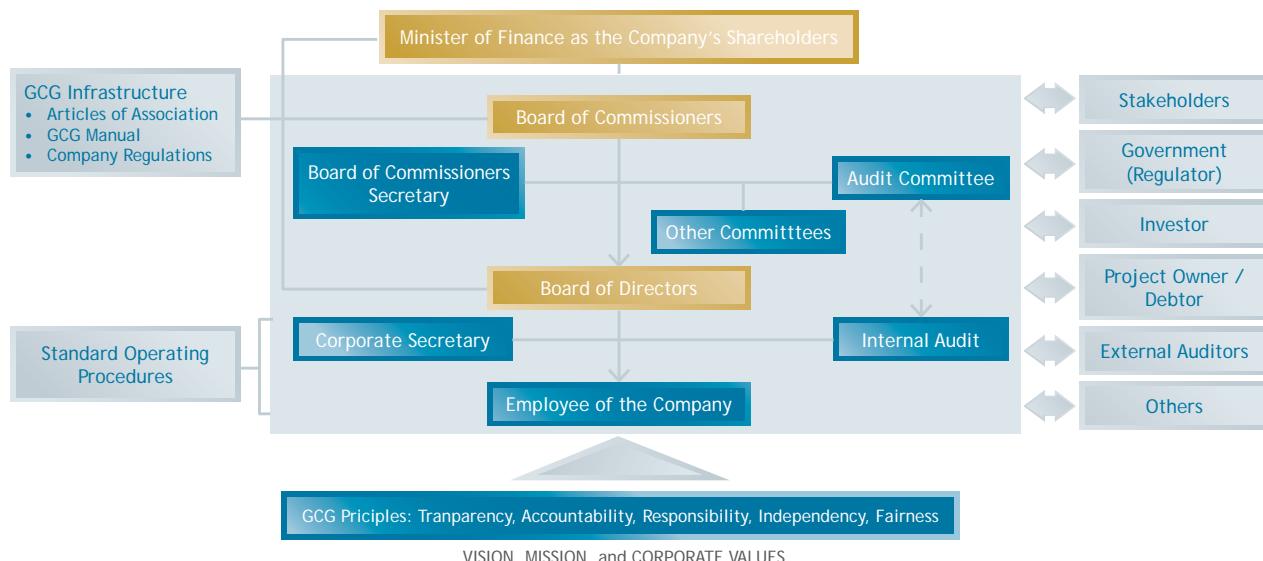
Sepanjang tahun 2010, Perseroan terus melanjutkan pembangunan fondasi tata kelola perusahaan yang baik. Penerapan tata kelola yang baik bukanlah semata-mata pemenuhan terhadap ketentuan formal, melainkan sebuah keharusan substansial sebagai prasyarat Perseroan untuk dapat bertahan dan tumbuh di tengah persaingan usaha dalam rangka menjadi Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur yang handal dan terpercaya.

Sesuai dengan komitmen Manajemen untuk menerapkan tata kelola perusahaan yang baik, maka Perseroan telah melaksanakan sosialisasi GCG sebagai awareness atas pelaksanaan tata kelola bagi jajaran Manajemen dan karyawan Perseroan dan melaksanakan diagnostic assessment atas penerapan GCG Perseroan guna memperoleh masukan tentang kondisi GCG yang ada dan rekomendasi perbaikan tata kelola yang harus dilakukan (area of improvement). Kedua kegiatan tersebut dilaksanakan bekerjasama dengan BPKP.

Selain itu Tim Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan juga telah melakukan supervisi kepada Perseroan guna menilai pelaksanaan tata kelola dan kegiatan Perseroan sesuai dengan tujuan pendirian Perseroan, dengan hasil penilaian "Baik".

ORGAN UTAMA TATA KELOLA PERSEROAN

Struktur tata kelola perseroan dapat dirangkumkan dalam gambar berikut:



In carrying out good corporate governance, PT SMI commits to comply to the principles of transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness in order to realize its vision, mission and corporate values.

Throughout the year 2010, PT SMI had continuously built the foundation for good corporate governance. The implementation of good corporate governance was not merely the complying with regulations, but a substantial necessity as a prerequisite for the Company to survive and to grow in the midst of business competition in order to become a trusted and reliable Infrastructure Financing Company.

In accordance with the management's commitment to implement good corporate governance, PT SMI had conducted GCG dissemination as an awareness on the implementation of governance for the Company's management and employees as well as to perform a diagnostic assessment of the Company's GCG implementation. Both activities were carried out in cooperation with BPKP.

In addition, the Inspectorate General team of Ministry of Finance had also conducted supervision to PT SMI in order to assess whether the governance implementation and the Company's activities are in accordance with the purpose of the Company's establishment, with the results of assessment rated "Good".

THE MAIN ORGANS OF THE CORPORATE GOVERNANCE

The Company's governance structure can be summarized as follows:

Laporan Tata Kelola Perseroan

Sebagaimana bagan di atas, maka struktur tata kelola Perseroan dijalankan oleh 3 organ utama mencakup Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, dan Direksi. Setiap organ memiliki peran dan akuntabilitas dalam memberikan kontribusi terhadap keberhasilan penerapan tata kelola secara efektif terkait dengan pemenuhan kepentingan dari para pemangku kepentingan, yaitu pemerintah, auditor eksternal, pemasok/ penyedia barang dan jasa, debitur/ pemilik proyek, dan pemangku kepentingan lainnya. Dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris dan Direksi dapat membentuk satuan-satuan kerja pendukung dengan tetap menjaga terpenuhinya prinsip profesional semata-mata untuk kepentingan Perseroan.

Direksi bersama Dewan Komisaris telah menetapkan Pedoman Tata Kelola (Good Corporate Governance) Perseroan pada tanggal 15 Juli 2009. Sementara itu, penjabaran terkait dengan hubungan kerja Direksi dengan karyawan telah pula ditetapkan dalam sebuah Peraturan Perusahaan yang disahkan oleh instansi berwenang, yaitu Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta. Ketiga dokumen inilah yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam menetapkan pedoman dan prosedur dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan operasional perusahaan.

RUPS

Menteri Keuangan Republik Indonesia selaku RUPS adalah organ Perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi, khususnya dalam membuat keputusan-keputusan penting terkait dengan investasi Pemerintah pada Perseroan. Keputusan yang diambil dalam RUPS dilakukan berdasarkan kepentingan strategis jangka panjang Perseroan.

Dalam tahun 2010, Perseroan telah melaksanakan RUPS pada tanggal 24 Juni 2010 dengan agenda untuk menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2009.

As illustrated in the diagram above, the Company's governance structure is run by the 3 main organs covering General Meeting of Shareholders (GMS), Board of Commissioners, and Board of Directors. Each organ has a role and accountability in contributing to the successful implementation of effective governance concerning the fulfillment of interests of stakeholders, namely Government, external auditors, suppliers/providers of goods and services, debtors/project owners, and other stakeholders. In performing its functions, duties and responsibilities, the Board of Commissioners and Board of Directors may establish supporting operational units while maintaining professional principles solely for the benefit of the Company.

The Board of Directors together with Board of Commissioners had established GCG Manual on 15 July 2009. Meanwhile, illustration concerning working relationships of Board of Directors with employees had also been established in a Company Regulation ratified by the competent authority, Office of Manpower and Transmigration, Jakarta. These three documents were then used as reference in setting guidelines and procedures for carrying out operational activities of the Company.

GMS

Minister of Finance of Republic of Indonesia as the GMS is an organ of the Company that holds the highest authority, especially in making important decisions related to Government investment in the Company. Decisions taken by the GMS are based on the Company's long-term strategic interests.

In 2010, PT SMI held its GMS on 24 June 2010 with the agenda to approve and ratify the Company's Annual Report for 2009 Fiscal Year.

Corporate Governance Report

Dewan Komisaris dan Direksi

Tanggung jawab bersama antara Dewan Komisaris dan Direksi adalah memelihara kesinambungan usaha Perseroan dalam jangka panjang, tercermin pada :

1. Pelaksanaan kontrol internal dan manajemen risiko dengan baik;
2. Tercapainya imbal hasil (return) yang optimal bagi Pemegang Saham;
3. Terlindunginya kepentingan para Pemangku Kepentingan secara wajar.

Dalam tahun 2010, Dewan Komisaris dan Direksi mengadakan 13 kali Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi untuk mengkaji strategi dan aktivitas Perseroan serta membahas masalah-masalah penting yang memerlukan perhatian terkait tanggung jawab bersama di atas, antara lain :

1. Persiapan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan;
2. Perkembangan Perseroan;
3. Perkembangan Anak Perusahaan PT IIF;
4. Persiapan Penugasan PDF.

Rekap Daftar Kehadiran pada Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:

Jumlah Rapat	13	Daftar Hadir
Dewan Komisaris		
Ngalim Sawega	13	
Langgeng Subur	10	
Wahyu Utomo	12	
Direksi		
Emma Sri Martini	13	
Frans Nembo Sukardi	13	
Farida Astuti	13	

Boards of Commissioners and Board of Directors

Shared responsibility between Boards of Commissioners and Board of Directors is to maintain the business continuity in the long term, as reflected in:

1. Implementation of internal control and good risk management;
2. Optimum return achievement for Shareholders;
3. Fair protection for the interests of stakeholders.

In 2010, Board of Commissioners and Board of Directors held 13 Joint Meetings of Board of Commissioners and Board of Directors to review the Company strategies and activities and to discuss important issues that required attention and were related to the above responsibilities, among others:

1. Preparation of Work Plan and Corporate Budget;
2. Company development;
3. Development of subsidiary, PT IIF;
4. Preparation of PDF Assignment.

Recapitulation of the attendance list in the Joint Meetings of Board of Commissioners and Board of Directors:

Number of Meetings	13	Attendance List
Board of Commissioners		
Ngalim Sawega	13	
Langgeng Subur	10	
Wahyu Utomo	12	
Board of Directors		
Emma Sri Martini	13	
Frans Nembo Sukardi	13	
Farida Astuti	13	

Laporan Tata Kelola Perseroan

Dewan Komisaris

Dewan Komisaris merupakan Dewan yang terdiri dari 3 (tiga) orang, dan setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris. Kedudukan masing-masing anggota Dewan Komisaris termasuk Komisaris Utama adalah setara. Dewan Komisaris memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap pengurusan Perseroan yang dilakukan oleh Direksi, dan memberikan nasehat kepada Direksi serta memastikan bahwa jalannya Perseroan telah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk penerapan prinsip-prinsip GCG.

Susunan Dewan Komisaris terdiri dari :

1. Komisaris Utama : Ngalim Sawega
2. Komisaris : Langgeng Subur
3. Komisaris : Wahyu Utomo

Profil Dewan Komisaris selengkapnya dapat dilihat pada uraian Data Perseroan Laporan Tahunan ini.

Fungsi Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai pengawas dan penasehat Direksi dalam menjalankan Perseroan;
- b. Dapat mengenakan sanksi kepada anggota Direksi dalam bentuk pemberhentian sementara, dalam hal diperlukan untuk kepentingan Perseroan, yang pelaksanaannya harus sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Dapat melaksanakan fungsi sebagai Direksi Perseroan untuk sementara, dalam hal terjadi kekosongan jajaran Direksi Perseroan atau dalam keadaan tertentu sebagaimana disebutkan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dewan Komisaris melaksanakan tugas sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Anggaran Dasar. Dalam pelaksanaan tugasnya, Dewan Komisaris dibantu oleh Organ Dewan Komisaris, yaitu Sekretaris Dewan Komisaris dan Komite Audit.

Board of Commissioners

Board of Commissioners is a Board consisting of 3 (three) members and each member of Board of Commissioners cannot act solely, but through joint decision of Board of Commissioners. The position of each member of Board of Commissioners, including President Commissioner is equal. Board of Commissioners has responsibility to supervise the Company's management under Board of Directors, and to give advice to Board of Directors and to ensure that the Company's operation is in accordance with Articles of Association and the prevailing laws and regulations, including the implementation of GCG principles.

Board of Commissioners consists of :

1. President Commissioner : Ngalim Sawega
2. Commissioner : Langgeng Subur
3. Commissioner : Wahyu Utomo

Complete profile of Board of Commissioners can be read in the Corporate Data section of this Annual Report.

The functions of the Board of Commissioners are as follows:

- a. As a supervisor and advisor to Board of Directors in managing the Company;
- b. May impose sanctions to members of Board of Directors in form of temporary suspension, in case it is required for the sake of Company's interests, of which the implementation must be in accordance with provisions of Articles of Association and applicable laws and regulations;
- c. Able to carry out temporarily functions of Board of Directors of the Company, in the event of vacancy in Board of Directors or in certain circumstances as stated in Articles of Association and applicable regulations.

The Board of Commissioners carries out their duties as stipulated in Articles of Association. In carrying out their duties, Board of Commissioners is assisted by Organs of Board of Commissioners, namely Secretary to Board of Commissioners and Audit Committee.

Corporate Governance Report

Sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, maka Dewan Komisaris mengadakan rapat paling sedikit setiap bulan sekali. Dalam kurun waktu tahun 2010, Dewan Komisaris telah mengadakan 15 kali Rapat Dewan Komisaris dimana 13 kali rapat dilaksanakan dengan mengundang Direksi ke dalam Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Jumlah Rapat	15
Kehadiran	
Dewan Komisaris	
Ngalim Sawega	15
Langgeng Subur	11
Wahyu Utomo	13

Dalam tahun 2010, Dewan Komisaris melakukan pengawasan dan memberikan nasehat yang bersifat strategis dan material kepada Direksi. Pengawasan dan pemberian nasehat antara lain diberikan dalam persiapan rencana kerja dan anggaran Perseroan, penambahan modal Perseroan, pelaksanaan jalannya tugas Perseroan, yang diantaranya meliputi kegiatan pembiayaan langsung dan pendirian anak perusahaan, serta perkembangan Perseroan dalam hal adanya penugasan baru oleh Pemerintah.

Dewan Komisaris juga telah mengikuti kegiatan pelatihan sebagai bagian dari peningkatan kapasitas (capacity building) dengan mengikuti Public Private Partnerships (PPP) Days yang diselenggarakan oleh ADB, World Bank, IFC dan Pemerintah Filipina di Manila, Philipina pada bulan Maret 2010.

Remunerasi Dewan Komisaris

Remunerasi bagi Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS. Pada tahun 2010, jumlah remunerasi Dewan Komisaris adalah Rp912.600.000,- yang terdiri dari honorarium, tunjangan komunikasi, tunjangan cuti dan tunjangan Hari Raya.

In accordance with the provisions in the Company's Articles of Association, the Board of Commissioners holds meeting at least once a month. During 2010, the Board of Commissioners held 15 Meetings of Board of Commissioners, 13 of which were held by inviting Board of Directors to the Joint Meeting of Board of Commissioners and Board of Directors.

Number of Meetings	15
Attendance	
Board of Commissioners	
Ngalim Sawega	15
Langgeng Subur	11
Wahyu Utomo	13

In 2010, the Board of Commissioners supervised and gave strategic and material advices to Directors. The supervision and provision of advice, among others, were given in preparing the Company work plans and budgets, additional capital of the Company, execution of Company tasks, including direct financing activities and establishment of subsidiary, as well as Company's progress in the case of new assignment from the Government.

The Board of Commissioners also attended training activities as part of their capacity building by following Public Private Partnerships (PPP) Days organized by ADB, World Bank, IFC and Philippines Government in Manila, Philippines in March 2010.

Remuneration of Board of Commissioners

The remuneration for Board of Commissioners is determined by the GMS. In 2010, the total remuneration for Board of Commissioners was IDR 912,600,000,- consisted of honorarium, communication allowances, annual leave allowances and religious/holiday allowances.

Laporan Tata Kelola Perseroan

Sekretaris Dewan Komisaris

Sekretaris Dewan Komisaris memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain menyusun program kerja tahunan Dewan Komisaris, menyusun agenda rapat tahunan Dewan Komisaris, menyiapkan risalah rapat, mengadministrasikan dan menyimpan dokumen-dokumen Dewan Komisaris dan membantu kelancaran komunikasi antara Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham dan Direksi Perseroan.

Pada periode tahun 2010 (Oktober 2009 - Desember 2010), Sekretaris Dewan Komisaris dijabat oleh Sdr. Nuning S.R. Wulandari. Terhitung sejak Januari 2011, Sekretaris Dewan Komisaris dijabat oleh Sdr. Susanti.

Komite Audit

Komite Audit, yang terdiri dari 3 (tiga) orang, dibentuk pada bulan November 2009 dengan tujuan membantu Dewan Komisaris dalam memenuhi tanggung jawabnya untuk mengawasi proses pelaporan akuntansi dan keuangan, sistem pengendalian intern, proses audit, dan proses Perseroan dalam memantau kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kode etik.

Susunan Komite Audit terdiri :

1. Ketua : Langgeng Subur
2. Anggota : Dedhi Suharto
3. Anggota : Tri Achmadi

Sesuai dengan Piagam Komite Audit, Komite Audit mengadakan rapat sekurang-kurangnya sama dengan ketentuan minimal rapat Dewan Komisaris yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan dapat menyelenggarakan rapat tambahan, bila diperlukan. Dalam pelaksanaan rapat tersebut, Komite Audit dapat mengundang manajemen, auditor, maupun pihak lain yang terkait. Setiap rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit. Total pertemuan Komite Audit selama 2010 adalah sebanyak 14 (empat belas) kali.

Secretary to Board of Commissioners

The Secretary to Board of Commissioners has duties and responsibilities including to prepare annual work program of Board of Commissioners, organizing Board of Commissioners annual meeting agenda, preparing minutes of meetings, administering and filling Board of Commissioners' documents and conducting good communications between Board of Commissioners and Shareholders and Board of Directors as well.

For the 2010 period (October 2009 - December 2010), the Secretary of Board of Commissioners was held by Ms. Nuning S.R. Wulandari. Starting January 2011, the Secretary of Board of Commissioners is held by Ms. Susanti.

Audit Committee

The Audit Committee, consisting of 3 (three) members, was formed in November 2009 with the aim of assisting Board of Commissioners in fulfilling their responsibilities to oversee the accounting and financial reporting processes, the internal control system, the audit process, and the Company's process in monitoring its compliancy to the prevailing regulations and the code of ethics.

Audit Committee consists of:

1. Head : Langgeng Subur
2. Member : Dedhi Suharto
3. Member : Tri Achmadi

In accordance with the Charter of Audit Committee, the Audit Committee holds meeting at least similar to minimum requirements of Board of Commissioners meeting as set forth in the Articles of Association and may hold additional meetings, if necessary. In such meetings, the Audit Committee may invite the management, auditors, and other relevant parties. Each meeting of the Audit Committee is set forth in minutes of meeting signed by all members of Audit Committee. Total meetings of the Audit Committee in 2010 were as many as 14 (fourteen) times.

Corporate Governance Report

Rekap Daftar Kehadiran Rapat Komite Audit

Jumlah Rapat	14
Kehadiran	
Langgeng Subur	10
Dedhi Suharto	14
Tri Achmadi	14

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Audit merupakan pihak yang independen dan tidak memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan baik dalam kegiatan transaksi bisnis Perseroan, keterkaitan dengan pemasok/vendor, maupun dalam pelaksanaan operasional Perseroan lainnya.

Recap of Attendance List of Audit Committee Meetings

Number of Meetings	14
Attendance	
Langgeng Subur	10
Dedhi Suharto	14
Tri Achmadi	14

In carrying out its duties, the Audit Committee is an independent party and has no conflict of interest with the Company either in its ordinary business transaction, linkages with suppliers/vendors, or others in the Company business operational.



Laporan Tata Kelola Perseroan

Direksi

Direksi sebagai salah satu Organ Perseroan bertugas dan bertanggung jawab dalam mengelola Perseroan berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Masing-masing anggota Direksi dapat melaksanakan tugas dan mengambil keputusan sesuai dengan pembagian tugas dan wewenangnya.

Susunan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut :

1. Direktur Utama : Emma Sri Martini
2. Direktur Operasi : Frans Nembo Sukardi
3. Direktur Manajemen Risiko, Keuangan dan Dukungan Kerja : Farida Astuti

Pembagian Tugas Direksi adalah sebagai berikut :

Direktur Utama bertugas :

- a. Mewakili Perseroan di dalam maupun di luar pengadilan berdasarkan persetujuan anggota Direksi.
- b. Menentukan keputusan Direksi, apabila dalam voting pada rapat Direksi terdapat jumlah suara yang sama banyak antara suara yang setuju dan tidak setuju.
- c. Memberikan arahan dan mengendalikan kebijakan, visi, misi dan strategi perseroan,
- d. Mengkoordinasikan dan bertanggungjawab atas kegiatan Divisi Sekretariat Perusahaan, Divisi Audit Internal, serta Divisi Hukum, Penelitian dan Pengembangan.
- e. Mengkoordinasikan pemecahan masalah eksternal Perseroan, kebijakan penyusunan Rencana Jangka Panjang Perseroan ("RJPP"), Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan ("RKAP"), pengendalian pencapaian target RJPP dan RKAP, kebijakan audit, pembentukan citra dan budaya Perseroan dan tata kelola perusahaan yang baik (GCG), penanganan masalah hukum, pelaporan kegiatan Perseroan, serta penelitian dan pengembangan kegiatan usaha Perseroan sesuai RJPP dan RKAP.

Board of Directors

The Board of Directors as one of the organs of the Company, in charge of and responsible for managing the Company operation under the provisions of Articles of Association and prevailing laws and regulations. Each member of Board of Directors should be able to carry out the tasks and make decisions in accordance with the division of tasks and authority.

Board of Directors is as follows:

1. President Director : Emma Sri Martini
2. Director of Operation : Frans Nembo Sukardi
3. Director of Risk Management, Finance and Support : Farida Astuti

Division of Directors' tasks are as follows:

President Director is in charge of:

- a. Representing the Company inside and outside the court based on the approval from members of Board of Directors.
- b. Determining Board of Director's decisions, in case a tie voting happens during a Board of Directors meeting.
- c. Directing and controlling Company policies, vision, mission and strategy,
- d. Coordinating and being responsible for activities of Corporate Secretary Division, Internal Audit Division, as well as Legal, Research and Development Division.
- e. Coordinating Company's external problem solving, formulation of Company's Long Term Plan ("RJPP") policy, Company Budget and Work Plan ("RKAP"), controlling achievement of RJPP and RKAP targets, audit policy, shaping of Company image, corporate culture and GCG implementation, handling legal issues, reporting on Company activities, as well as Company research and development activities in accordance with the RJPP and RKAP.

Corporate Governance Report

Direktur Operasi bertugas :

- a. Mengkoordinasikan dan bertanggungjawab atas kegiatan Divisi Pembiayaan dan Investasi, Divisi Pengendalian Fasilitas Pembiayaan dan Divisi Administrasi & Kustodi.
- b. Memimpin dan mengendalikan penyusunan kebijakan dan keputusan terhadap kegiatan usaha utama sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.
- c. Memimpin, mengarahkan dan mengendalikan kegiatan-kegiatan pembiayaan & investasi, pengendalian fasilitas pembiayaan, serta administrasi & kustodi sesuai RJPP dan RKAP.
- d. Melaporkan kegiatan Direktorat.
- e. Menandatangi dokumen-dokumen yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan tugas-tugas di atas.

Direktur Manajemen Risiko, Keuangan dan Dukungan Kerja bertugas :

- a. Memimpin dan mengendalikan penyusunan kebijakan anggaran, akuntansi, perpajakan, perbendaharaan dan pendanaan, manajemen risiko, kepegawaian, dan dukungan kerja.
- b. Mengkoordinasikan dan bertanggungjawab atas kegiatan Divisi Manajemen Risiko, Divisi Keuangan, Divisi Akuntansi, dan Divisi Dukungan Kerja.
- c. Mengkoordinasikan penyusunan RJPP dan RKAP serta pemantauan target-target keuangan Perseroan.
- d. Memimpin, mengarahkan, dan mengendalikan kegiatan anggaran, akuntansi, perpajakan, perbendaharaan dan pendanaan, manajemen risiko, kepegawaian, dan dukungan kerja sesuai RJPP dan RKAP.
- e. Melakukan pengelolaan dana untuk tujuan optimalisasi dana perseroan.
- f. Melakukan pembinaan pegawai sesuai peraturan perundangan dan peraturan Perseroan yang berlaku.
- g. Melaporkan kegiatan Direktorat dan laporan-laporan terkait keuangan, perpajakan dan kepegawaian yang diwajibkan Peraturan Menteri Keuangan dan/atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- h. Menandatangi dokumen-dokumen yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan tugas-tugas di atas.

Director of Operation is in charge of:

- a. Coordinating and being responsible for activities of Financing and Investment Division, Facility Monitoring Division and Administration and Custody Division.
- b. Directing and controlling the making of policies and decisions on major business activities as stipulated in Articles of Association.
- c. Leading, directing and controlling activities of finance & investment, facility monitoring, as well as administration and custody in accordance with RJPP and RKAP.
- d. Reporting Directorate's activities.
- e. Signing documents required in connection with the execution of tasks above.

Director of Risk Management, Finance and Support is in charge of:

- a. Directing and controlling preparation of budget, accounting, taxation, treasury and financing, risk management, personnel, and support policies.
- b. Coordinating and being responsible for activities of Risk Management Division, Finance Division, Accounting Division, and Support Division.
- c. Coordinating the making of RJPP and RKAP as well as monitoring Company's financial targets.
- d. Leading, directing, and controlling activities of budgeting, accounting, taxation, treasury and financing, risk management, personnel, and support in accordance with RJPP and RKAP.
- e. Managing funds for the purpose of optimizing Company funds.
- f. Conducting employee coaching in accordance with the prevailing laws and Company regulation.
- g. Reporting Directorate activities and other reports related to finance, taxation and human resources as required by Ministry of Finance Regulation and/or prevailing statutory provisions.
- h. Signing required document in connection with the execution of tasks above.

Laporan Tata Kelola Perseroan



Profil Direksi selengkapnya dimuat di bagian Data Perseroan dalam Laporan Tahunan ini.

Secara rutin Direksi mengadakan Rapat Direksi guna mengambil keputusan penting terkait jalannya kepengurusan Perusahaan. Pada tahun 2010, telah dilaksanakan 51 kali Rapat Direksi.

Jumlah Rapat	51
Kehadiran	
Direksi	
Emma Sri Martini	51
Frans Nembo Sukardi	48
Farida Astuti	49

Pada tahun 2010, Direksi mengikuti sejumlah pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi Direksi antara lain workshop "Strategies for Asia's Sustainable Beyond Global Crisis-Infrastructure, the Environment, and Finance" di Jakarta, PPP Days di Manila, Filipina, International Investment Conference for Public Private Partnership di Kuala Lumpur-Malaysia, Annual Global Infrastructure Projects di Kuala Lumpur-Malaysia,

Complete profiles of Board of Directors are in the Corporate Data section in this Annual Report.

Board of Directors holds regular meetings to make important decisions related to the Company management. In 2010, 51 Board of Directors meeting were held.

Number of Meetings	51
Attendance	
Board of Directors	
Emma Sri Martini	51
Frans Nembo Sukardi	48
Farida Astuti	49

In 2010, the Board of Directors participated in a number of training programs in order to improve the competency of Board of Directors, among others, workshop on "Strategies for Asia's Sustainable Beyond the Global Crisis-Infrastructure, the Environment, and Finance" in Jakarta, PPP Days in Manila, Philippines, International Investment Conference for Public Private Partnership in Kuala Lumpur, Malaysia, Annual Global Infrastructure

Corporate Governance Report

Infrastructure Investor: Asia Forum di Singapura, The IFN Asia Forum-Global Islamic Finance Forum di Malaysia; Singapore Urban Hub: "Workshop Proyek Kerjasama Pemerintah Swasta Sektor Infrastruktur" di Singapura.

Remunerasi Direksi

Penetapan remunerasi bagi Direksi ditetapkan oleh RUPS. Pada tahun 2010, jumlah remunerasi Direksi adalah Rp2.595.000.000,- yang terdiri dari gaji pokok, tunjangan perumahan, tunjangan cuti dan tunjangan Hari Raya.

Audit Internal

Audit Internal merupakan aparat pengawasan internal perusahaan yang dibentuk untuk membantu Direktur Utama dalam menilai pelaksanaan tata kelola perusahaan (governance), pengelolaan risiko (risk management), dan pengendalian internal (internal control). Sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, Divisi Audit Internal (DAI) telah dilengkapi dengan faktor-faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan tugasnya, yaitu :

- Posisi DAI di dalam struktur organisasi berada langsung di bawah Direktur Utama.
- Kualitas personil yang ditugaskan di DAI sesuai dengan kebutuhan untuk pelaksanaan tugas audit internal.
- DAI telah memiliki Piagam Audit Internal yang menyatakan visi dan misi DAI, kebijakan umum pengendalian internal, batas kewenangan dan tanggung jawab DAI dan manajemen, kode etik, kualifikasi auditor internal, dan mekanisme pelaporan dan tindak lanjut. Pengaturan yang lebih rinci dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DAI diatur dalam buku Pedoman Audit Internal.

DAI telah menjalankan perannya sebagai pengawas dan evaluator sebagai berikut:

- Melaksanakan penugasan assurance dan konsultansi sesuai Rencana Kerja Penugasan Tahunan yang sudah ditetapkan. Program kerja assurance telah mencakup atas kegiatan audit kepatuhan, menilai efisiensi dan efektifitas, melakukan pengujian keandalan sistem pengendalian internal korporasi serta mendeteksi indikasi kecurangan.

Projects in Kuala Lumpur, Malaysia, Infrastructure Investors: Asia Forum in Singapore, The Asia Forum IFN-Global Islamic Finance Forum in Malaysia, Singapore Urban Hub: "Workshop on Government- Infrastructure Private Sector Cooperation Project " in Singapore.

Remuneration of Board of Directors

Remuneration for Board of Directors is determined by the GMS. In 2010, total remuneration of Directors was IDR 2,595,000,000,- consisted of basic salary, housing allowances, annual leave allowances and religious holiday allowances.

Internal Audit

Internal Audit is the Company's internal control apparatus established to assist the President Director in assessing the implementation of good corporate governance, risk management, and internal controls. In accordance with the principles of good corporate governance, the Internal Audit Division (DAI) has been equipped with the following factors to support the successful execution of its duties:

- DAI position in the organization structure is directly under President Director.
- Quality of personnels assigned into DAI is in accordance with the requirements for the implementation of internal audit tasks.
- DAI has an Internal Audit Charter which states the vision and mission of DAI, general policy of internal controls, limit of authority and responsibility of DAI and management, code of ethics, qualifications of internal auditors, and mechanisms of reporting and follow-up. More details arrangement of the implementation of the main tasks and functions of DAI are set forth in the Internal Audit Guide.

DAI has been carrying out its role as a supervisor and evaluator as follows:

- Implementing the assurance and consultancy assignments in accordance with the Annual Work Plan Assignments that have been defined. The assurance work plan includes compliance audit activities, assessment of efficiency and effectiveness, reliability test of corporate internal control systems and fraud indications detection.

Laporan Tata Kelola Perseroan

- b. Melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Komite Audit secara periodik setiap triwulan dan tahunan. Sedangkan laporan hasil penugasan rinci disampaikan kepada pimpinan unit kerja terkait dengan tembusan kepada direktur yang membawahi serta Divisi Manajemen Risiko.
- c. Memantau tindak lanjut rekomendasi hasil audit setiap bulan dengan menyampaikan status pelaksanaan tindak lanjut setiap bulan kepada direktur yang membawahi unit kerja.

Sebagai mitra strategis (strategic partner) manajemen, DAI secara aktif memberikan masukan atas prosedur dan pengendalian proses-proses bisnis perusahaan dengan pendekatan :

- a. Mengevaluasi sejauh mana sasaran dan tujuan program serta kegiatan operasi telah ditetapkan sejalan dengan tujuan organisasi.
- b. Memberi masukan atas konsistensi hasil-hasil yang diperoleh dari kegiatan dan program dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan kepada manajemen.

Kegiatan Konsultansi

Tahun 2010 merupakan periode dimana pengembangan sistem tata kelola perusahaan yang baik (GCG) menjadi tema dalam penugasan DAI. Bekerjasama dengan unit kerja terkait, DAI melakukan diagnostic assessment, baik yang dilakukan secara internal oleh audit internal sendiri (self assessment) maupun menggunakan jasa pihak independen yaitu BPKP.

Beberapa kegiatan konsultasi lainnya yang dilakukan selama tahun 2010 adalah melakukan pendampingan implementasi Integrated Financial Management System (FMS) berbasis Oracle, pengembangan kerangka manajemen risiko dan penyusunan profil risiko, analisis proses bisnis dan pengembangan kerangka manajemen kinerja berbasis balanced scorecard, serta melakukan review atas beberapa pedoman dan prosedur, serta layanan konsultasi lainnya.

- b. Reporting performance of its duties to President Director, with copies to Audit Committee periodically on a quarterly and annual basis. Whilst the detailed inspection result report is submitted to the associated unit head with copies to the supervisor Director and Risk Management Division.
- c. Monitoring follow up on audit recommendations every month by conveying the implementation of follow-up status to the director who oversees the operational unit every month.

As a strategic partner to the management, DAI actively provides input on procedures and control of the Company business processes with the following approaches:

- a. Evaluating how far the programs' goals and objectives and operational activities set is in line with the organizational objectives.
- b. Providing input on the consistency of results obtained from activities and programs with the predefined goals and targets to the management.

Consultancy Activities

The year 2010 was a period in which the system development of GCG was the theme of DAI assignment. In cooperation with the related operational units, DAI performed diagnostic assessments, either conducted internally by the internal audit (self assessment) or utilizing services of an independent party, namely BPKP.

Several other consultation activities undertaken during the year 2010 were implementation assistance of Oracle based Integrated Financial Management System (FMS), development of risk management framework and risk profiles preparation, business process analysis and development of a performance management framework based on balanced scorecard system, and review of a number of guidelines and procedures, as well as other consulting services.

Corporate Governance Report

Kegiatan Assurance

Sedangkan kegiatan assurance yang dilakukan dalam 2010 adalah review atas kegiatan administrasi pembiayaan (loan administration) dan kegiatan pengadaan jasa. Beberapa rekomendasi yang disampaikan kepada manajemen telah ditindaklanjuti, sedangkan beberapa hal masih dalam proses penyelesaian yang terus dilakukan monitoring pelaksanaan tindak lanjutnya.

Kegiatan Manajemen Audit Internal

Fokus dalam 2010 adalah menyiapkan suatu sistem berbasis portal yaitu Audit Internal Management System (AIMS) yang membantu proses administrasi pelaksanaan tugas audit internal, mulai dari perencanaan, administrasi pelaksanaan tugas, dan monitoring tindak lanjut. Termasuk didalamnya pengembangan basis data Risk Audit Universe yang menjadi dasar dalam menyusun Rencana Kerja Penugasan Tahunan.

Kegiatan Pendampingan & Komunikasi dengan Komite Audit

DAI telah bertindak sebagai counterpart dengan Komite Audit dan melakukan 11 kali pertemuan dengan Komite Audit di tahun 2010 dengan agenda pembahasan antara lain pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku 2009 dan 2010, pembahasan Rencana Kerja Penugasan Tahunan (RKPT) 2011, dan lain-lain.

MANAJEMEN RISIKO

Fungsi

Manajemen Risiko menjalankan fungsi pengelolaan risiko yang mencakup perencanaan, pengkajian, dan pengendalian risiko-risiko yang dihadapi perusahaan terkait dengan aktivitas yang dilakukannya. Dalam menjalankan fungsinya tersebut, manajemen risiko menyediakan kerangka kerja pengelolaan risiko yang memberikan manfaat kepada Manajemen, memberikan masukan adanya kemungkinan kerugian potensial di masa depan, serta memperbaiki metode dan proses pengambilan keputusan yang sistematis berdasarkan informasi yang tersedia.

Assurance Activities

While assurance activities undertaken in 2010 were review of loan administration and procurement activities. Several recommendations presented to the management had been followed up, while several were in settlement process and monitored continuously.

Internal Audit Management Activities

The focus in 2010 was to set up a portal-based system called Internal Audit Management System (AIMS) which helped execution administration of internal audit duties, ranging from planning, administrative duties, and monitoring follow-up. These included development of Audit Universe Risk database which became the basis of Annual Work Plan Assignment.

Activities of Mentoring & Communicating with Audit Committee

DAI had acted as a counterpart to the Audit Committee and held 11 meetings with the Audit Committee in 2010, with discussion agenda included audit implementation by a Public Accounting Firm for fiscal year 2009 and 2010, discussion of Annual Work Plan Assignment (RKPT), 2011, and other issues.

RISK MANAGEMENT

Function

Risk Management runs its risk management function which includes planning, assessment, and controlling risks faced by the Company associated with its activities. In performing these functions, the Risk Management provides a risk management framework which gives benefits to the Management, provides input on possibility of potential future losses, and improving methods and systematic decision-making process based on the available information.

Laporan Tata Kelola Perseroan

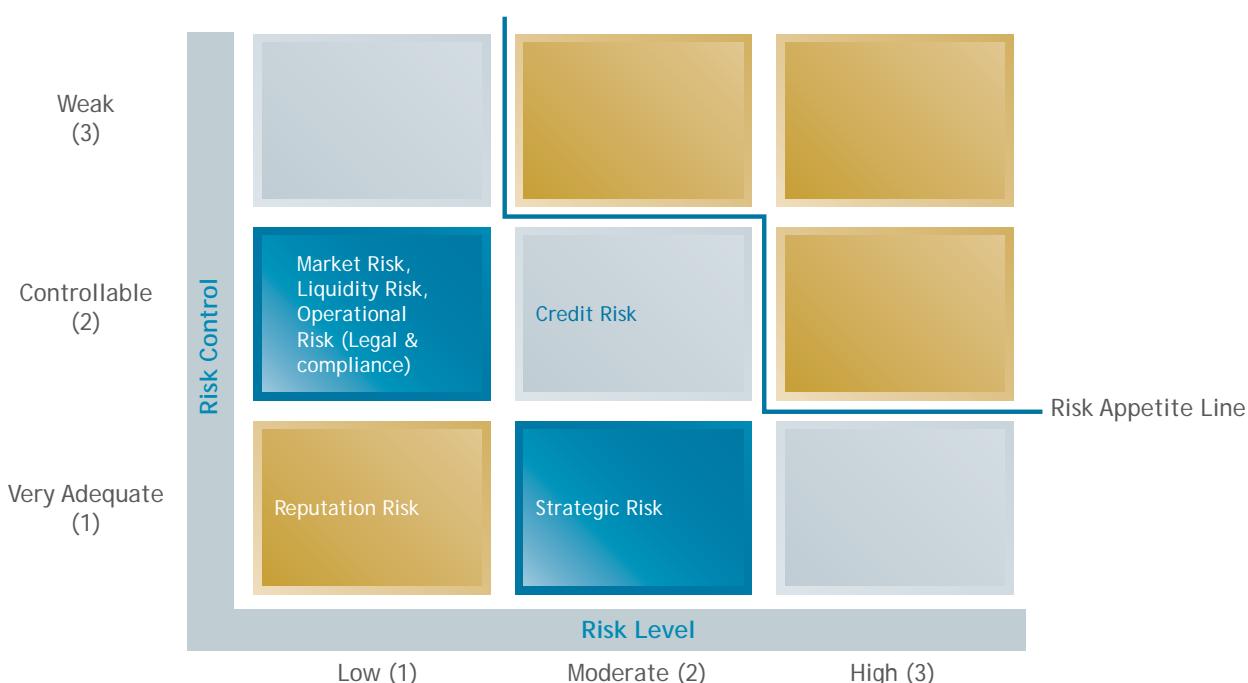
Pada tahun 2010, tema sentral pengelolaan risiko adalah pengelolaan risiko kredit dan risiko operasional. Hal ini didasari pada pertimbangan bahwa risiko kredit merupakan risiko utama Perseroan terkait dengan pilihan aktivitas pembiayaan sebagai aktivitas utama serta pilihan sektor infrastruktur dasar sebagai sektor eligible dari fasilitas pembiayaan yang diberikan. Sedangkan risiko operasional merupakan konsekuensi logis evolusi perkembangan Perseroan dalam membentuk struktur transaksi baku yang sesuai dengan harapan dari para pemangku kepentingan.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa risiko yang dihadapi Perseroan tahun 2010 masih dapat dikendalikan pada tingkat risiko yang dapat diterima.

Profil Risiko

Penyusunan profil risiko bertujuan untuk memberikan gambaran tingkat risiko dan pengendalian risiko yang dimiliki Perseroan. Penilaian profil risiko dilakukan melalui proses self assesment terhadap 8 (delapan) jenis risiko yaitu : risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko kepatuhan, risiko reputasi, dan risiko strategis.

Berdasarkan hasil penilaian yang telah dilakukan, profil risiko Perseroan masih di bawah risk appetite sebagaimana diilustrasikan pada bagan berikut :



In 2010, central themes of risk management were management of credit risk and operational risk. This was based on the consideration that credit risk was the major risk of the Corporate associated with choices of financing activities as its main activity and the basic infrastructure sectors selected as eligible sector of the financing facilities provided. In addition, operational risk was a logical consequence of the Company's evolutionary progress in shaping a set of transaction structure in accordance with expectations of stakeholders.

In general, it can be concluded that the risks faced by the Company in 2010 could still be managed at the level of acceptable risk.

Risk Profile

Risk profile preparation aims to provide a picture of the Company's risk level and risk management. The risk profile assessment is conducted through self assessment process using 8 (eight) types of risks, which are: credit risk, market risk, liquidity risk, operational risk, legal risk, compliance risk, reputation risk and strategic risk.

Based on the assessment results, the Company's risk profile is still below risk appetite, as illustrated in the following chart:

Corporate Governance Report

Memperhatikan matriks profil risiko di atas, terlihat bahwa risiko kredit memiliki level risiko yang lebih tinggi dibandingkan dengan risiko-risiko lainnya. Hal ini merupakan suatu keniscayaan mengingat core business dari Perseroan adalah pembiayaan infrastruktur.

Risiko Kredit

Risiko kredit timbul sebagai akibat kegagalan pihak lawan transaksi (counterparty) memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian pembiayaan yang telah disepakati dengan Perseroan. Risiko kredit memiliki tingkat risiko yang moderat dimana terhadap risiko kredit yang ada Perseroan telah melakukan serangkaian langkah pengelolaan risiko kredit melalui penyempurnaan prosedur dan sistem manajemen risiko, pengembangan Internal Rating System (IRS), pengaktifan Komite Investasi dan penerapan Risk Based Pricing.

Risiko Pasar

Risiko pasar adalah risiko yang timbul dari perubahan nilai tukar mata uang atau perubahan suku bunga, termasuk dalam hal ini perubahan nilai harga saham yang dapat merugikan Perseroan. Memperhatikan kondisi Perseroan dimana belum terdapat portofolio dalam mata uang asing dan portofolio treasury yang masih terkonsentrasi pada instrumen perbankan yang konservatif maka tingkat risiko pasar adalah rendah.

Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas timbul karena ketidakmampuan Perseroan untuk menyediakan dana dalam jumlah yang memadai sehingga gagal melaksanakan pembayaran

Looking at the risk profile matrix above, it appears that the credit risk has a higher level of risk compared to other risks. This is a necessity considering the Company's core business is infrastructure financing.

Credit Risk

Credit risk appears as a result of counterparty's failure to meet its obligations under the financing agreements agreed by the Company. The credit risk has a moderate level of risk against which the Company has conducted a series of mitigation measures by improving credit risk management procedures and risk management systems, development of the Internal Rating System (IRS), activation of Investment Committee and implementation of Risk Based Pricing.

Market Risk

Market risk is the risk arising from changes in currency exchange rates or interest rate, including, in this case, value of stock price changes that could harm the Company. Considering the Company's condition which has no portfolio in foreign currency yet and that the treasury portfolio has been concentrated on conservative banking instruments, therefore, the level of market risk is low.

Liquidity Risk

Liquidity risk appears due to the inability of the Company to provide sufficient funds to execute payment of any Company's liability and/ or commitment. By considering



Laporan Tata Kelola Perseroan

atas kewajiban dan/atau komitmen Perseroan. Dengan memperhatikan kondisi keuangan Perseroan pada tahun 2010 dimana rasio likuiditas Perseroan masih cukup tinggi serta struktur sumber dana Perseroan yang sepenuhnya merupakan penyertaan modal negara, maka tingkat risiko likuiditas Perseroan adalah rendah.

Risiko Operasional

Risiko operasional adalah risiko yang disebabkan ketidakcukupan dan atau tidak berfungsi proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem atau adanya masalah eksternal yang mempengaruhi pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan. Dalam tahun 2010, tingkat risiko operasional Perseroan adalah rendah. Hal ini terkait dengan kondisi belum kompleksnya kegiatan usaha Perseroan, tidak ada kerugian (loss event) yang disebabkan oleh risiko operasional, dan tidak terjadinya pelanggaran yang signifikan terhadap ketentuan yang ada.

Pengelolaan risiko operasional dilakukan dengan mengembangkan budaya sadar risiko pada seluruh jajaran Perseroan. Selain itu DMR bersama dengan DAI telah melakukan inisiasi analisa proses bisnis (business process analysis) dan menyusun Tugas Pokok & Fungsi Divisi sesuai dengan struktur organisasi Perseroan yang baru (Mei 2010) sehingga dapat diwujudkan struktur tata kelola yang baik.

Analisa Proses Bisnis

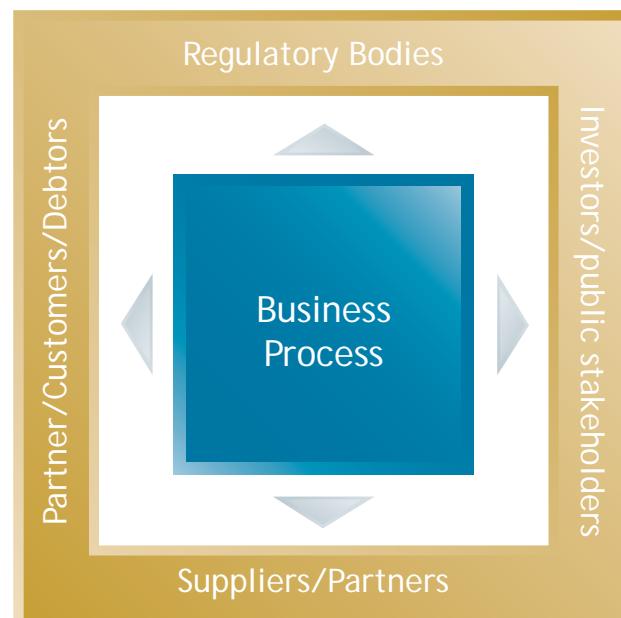
the Company's financial condition in 2010 in which the Company's liquidity ratio was still at high level and the structure of Company's sources of funds that was fully state capital investment, the Company level of liquidity risk was low.

Operational Risk

Operational risk is the risk caused by inadequacy and/or malfunction of internal processes, human error, system failure or external problems affecting the implementation of the Company's business activities. In 2010, the Company's operational risk level was low. This was related to the Company business activities which were not yet complex, no loss event caused by operational risk, and no significant violations against the existing regulations.

Operational risk management is carried out by developing a risk awareness culture at all levels in the Company. In addition, DMR together with DAI had conducted an initiation of business process analysis and formulated Division's Main Duties and Function in accordance with the Company's new organizational structure (May 2010) in order to promote a good governance structure.

Business Process Analysis



Corporate Governance Report

Analisa proses bisnis (business process analysis) bertujuan untuk memberikan gambaran utuh kegiatan usaha Perseroan, identifikasi aktivitas pembentuk kegiatan serta keterkaitannya dalam rangka menciptakan nilai tambah (value added) bagi stakeholders. Tersedianya mapping proses bisnis akan meningkatkan kehandalan respon risiko sehingga dapat tercipta pengendalian risiko yang memadai.

Selanjutnya, terhadap seluruh proses bisnis yang ada, DMR bersama dengan divisi-divisi yang melaksanakan transaksi (Risk Taking Divisions) melakukan pengukuran dan menentukan kecukupan pengendalian dan atau bentuk respon risiko yang telah diterapkan.

Risiko Hukum

Risiko hukum timbul karena adanya kelemahan pengikatan perjanjian/ kontrak, klaim, atau agunan, dan tuntutan atau gugatan hukum oleh pihak ketiga terhadap Perseroan serta akibat perubahan ketentuan hukum, termasuk perubahan ataupun ketidaadaan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Adapun pada tahun 2010, tingkat risiko hukum Perseroan adalah rendah.

Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan timbul ketika Perseroan tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku, sehingga berpotensi pada pengenaan denda, hukuman, atau rusaknya reputasi sebagai akibat ketidakmampuan Perseroan memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku. Adapun pada tahun 2010, tingkat risiko kepatuhan Perseroan adalah rendah.

Risiko Strategis

Risiko strategis timbul dari adanya keputusan atau penerapan strategi Perseroan yang kurang tepat atau kegagalan Perseroan dalam merespon perubahan-perubahan eksternal. Pengukuran risiko strategis dilakukan dengan membandingkan indikator risiko strategis yaitu sasaran strategis yang ditetapkan dalam target kinerja Perseroan terhadap realisasi pencapaianya. Risiko strategis dari Perseroan berada pada tingkat moderat karena terdapat beberapa sasaran strategis atau target yang masih belum tercapai, meskipun hal ini masih dalam batas toleransi yang ada dengan memperhatikan argumentasi yang melatarbelakanginya.

The business process analysis aims to provide the complete picture of the Company's business activities, the identification of activity-building operations and its association in order to create a value-added for stakeholders. The availability of business processes mapping will increase the reliability of risk responses to create sufficient risk control.

Furthermore, for the entire business process, DMR together with the Divisions that carry out transactions (Risk Taking Divisions) conducts evaluations and determines the adequacy of controls and/or forms of risk responses that have been applied.

Legal Risk

Legal risk appears due to several weaknesses in the binding agreement/ contract, claim, or collateral, and lawsuits by third parties against the Company and due to changes in legal provisions, including changes or absence of regulations and legislation in force. In 2010, the Company's level of legal risk was low.

Compliance Risk

Compliance risk appears when the Company does not comply with or not implement prevailing regulations and other related laws thereby incurring the potential imposition of fines, penalties, or loss of reputation as a result of Company's inability to comply with applicable provisions. In 2010, the Company's level of compliance risk was low.

Strategic Risk

Strategic risk arises from improper decisions or implementation of strategies, or Company's failure in responding to external changes. Strategic risk evaluation is done by comparing strategic risk indicators, which are strategic objectives set forth in the Company's performance targets against its the actual accomplishments. The Company's strategic risks were at moderate levels due to few strategic objectives or targets were not achieved yet, although this was still within the tolerance limits with respect of the arguments for it.

Laporan Tata Kelola Perseroan



Risiko Reputasi

Risiko reputasi timbul dari adanya pemberitaan negatif mengenai kegiatan usaha Perseroan atau persepsi negatif terhadap Perseroan. Dalam tahun 2010, tidak diperoleh informasi yang dapat dikategorikan sebagai publikasi negatif terhadap Perseroan yang memiliki dampak terhadap reputasi, sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat risiko reputasi perseroan adalah rendah.

SEKRETARIS PERUSAHAAN

Sekretaris Perusahaan adalah petugas penghubung (liaison officer) dengan seluruh pemangku kepentingan Perseroan. Sekretaris Perusahaan juga memiliki tugas untuk memberikan masukan kepada Direksi dalam rangka memastikan kepatuhan Perseroan atas peraturan dan ketentuan yang berlaku, menatausahakan administrasi dokumen korporasi Perseroan, dan melaksanakan tanggung jawab sosial Perseroan.

Secara umum, Sekretaris Perusahaan bertanggungjawab untuk menciptakan citra Perseroan yang baik (positive corporate image) melalui penciptaan hubungan baik dengan seluruh pemangku kepentingan.

Reputational Risk

Reputational risk arises from negative news on the Company's activities or negative perceptions regarding the Company. In 2010, there was no negative publicity against the Company that had an impact on the reputation, therefore, it could be concluded that the company reputation risk level was low.

CORPORATE SECRETARY

The Corporate Secretary is the liaison officer to all Company's stakeholders. In addition, the Corporate Secretary has to give advice to Board of Directors in order to ensure that the Company is in compliance with the prevailing laws and regulations, to administer the Company's corporate documents, and to implement the Corporate Social Responsibility.

In general, Corporate Secretary is responsible for creating good image of the Company (positive corporate image) through creation of good relations with all stakeholders.

Corporate Governance Report

Sekretaris Perusahaan memimpin Divisi Sekretariat Perusahaan dan menjalankan fungsi-fungsi sebagai berikut :

1. Fungsi Pemenuhan Ketentuan Keterbukaan melalui :
 - a. Penyampaian laporan dan informasi kegiatan Perseroan kepada Pemegang Saham dan regulator;
 - b. Penerbitan dan penyampaian Laporan Tahunan (Annual Report) kepada pemangku kepentingan terkait;
 - c. Penyelenggaraan kegiatan korporasi seperti penyelenggaraan RUPS, Rapat Direksi dan kegiatan korporasi lainnya;
 - d. Pelaksanaan GCG compliance
2. Fungsi Komunikasi, yaitu menciptakan a positive corporate image melalui:
 - a. Pemeliharaan dan pengembangan hubungan baik dengan external stakeholders Perseroan, baik dengan Pemegang Saham dan lembaga-lembaga terkait (government relations), media massa (media relations), investor (investor relations), dan masyarakat umum lainnya (external relations);
 - b. Pelaksanaan kegiatan komunikasi internal Perseroan (internal communications), baik melalui penyampaian informasi maupun penyelenggaraan kegiatan karyawan;
 - c. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi Perseroan melalui berbagai kegiatan, seperti investor forum, project expo, iklan, website, sponsorship, corporate gift, dll.
3. Fungsi Biro Direksi dan Administrasi
 - a. Pelaksanaan kegiatan Biro Direksi
 - b. Penatausahaan dan penyimpanan dokumen Perseroan;
 - c. Pelaksanaan kegiatan pendukung Direksi.
4. Fungsi Tanggung Jawab Sosial Perseroan (Corporate Social Responsibility/CSR)

Corporate Secretary leads the Corporate Secretariat Division and runs the following functions:

1. Fulfillment of openness provisions function, through:
 - a. Submitting reports and information on the Company activities to Shareholders and regulators;
 - b. Issuing and submitting Annual Report to relevant stakeholders;
 - c. Implementing corporate activities such as GMS implementation, Board of Directors Meeting and other corporate activities;
 - d. Implementing GCG compliance
2. Communication function, to create a positive corporate image through:
 - a. Maintaining and building good relations with external stakeholders of the Company, including Shareholders and related institutions (government relations), mass media (media relations), investors (investor relations), and the general public (external relations);
 - b. Conducting internal communication activities (internal communications), through information sharing and exertion of employee activities;
 - c. Conducting Company socialization through various activities, such as investor forum, project expo, advertising, website, sponsorships, corporate gifts, and other activities.
3. Functions of Director of Bureau and Administration
 - a. Implementing Director of Bureau's activities
 - b. Administration and filling Company's documents;
 - c. Conducting supporting activities to Board of Directors.
4. Corporate Social Responsibility Function (CSR)

Laporan Tata Kelola Perseroan



Realisasi Kegiatan Tahun 2010

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, komunikasi yang efektif dengan para pemangku kepentingan terus dilaksanakan dengan tujuan memberikan landasan yang kuat bagi pemahaman dan dukungan positif pemangku kepentingan terhadap Perseroan.

Hubungan baik dengan berbagai pihak dilaksanakan dalam berbagai bentuk kegiatan. Kepada Pemegang Saham dan regulator, Perseroan melakukan komunikasi dalam bentuk penyampaian laporan secara akurat dan tepat waktu serta melalui RUPS. Sedangkan kepada pemangku kepentingan lainnya, komunikasi dilaksanakan melalui penyebaran informasi baik melalui penyampaian Annual Report Perseroan, situs resmi Perseroan dan media massa.

Sosialisasi Perseroan juga dilakukan dalam seminar, forum diskusi, pameran dan berbagai event khusus lainnya. Perseroan mengharapkan agar seluruh kegiatan sosialisasi ini dapat menjadi sarana bagi pemangku kepentingan Perseroan untuk memperoleh informasi gambaran yang lebih komprehensif tentang Perseroan.

Activities in 2010

In accordance with its duties and functions, the Corporate Secretariat Division continued to implement effective communications between the Company and its stakeholders in 2010. The effective communication aimed to provide strong foundation for the stakeholders' understanding and positive support to the Company.

Various activities were conducted to maintain good relationships with various parties. The Company communicated with shareholders and regulator by submitting reports accurately and punctually and through General Meeting of Shareholders (GMS). While to other stakeholders, communication was carried out through information dissemination through submission of Annual Report, the Company official website and mass media.

Dissemination of information was also performed in various seminars, discussion forums, exhibitions and various other special events. PT SMI expected that all of this socialization could be tools for the stakeholders to obtain more comprehensive information about the Company.

Corporate Governance Report

Kegiatan sosialisasi ini diharapkan juga dapat membuka jalur komunikasi langsung antara Perseroan dengan calon investor, pemilik proyek, instansi terkait dan pemangku kepentingan lainnya.

Seluruh kegiatan sosialisasi ini merupakan upaya untuk menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik yang mengedepankan transparansi dan fairness terkait penyebaran informasi kepada seluruh pemangku kepentingan.

Secara internal, Perseroan juga mengupayakan terjalinnya komunikasi yang efektif di lingkungan internal Perseroan, baik di jajaran manajemen maupun kepada karyawan Perseroan. Pada tahun 2010, Perseroan terus berupaya untuk membangun Esprit de Corps Perseroan melalui sejumlah kegiatan internal seperti Perayaan HUT SMI ke-1, Perayaan HUT RI, Diskusi Ramadhan, dan lain-lain.

Dalam konteks Biro Direksi dan Administrasi, secara rutin telah dilaksanakan kegiatan Biro Direksi seperti pengaturan jadwal, penyelenggaraan Rapat Direksi, kegiatan protokoler dan lain-lain. Selain itu juga telah dilaksanakan penatausahaan dan penyimpanan Dokumen Perusahaan dan pelaksanaan kegiatan pendukung lainnya bagi Direksi.

Adapun realisasi atas tanggung jawab sosial Perseroan dimuat secara khusus pada Bagian Tanggung Jawab Sosial Perseroan.

The socialization was also expected to open direct communication between PT SMI and potential investors, project owners, agencies and other stakeholders.

All of this socialization was an attempt to apply the good governance principles which promoted transparency and fairness, related to the information dissemination to stakeholders.

Internally, PT SMI also strived to establish effective communications, both in the management level and to the employees of the Company. In 2010, PT SMI continued to build Esprit de Corps through a number of internal activities such as celebrating the first anniversary of PT SMI, National day Celebrations, Discussion of Ramadhan, and others.

In the context of Director of Bureau and Administration, routine activities such as setting schedules, running Board of Directors meetings, protocol activities and others had been carried out. The administration and filling company documents and other supporting activities for the Board of Directors had also been carried out.

The realization of corporate social responsibility is published specifically in the Corporate Social Responsibility section.



Tanggung Jawab Sosial Perseroan



Sebagai bagian dari tanggung jawab sosial Perseroan (Corporate Social Responsibility/CSR), maka Perseroan telah melaksanakan tanggung jawab sosial Perseroan, baik melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) maupun melalui kegiatan sosial yang langsung dilaksanakan oleh Manajemen dan karyawan Perseroan.

- **Program Kemitraan dan Bina Lingkungan**

Perseroan menyadari bahwa *going concern* sebuah perusahaan sangatlah bergantung pada dukungan dari segenap pemangku kepentingan Perseroan. Selain komunitas internal seperti pemegang saham dan karyawan, kepedulian masyarakat luas ternyata membawa dampak positif bagi Perseroan.

Oleh karenanya, dengan atau tanpa ketentuan hukum yang mewajibkan, Perseroan secara sukarela dan independen memandang perlu untuk mengembangkan tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat, antara lain melalui Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL).

As part of its Corporate Social Responsibility (CSR), PT SMI conducts its CSR activities through the Partnerships and Community Development programs and other social activities directly held by the Management and employees of the Company.

- **Partnership and Community Development Program (PKBL)**

PT SMI fully recognizes that as a going concern, a Company is very dependent on the support from all stakeholders. Besides the internal community such as shareholders and employees, concerns from wide society apparently brings positive effects to the Company.

Therefore, PT SMI willingly and independently takes on the social responsibility through the Partnerships and Community Development Programs (PKBL).

Corporate Social Responsibility

PKBL dilaksanakan oleh Unit PKBL di bawah koordinasi Sekretaris Perusahaan sebagai Kepala Unit PKBL yang terdiri dari 2 (dua) sub program berikut:

- Kemitraan, yaitu sub program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba Perseroan.
- Bina Lingkungan, yaitu pemberdayaan kondisi sosial masyarakat melalui pemanfaatan dana dari bagian laba Perseroan.

Merujuk pada Keputusan RUPS Tahunan 2010 yang menyetujui adanya pelaksanaan PKBL dengan fokus pada Program Bina Lingkungan (BL), maka Perseroan telah melaksanakan Program BL dalam bentuk pembinaan masyarakat yang berfokus pada pembangunan dan/atau pemeliharaan infrastruktur dengan alokasi dana berasal dari Laba Bersih Perseroan tahun 2009 sebesar 1%.

Pada tahun 2010, Perseroan telah melakukan penyaluran dana bantuan dalam bentuk :

1. Bantuan korban bencana alam secara tunai melalui Aksi Cepat Tanggap (ACT) Foundation, Dana Kemanusiaan Media Grup, dan Yayasan Dompet Dhuafa untuk membantu korban bencana alam nasional di daerah Wasior, Mentawai, dan Merapi.

The program is implemented by PKBL unit under coordination of the Corporate Secretary as the head of PKBL unit. The unit is divided into the following two sub-programs:

- a. Partnerships: sub-programs to increase small business resilience and competence to become strong and independent through utilizing funds out of the Company's profits.
- b. Community Development: empowerment of social condition of a society through utilizing funds out of the Company's profits.

Referring to 2010 Annual GMS, it had been approved to implement the PKBL by focusing on Community Development Programs ("BL"). Therefore, the Company has implemented a BL program in the form of community development focusing on development and/or maintenance of infrastructure facilities using funds allocated from the Company's Net Profit in 2009 for the amount of 1%.

In 2010, PT SMI has distributed the aid in the form of:

1. Cash money for victims of natural disasters in Wasior, Mentawai, and Mount Merapi through Aksi Cepat Tanggap (ACT) Foundation, Dana Kemanusiaan Media Group, and Dompet Dhuafa Foundation to help victims of national disasters.



Tanggung Jawab Sosial Perseroan

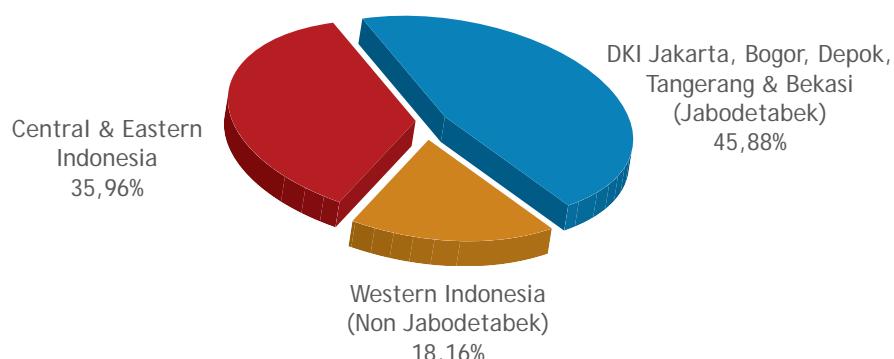


2. Bantuan pendidikan dan/atau pelatihan berupa gaji guru dan lain-lain di daerah Bantar Gebang Bekasi.
3. Bantuan peningkatan kesehatan, melalui program bantuan pembangunan MCK di daerah Ciawi dan Tanah Sereal, Bogor dan pembangunan jaringan air bersih di daerah Grobongan, Jawa Timur dan Kota Sorong, Papua.
4. Bantuan pengembangan prasarana dan/atau sarana umum pembangunan jalan desa & saluran air di Kampung Nelayan Pesisir Pakis, Kab. Karawang, Jawa Barat.

Adapun lokasi penyebaran bantuan program BL adalah sebagai berikut:

2. Educational and/or training assistance in the form of salaries for teachers and others purposes in Bantar Gebang Bekasi.
3. Health improvement by building toilet and bathing facilities in Ciawi and Tanah Sereal Bogor and clean/drinking water ways in Grobongan, East Java and in Sorong, Papua.
4. Infrastructure development assistance and/or public facilities construction by building roads and drains for fisherman village in Pakis Karawang West Java.

Location of BL Program is in the following chart:



Corporate Social Responsibility

• Kegiatan CSR Lainnya

Untuk kegiatan sosial yang langsung dilaksanakan oleh Manajemen dan karyawan Perseroan adalah dalam bentuk Buka Puasa Bersama Anak Yatim pada bulan Ramadhan dan pemberian bantuan bagi korban bencana alam Gunung Merapi.

Buka Puasa dilaksanakan di kantor Perseroan dengan mengundang anak-anak yatim piatu dari Yayasan Muhammadiyah Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Pemberian bantuan untuk korban bencana alam Gunung Merapi diberikan dalam bentuk alat-alat rumah tangga, buku-buku untuk perpustakaan dan peralatan bermain (*playground*) bagi *shelter* yang dibangun oleh Aksi Cepat Tanggap (ACT) Foundation dan berlokasi di Desa Hargobinangun, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

Perseroan berharap bantuan yang diberikan dapat membantu meningkatkan kualitas hidup komunitas lokal dan masyarakat sekitar serta menopang kehadiran Perseroan di tengah-tengah masyarakat.



• Other CSR Activities

Social activities conducted directly by the Management and employees of the Company includes Buka Puasa together with orphans during Ramadhan month and aiding victims of Mount Merapi eruption.

Buka Puasa was held in PT SMI's office by inviting orphans from Yayasan Muhammadiyah Tanah Abang, Central Jakarta.

The donations for victims of Mount Merapi eruption are in the form of household appliances, books for libraries and a playground for shelter, built by ACT Foundation, located in the Hargobinangun Village, Sleman, Yogyakarta.

We hope that by providing necessary donations, PT SMI can improve the living standards of local communities and its society and upholds the presence of the Company as well.



Tanggung Jawab Pelaporan Perseroan Responsibility for Annual Reporting

Laporan Tahunan ini berikut Laporan Keuangan dan informasi lain yang terkait merupakan tanggung jawab Manajemen PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) dan dijamin kebenarannya oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi dengan membubuhkan tandatangannya masing-masing di bawah ini.

This Annual Report and the accompanying Financial Statements and related financial information are under the responsibility of PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) and have been approved by all members of the Board of Commissioners and Board of Directors whose signatures appear below.

Dewan Komisaris
Board of Commissioners

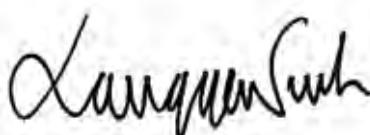


Ngalim Sawega
Komisaris Utama
President Commissioner

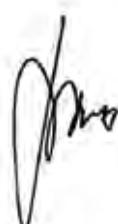
Direksi
Board of Directors



Emma Sri Martini
Direktur Utama
President Director



Langeng Subur
Komisaris
Commissioner



Frans Nembo Sukardi
Direktur
Director



Wahyu Utomo
Komisaris
Commissioner



Farida Astuti
Direktur
Director



Perseroan berupaya untuk memberikan kontribusi yang optimum bagi percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia

The company strives to deliver optimum contribution in order to accelerate infrastructure development in Indonesia

Data Perseroan

Profil Dewan Komisaris



Ngalim Sawega

Komisaris Utama
President Commissioner

Menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak Februari 2009. Bapak Ngylim Sawega kini juga menjabat sebagai Sekretaris Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Sebelumnya Bapak Ngylim Sawega menjabat sebagai Kepala Biro Perbankan, Pembiayaan dan Penjaminan, Bapepam-LK dari tahun 2005 - 2006. Beliau juga pernah menjabat sebagai Direktur Perbankan dan Usaha Jasa Pembiayaan pada Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan, Kementerian Keuangan.

Memperoleh gelar Master of Science pada tahun 1992 dalam bidang Ekonomi dari University of Illinois, USA dan gelar Sarjana Hukum dari Universitas Indonesia pada tahun 1988.

He has been the President Commissioner of the Company since February 2009. Mr. Ngylim Sawega is also the Secretary of the Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency (Bapepam-LK), Republic of Indonesia. Previously, Mr. Ngylim Sawega served as the Head of the Banking, Financing and Guarantee Bureau, Bapepam-LK from 2005 to 2006. He also served as the Director of Banking and Financing Services at the Directorate General of Financial Institutions, Ministry of Finance.

He obtained his Master of Science in Economics from the University of Illinois, USA in 1992 and Master degree in Law from the Faculty of Law, University of Indonesia in 1988.

Corporate Data

Profile of Board of Commissioners

Langgeng Subur

Komisaris
Commissioner

Menjabat sebagai Anggota Dewan Komisaris Perseroan sejak Februari 2009. Bapak Langgeng Subur kini juga menjabat sebagai Kepala Pusat Pembinaan Akuntan dan Jasa Penilai, Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Sebelumnya Bapak Langgeng Subur menjabat sebagai Kepala Pusat Investasi Pemerintah dari tahun 2007 – 2010, dan beliau pernah bertugas pada Direktorat Pengelolaan Dana Investasi, Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara, serta bertugas pada Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan.

Memperoleh gelar Master of Business Administration (MBA) dari University of New Orleans, Louisiana, AS, pada tahun 1992 dan memperoleh gelar Akuntan dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN), Jakarta, Indonesia pada tahun 1988.



He has been the Commissioner of the Company since February 2009.

Mr. Langgeng Subur is also the Head of Accounting and Appraisal Supervisory Center, Ministry of Finance, Republic of Indonesia. Earlier Mr. Langgeng Subur served as Head of the Government Investment Unit from 2007 until 2010, and he had served on the Directorate of Investment Fund Management, the Directorate General of State Treasury, and served in the Inspectorate General of Ministry of Finance.

He obtained his Master of Business Administration from the University of New Orleans, Louisiana, USA in 1992 and his Bachelor degree from the State College of Accounting (STAN) Jakarta in 1988.

Wahyu Utomo

Komisaris
Commissioner

Menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan sejak Februari 2009. Bapak Wahyu Utomo kini juga menjabat sebagai Asisten Deputi Urusan Perumahan pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia.

Memperoleh gelar PhD pada tahun 2002 dan Master of Science pada tahun 2000 dalam bidang Studi Wilayah dari Cornell University - USA, serta memperoleh gelar Sarjana Teknik Sipil dari Institut Teknologi Bandung pada tahun 1987.



He has been the Commissioner of the Company since February 2009. Mr. Wahyu Utomo is currently the Assistant Deputy Minister for Housing Development at the Coordinating Ministry for the Economy Affairs, the Republic of Indonesia.

He obtained his PhD in 2002 and Master of Science in 2000 in Regional Science from Cornell University, USA in 2002 and his Bachelor Degree in Civil Engineering from Bandung Institute of Technology in 1987.

Data Perseroan

Profil Direksi



Emma Sri Martini

Direktur Utama
President Director

Menjabat sebagai Direktur Utama Perseron sejak Februari 2009. Sebelumnya Ibu Emma Sri Martini adalah Direktur Keuangan dan Dukungan Kerja PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) (2004-2009), Komisaris PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (2004-2009), Senior Vice President (2002-2004), Assistant Vice President - Group Head (1998-2001) Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dan PT Kustodian Depositori Efek Indonesia / Indonesian Clearing and Depository System (1993-1998) yang merupakan salah satu Self Regulatory Organization (SRO) di pasar modal Indonesia.

Memperoleh gelar Sarjana Teknik Informatika dari Institut Teknologi Bandung pada tahun 1993.

She has been the President Director of the Company since February 2009. Previously, Mrs. Emma Sri Martini was the Director of Finance and Support at PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) (2004-2009), Commissioner at PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (2004-2009), Senior Vice President (2002-2004) and Assistant Vice President - Group Head (1998-2001) of the Indonesian Bank Restructuring Agency (IBRA) and PT Kustodian Depositori Efek Indonesia/Indonesian Clearing and Depository System (1993-1998), one of the Self Regulatory Organizations (SRO) in the Indonesian capital market.

She obtained her bachelor degree in Informatics from Bandung Institute of Technology in 1993.

Corporate Data

Profile of Board of Directors

Frans Nembo Sukardi

Direktur
Director

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak Februari 2009. Sebelumnya Bapak Frans Nembo Sukardi menjabat sebagai Sekretaris Perusahaan PT Danareksa (Persero) dan bekerja sebagai Auditor di Inspektorat Jenderal, Departemen Keuangan (1985-1993).

Memperoleh gelar Master of Business Administration (MBA) pada University of New Orleans, Louisiana, AS, pada tahun 1992 dan Sarjana Akuntansi dari Universitas Airlangga, Surabaya, Indonesia, pada tahun 1984.

He has been appointed as Director of the Company since February 2009. Previously, Mr. Frans Nembo Sukardi served as the Corporate Secretary of PT Danareksa (Persero) and worked as an auditor at the Inspectorate General, Ministry of Finance (1985-1993).

He obtained his Master of Business Administration (MBA) from the University of New Orleans, Louisiana, USA in 1992 and Bachelor of Accountancy from the University of Airlangga, Surabaya, Indonesia in 1984.



Farida Astuti

Direktur
Director

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak Februari 2009. Sebelumnya Ibu Farida Astuti menjabat sebagai Assistant Vice President PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) serta Anggota Komite Audit PT Garuda Indonesia (Persero) (2008-2009). Beliau juga pernah menjabat sebagai Assistant Vice President, Team Leader pada Divisi Internal Audit, Badan Penyehatan Perbankan Nasional (1999-2004).

Memperoleh gelar Master of Business Administration (MBA) dari Cleveland State University, Ohio, AS, pada tahun 1994 dan gelar Sarjana dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN), Jakarta, Indonesia, pada tahun 1990.



She has been appointed as Director of the Company since February 2009. Previously, Mrs. Farida Astuti served as Assistant Vice President of PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) and Member of the Audit Committee of PT Garuda Indonesia (Persero) (2008-2009). She also served as Assistant Vice President, Team Leader of the Internal Audit Division, Indonesian Bank Restructuring Agency (IBRA) (1999-2004).

She obtained her Master of Business Administration (MBA) from Cleveland State University, Ohio, USA in 1994 and Bachelor degree from the State College of Accounting (STAN) Jakarta in 1990.

Data Perseroan

Profil Komite Audit & Sekretaris Dewan Komisaris Profile of Audit Committee & Secretary of Board of Commissioners



Langgeng Subur
Ketua Komite Audit
Chairman of Audit Committee

Sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan, Bapak Langgeng Subur juga menjadi Ketua Komite Audit Perseroan sejak November 2009.
(Profil lengkap Bapak Langgeng Subur dapat diperoleh di bagian Data Perseroan Dewan Komisaris dalam Laporan Tahunan ini.)

As a member of the Board of Commissioners, Mr. Langgeng Subur has also been the Chairman of the Audit Committee since November 2009
(Mr. Langgeng Subur's complete profile can be read at the Corporate Data of the Board of Commissioners in this Annual Report).



Tri Achmadi
Anggota Komite Audit
Member of Audit Committee

Menjabat sebagai Anggota Komite Audit Perseroan sejak November 2009. Bapak Tri Achmadi kini juga menjabat sebagai Kepala Sub Bagian Pengembangan Sistem dan Aplikasi, Bagian Sistem Informasi Pengawasan Inspektorat Jenderal pada Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Memperoleh gelar Magister Manajemen (MM) dari Universitas Bina Nusantara, Jakarta pada tahun 2007 dan lulus dari Program Diploma IV Sekolah Tinggi Akuntansi Negara pada tahun 2001. Beliau tercatat sebagai pemegang sertifikat CISA dan CIA.

He has been a member of the Audit Committee since November 2009. Mr. Tri Achmadi currently also serves as Head of Subdivision of System Development and Monitoring, Information System Application at the Inspectorate General of Ministry of Finance, Republic of Indonesia.

He obtained his Master of Management (MM) degree from Bina Nusantara University, Jakarta in 2007, and graduated from Diploma IV/S1 from State College of Accounting (STAN) in 2001. He is listed as a holder of CISA and CIA certificates.

Corporate Data

Profil Komite Audit & Sekretaris Dewan Komisaris Profile of Audit Committee & Secretary of Board of Commissioners



Dedhi Suharto

Anggota Komite Audit
Member of Audit Committee

Menjabat sebagai Anggota Komite Audit Perseroan sejak November 2009. Bapak Dedhi Suharto kini juga menjabat sebagai Auditor Inspektorat Jenderal pada Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Memperoleh gelar Magister Akuntansi (M.Ak) dari Universitas Indonesia, Jakarta pada tahun 2008 dan lulus dari program Diploma IV/S1 Sekolah Tinggi Akuntansi Negara pada tahun 1999. Beliau tercatat sebagai pemegang Sertifikat CISA dan CIA.

He has been a member of the Audit Committee since November 2009. Mr. Dedhi Suharto also serves as Auditor at Inspectorate General of the Ministry of Finance, Republic of Indonesia.

He obtained his Master of Accounting (M.Ak) from University of Indonesia, Jakarta in 2008, and graduated from Diploma IV/S1 program of State College of Accounting (STAN) in 1999. He is listed as a holder of CISA and CIA certificates.



Nuning S. R. Wulandari

Sekretaris Dewan Komisaris
Secretary of the Board of Commissioners

Menjabat sebagai Sekretaris Dewan Komisaris Perseroan sejak Oktober 2009 hingga Desember 2010, Ibu Nuning SR Wulandari kini juga menjabat Tenaga Pengkaji Restrukturisasi, Privatisasi, dan Efektifitas Kekayaan Negara Dipisahkan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Memperoleh gelar Master Business of Administration di bidang Finance dari University of Detroit, Michigan, USA pada tahun 1994 dan gelar Insinyur Pertanian Institut Pertanian Bogor, Bogor pada tahun 1987.

She has served as the Secretary of the Board of Commissioners from October 2009 to December 2010. Mrs. Nuning S.R. Wulandari is currently a Senior Advisor of Restructuring, Privatization and Effectiveness of Separated State Assets, Directorate General of State Assets, Ministry of Finance, Republic of Indonesia.

She obtained her Master of Business Administration in Finance from University of Detroit, Michigan, USA in 1994 and Bachelor of Agricultural from Bogor Agricultural Institute, Bogor in 1987.

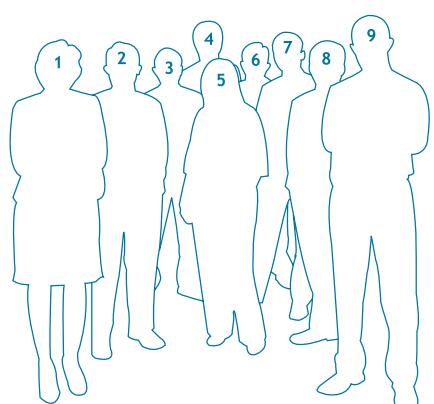
Data Perseroan

Corporate Data

Kepala Divisi Division Head



- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. Aradita Priyanti | Kepala Divisi Pengendalian Fasilitas Pembiayaan/
Plt. Kepala Divisi Administrasi dan Kustodi
Head of Facility Monitoring/
Head of Administration and Custody, (Ad Interim) |
| 2. Syahrial Noviananta | Kepala Divisi Akuntansi
Head of Accounting |
| 3. David Widianto | Kepala Divisi Keuangan
Head of Finance |
| 4. Edwin Syahruzad | Kepala Divisi Pembiayaan dan Investasi I
Head of Financing and Investment I |
| 5. Astried Swastika | Kepala Divisi Sekretariat Perusahaan
Head of Corporate Secretary |
| 6. Iman Nurrohman | Kepala Divisi Audit Internal
Head of Internal Audit |
| 7. Faaris Pranawa | Kepala Divisi Hukum, Penelitian dan Pengembangan
Head of Legal, Research & Business Development |
| 8. Wismanto Bimam K. | Kepala Divisi Manajemen Risiko
Head of Risk Management |
| 9. Cipto Adi Utomo | Kepala Divisi Dukungan Kerja
Head of Support |



Profil Akuntan Publik

Profile of Public Accountant

Menutup tahun buku 2010, Perseroan telah menyelesaikan proses audit yang dilaksanakan oleh KAP Kanaka Puradiredja, Suhartono.

Alamat:

The Royal Palace
Jl. Prof. Dr. Soepomo No. 178A-C 29
Jakarta 12810 - Indonesia
Tel: 62-21-8313861
Fax: 62-21-83113871
Web: <http://www.kanaka.co.id>

Sebagai Perseroan yang baru memulai masa operasinya di tahun 2009, penunjukan KAP ini merupakan penunjukan kedua kalinya bagi Perseroan untuk melakukan audit tahun buku 2010.

By the end of the fiscal year 2010, the Company has completed the audit process conducted by KAP Kanaka Puradiredja, Suhartono

Address:

The Royal Palace
Jl. Prof. Dr. Soepomo No. 178A-C 29
Jakarta 12810 - Indonesia
Tel: 62-21-8313861
Fax: 62-21-83113871
Web: <http://www.kanaka.co.id>

As Company started its operations in 2009, the appointment of this Public Accountant Office is the second appointment to conduct independent audit for 2010 fiscal year.

Alamat Kantor Perseroan

Company Address

Gedung BRI II, Lantai 29, Suite 2905
Jl. Jend. Sudirman Kav. 44-46
Jakarta 10210
Indonesia
Tel: 62-21-57851313
Fax: 62-21-5709460
Email: corporatesecretary@ptsmi.co.id
Web: www.ptsmi.co.id

Laporan Keuangan



Financial Statement



Kami percaya
bahwa
infrastruktur
yang baik akan
meningkatkan
perekonomian
Indonesia

We have a firm
believe that good
infrastructure
will further
Indonesia's
remarkable
economy



KANAKA PURADIREDJA
SUHARTONO

Public Accountants, Tax and
Business Advisory Services

A member of



PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR

Laporan Keuangan / Financial Statements

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010
dan untuk periode 10 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009

For the year ended 31 December 2010
and for the 10 months period ended 31 December 2009
Beserta/ And

**LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN/
INDEPENDENT AUDITORS' REPORT**

DAFTAR ISI**CONTENTS**

Halaman/
Page

Laporan Auditor Independen*Independent Auditors' Report***Pernyataan Direksi***Director' Statements***Laporan Keuangan***Financial Statements*

Neraca

1

Balance Sheets

Laporan Laba Rugi

2

Statement of Income

Laporan Perubahan Ekuitas

3

Statement of change in shareholders' equity

Laporan Arus Kas

4

Statement of cash flows

Catatan atas Laporan Keuangan

5 - 50

Notes to the Financial Statements

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

Ref.: R-148/SMI/AU/II/2011

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

The Shareholders, Boards of Commissioners and Directors

PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR (PERSERO)

Kami telah mengaudit neraca PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) ("Perusahaan") tanggal 31 Desember 2010 dan 2009, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dan untuk periode 10 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009. Kami juga melakukan pengujian atas kepatuhan Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan pengendalian intern. Laporan keuangan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan pengendalian intern adalah tanggung jawab manajemen Perusahaan. Tanggung jawab kami terletak pada pernyataan pendapat atas laporan keuangan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan pengendalian intern berdasarkan audit kami.

Kami melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan Institut Akuntan Publik Indonesia dan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara yang diterbitkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan, atas dasar pengujian, bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Selain itu, audit mencakup pengujian atas kepatuhan Perusahaan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh

We have audited the accompanying balance sheet of PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) ("the Company") as of 31 December 2010 and 2009, and the related statements of income, changes in shareholders' equity and cash flows for the year ended 31 December 2010 and for the 10 months period ended 31 December 2009. We have also examined the Company's compliance with certain laws and regulations and internal control. These financial statements, compliance with laws and regulations and internal control are the responsibility of the Company's management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements, compliance with laws and regulations and internal control based on our audit.

We conducted our audits in accordance with the auditing standards established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants and State Financial Audit Standards established by The Audit Board of The Republic of Indonesia. These standards require that we plan and perform the audits to obtain reasonable assurance whether the financial statements are free of material misstatements. An audit includes examining, on a test basis, the evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and the significant estimates made by the management as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.

In addition, the audit cover the examination of the Company's compliance with the laws and regulations that has direct and material effect on



IKANAKA PURADIREDJA, SUHARTONO

Public Accountants, Tax and Business Advisory Services

langsung dan material terhadap penyajian laporan keuangan serta kepatuhan terhadap pengendalian intern. Kami yakin bahwa audit kami memberikan dasar memadai untuk menyatakan pendapat.

Menurut pendapat kami, laporan keuangan yang kami sebut di atas menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) tanggal 31 Desember 2010 dan 2009, dan hasil usaha, serta arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dan untuk periode 10 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

Seperti yang diungkapkan dalam Catatan 30 atas laporan keuangan, secara efektif pada 1 Januari 2010, Perusahaan menerapkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.50 (Revisi 2006) "Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan" dan PSAK 55 (Revisi 2006), Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran".

Laporan kami atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan pengendalian intern, kami sampaikan secara terpisah kepada Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi dalam laporan kami nomor: RD-043/SMI/AU/II/2011 dan RD-044/SMI/AU/II/2011 tanggal 28 Februari 2011.

financial statements presentation and compliance with the internal control. We believe that our audits provide a reasonable basis for our opinion.

In our opinion, the financial statements referred to above present fairly, in all material respects, the financial position of PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) as of 31 December 2010 and 2009, and the results of its operations and its cash flows for the year ended 31 December 2010 and for the 10 months period ended 31 December 2009, in conformity with accounting principles generally accepted in Indonesia.

As disclosed in Note 30 to the financial statements, effective 1 January 2010, the Company adopted Statement of Financial Accounting Standards (SFAS) No.50 (Revised 2006) "Financial Instruments: Presentation and Disclosures" and SFAS No.55 (Revised 2006), Financial Instruments: Recognition and Measurement".

Our report on the Company's compliance with the laws and regulations and internal control, we submitted separately to the Shareholders, Boards of Commissioners and Directors in our report number RD-043/SMI/AU/II/2011 and RD-044/SMI/AU/II/2011 dated 28 February 2011.



Suhartono, MPA, Ak., BAP/K

NIAP 02.1.0819

28 Februari 2011 / 28 February 2011

The accompanying financial statements are not intended to present the financial positions, results of operations and cash flows in accordance with accounting principles and practices generally accepted in countries and jurisdictions other than Indonesia. The standards, procedures and practices to audit such financial statements are those generally accepted and applied in Indonesia.

PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR (PERSERO)

NERACA

Per 31 Desember 2010 dan 2009

Dinyatakan dalam Rupiah

BALANCE SHEETS

As of 31 December 2010 and 2009

Expressed in Rupiah

	2010	Catatan/ Notes	2009	
ASET				ASSETS
Aset lancar				Current assets
Kas dan setara kas	1,137,733,671,965	2c, 4	950,787,321,700	<i>Cash and cash equivalents</i>
Efek - efek	188,913,182,078	2d, 5	50,148,154,503	<i>Securities</i>
Pinjaman yang diberikan	59,529,806,966	2d, 6	49,073,112,716	<i>Loans</i>
Piutang pendapatan bunga	4,310,635,667	7	4,035,287,608	<i>Interest receivable</i>
Pajak dibayar di muka	1,791,848,763	2j, 17	142,870,092	<i>Prepaid taxes</i>
Aset lancar lainnya	17,693,427,110	8	4,058,214,215	<i>Other current assets</i>
Jumlah aset lancar	1,409,972,572,549		1,058,244,960,834	Total current assets
Aset tidak lancar				Non - current assets
Pinjaman jangka panjang yang diberikan	112,510,273,120	2d, 6	-	<i>Long term loans</i>
Convertible Subordinated Loan	559,700,000,000	2d, 9	-	<i>Convertible Subordinated Loan</i>
Penyertaan	34,066,029,370	2e, 10	-	<i>Investment</i>
Aset tetap				Fixed assets
Harga perolehan	3,026,515,685	2f, 11	1,715,377,425	<i>At Cost</i>
Akumulasi penyusutan aset tetap	(669,575,299)		(199,606,795)	<i>Accumulated depreciation of fixed assets</i>
Jumlah Aset tetap-bersih	2,356,940,386		1,515,770,630	Total fixed assets-net
Aset tak berwujud				Intangible assets
Harga perolehan	331,337,897		251,810,882	<i>At Cost</i>
Akumulasi amortisasi aset tak berwujud	(67,604,052)	2g, 12	(14,591,012)	<i>Accumulated amortization of intangible assets</i>
Jumlah aset tak berwujud-bersih	263,733,845		237,219,870	Total intangible assets-net
Aset lain-lain	891,837,136	13	246,114,786	<i>Other assets</i>
Aset pajak tangguhan	1,106,393,070	2j, 17	3,436,703,386	<i>Deferred tax assets</i>
Jumlah aset tidak lancar	710,895,206,926		5,435,808,672	Total non-current assets
JUMLAH ASET	2,120,867,779,475		1,063,680,769,506	TOTAL ASSETS
KEWAJIBAN DAN EKUITAS				LIABILITIES AND EQUITY
Kewajiban lancar				Current liabilities
Hutang pajak	1,022,894,117	2j, 17	803,916,466	<i>Taxes payable</i>
Beban yang masih harus dibayar	3,801,887,033	14	4,016,211,039	<i>Accrued expenses</i>
Pendapatan diterima dimuka	-	15	550,000,000	<i>Deferred income</i>
Hutang lain - lain	16,493,989,500	16	-	<i>Other payables</i>
Jumlah kewajiban lancar	21,318,770,650		5,370,127,505	Total current liabilities
Kewajiban tidak lancar				Non-current liabilities
Kewajiban imbalan pasca kerja	1,187,841,724	2k, 18	326,530,059	<i>Employee benefits</i>
Jumlah kewajiban tidak lancar	1,187,841,724		326,530,059	Total non-current liabilities
JUMLAH KEWAJIBAN	22,506,612,374		5,696,657,564	TOTAL LIABILITIES
EKUITAS				EQUITY
Modal saham - nominal Rp1.000.000 per lembar (4.000.000 saham).				<i>Share capital - par value Rp1,000,000 per share (4,000,000 shares).</i>
Modal di tempatkan dan disetor penuh 1.000.000 saham	1,000,000,000,000	19	1,000,000,000,000	<i>Authorized, subscribed and fully paid 1,000,000 shares</i>
Tambahan modal disetor	1,000,000,000,000	20	-	<i>Paid in capital</i>
Laba komprehensif lainnya	-		148,154,503	<i>Other comprehensive income</i>
Cadangan Umum	5,783,595,744		-	<i>Reserve</i>
laba ditahan	51,474,002,121		-	<i>Retained earning</i>
Laba bersih periode berjalan	41,103,569,236		57,835,957,439	<i>Net profit for the period</i>
JUMLAH EKUITAS	2,098,361,167,101		1,057,984,111,942	TOTAL EQUITY
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	2,120,867,779,475		1,063,680,769,506	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR (PERSERO)

LAPORAN LABA RUGI

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010
dan untuk periode 10 bulan yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2009

STATEMENTS OF INCOME

*For the year ended 31 December 2010 and for
the period 10 months ended 31 December 2009*

Dinyatakan dalam Rupiah

Expressed in Rupiah

	2010	Catatan/ Notes	2009	
PENDAPATAN USAHA	82,114,586,085	22	72,820,106,470	REVENUE
BEBAN USAHA	(31,821,783,613)	23	(18,470,787,438)	OPERATING EXPENSES
LABA USAHA	50,292,802,472		54,349,319,032	OPERATING PROFIT
PENDAPATAN/ (BEBAN) LAIN-LAIN				OTHER INCOME/(EXPENSES)
Pendapatan non operasional	1,028,600,945	24	123,488,446	<i>Non-operating income</i>
Beban non operasional	(151,422,235)	25	(73,553,425)	<i>Non-operating expenses</i>
Pendapatan lain-lain - bersih	877,178,710		49,935,021	<i>Other income - net</i>
				PROFIT (LOSS) FROM SUBSIDIAR COMPANY
LABA (RUGI) PERUSAHAAN ASOSIASI	(6,233,970,630)	26	-	
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN	44,936,010,552		54,399,254,053	PROFIT BEFORE INCOME TAX
TAKSIRAN PAJAK PENGHASILAN				PROVISION FOR INCOME TAX
Pajak kini	(1,502,131,000)		-	<i>Current tax</i>
Pajak tangguhan	(2,330,310,316)	2j, 17	3,436,703,386	<i>Deferred tax</i>
	(3,832,441,316)		3,436,703,386	
LABA BERSIH	41,103,569,236		57,835,957,439	NET PROFIT

PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR (PERSERO)

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010
dan untuk periode 10 bulan yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2009

Dinyatakan dalam Rupiah

						<i>Expressed in Rupiah</i>
	Modal ditempatkan dan disetor penuh/ <i>Authorized and Fully Paid Share Capital</i>	Tambahan setoran modal/ <i>Paid in capital</i>	Saldo Laba/ komprehensif/ <i>Retained earnings</i>	Laba Cadangan umum / komprehensif/ <i>Reserve</i>	Jumlah ekuitas/ Total equity	
Notes						
Setoran modal	19	1.000.000.000,000	-	-	1.000.000.000,000	<i>Paid up capital</i>
Laba bersih periode berjalan	-	-	57,835,957,439	-	57,835,957,439	<i>Net profit for the period</i>
Laba komprehensif lainnya	-	-	-	148,154,503	148,154,503	<i>Other comprehensive income</i>
Saldo per 31 Desember 2009		1.000.000.000,000	57,835,957,439	148,154,503	1.057,984.111,942	<i>Balance as of 31 December 2009</i>
Tambahan setoran modal	20	-	1.000.000.000,000	-	1.000.000.000,000	<i>Paid up capital</i>
Laba komprehensif lainnya	-	-	(148,154,503)	-	(148,154,503)	<i>Other comprehensive income</i>
Cadangan umum	21	-	(5,783,595,744)	-	5,783,595,744	<i>Reserve</i>
Alokasi untuk Program Bina Lingkungan	21	-	(578,359,574)	-	(578,359,574)	<i>Allocation for Community Development Program</i>
Laba bersih periode berjalan	-	-	41,103,569,236	-	41,103,569,236	<i>Net profit for the period</i>
Saldo per 31 Desember 2010		1.000.000.000,000	1.000.000.000,000	92,577,571,357	5,783,595,744	<i>Balance as of 31 December 2010</i>

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan ini/
See the accompanying notes to financial statements which form an integral part of these financial statements.

PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR (PERSERO)

LAPORAN ARUS KAS

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010
dan untuk periode 10 bulan yang berakhir pada tanggal
31 Desember 2009

STATEMENTS OF CASH FLOWS

*For the year ended 31 December 2010 and for
the period 10 months ended 31 December 2009*

Dinyatakan dalam Rupiah

Expressed in Rupiah

	2010	2009	
Arus Kas dari Aktivitas Operasi			Cash Flows from Operating Activities
Penerimaan bunga pinjaman	34,700,567,748	474,041,668	interest loan received
Penerimaan provisi	1,940,000,000	627,272,727	Cash receipts from provision
Penerimaan bunga deposito	34,029,122,192	66,521,962,481	interest deposit received
Penerimaan dari pelunasan	99,119,486,021	-	Cash receipts from settlement
Penyaluran pinjaman	(206,225,527,752)	(49,073,112,716)	Cash disbursements for loan
Pembayaran beban operasional	(28,692,839,224)	(17,565,482,403)	Cash disbursements for operating expenses
Pembayaran uang jaminan	-	(49,656,452)	Cash disbursement for deposits
Kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya	(16,493,989,500)	-	Restricted cash and cash equivalent
Arus kas bersih yang diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas operasi	(81,623,180,515)	935,025,305	Net cash flows provided from (used for) operating activities
Arus Kas dari Aktivitas Investasi			Cash Flows from Investing Activities
Penerimaan hasil investasi surat berharga	9,940,164,705	1,711,541,985	Cash receipts from securities
Penjualan Investasi jangka pendek	50,000,000,000	-	Sales of securities
Pembelian Investasi jangka pendek	(188,913,182,078)	(50,000,000,000)	Purchase of securities
Pembelian aset tetap dan aset tidak berwujud	(1,879,092,274)	(1,859,245,590)	Acquisitions of fixed assets and intangible assets
Penyertaan jangka panjang	(40,300,000,000)	-	Long term investment
Penyaluran CSL	(559,700,000,000)	-	Cash disbursements for CSL
Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi	(730,852,109,647)	(50,147,703,605)	Net cash flows used in investing activities
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan			Cash Flows from Financing Activities
Tambahan setoran modal	1,000,000,000,000	1,000,000,000,000	Paid in capital
Penyaluran dana untuk Program Bina Lingkungan	(578,359,574)	-	Cash disbursements for Community Development Program
Arus kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan	999,421,640,426	1,000,000,000,000	Net cash flows provided from financing activities
Kenaikan Bersih Kas dan Setara Kas	186,946,350,265	950,787,321,700	Net Increase in Cash and Cash Equivalents
Kas dan Setara Kas pada Awal Tahun	950,787,321,700	-	Cash and Cash Equivalents at the beginning of the Year
Kas dan Setara Kas pada Akhir Tahun	1,137,733,671,965	950,787,321,700	Cash and Cash Equivalents at the End of the Year

PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR (PERSERO)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dan untuk
periode 10 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009

Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

For the year ended 31 December 2010 and for the 10 months period ended
31 December 2009

Expressed in Rupiahs, unless otherwise stated

1. UMUM

a. Pendirian dan informasi umum

PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) "Perusahaan" adalah Perusahaan Perseroan yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2007, kemudian dirubah dengan Peraturan Pemerintah No. 75 Tahun 2008, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Akta Pendirian Perusahaan No. 17 tanggal 26 Februari 2009 dari Notaris Lolani Kurniati Irdham - Idroes, SH, LLM. Maksud dan tujuan serta kegiatan Perusahaan adalah untuk mendorong percepatan penyediaan pembiayaan infrastruktur melalui kemitraan dengan pihak swasta dan/atau lembaga keuangan multilateral.

Untuk melakukan maksud tersebut di atas, Perusahaan melaksanakan kegiatan pembiayaan infrastruktur dan investasi sebagai berikut:

- 1) Kerja sama dengan pihak swasta, Badan Usaha Milik Negara, Pemerintah Daerah, maupun lembaga keuangan multilateral, dalam rangka pendirian perusahaan yang khusus bergerak di bidang pembiayaan infrastruktur;
- 2) Kegiatan pembiayaan kepada badan hukum lain berupa penyertaan modal maupun pinjaman terkait bidang infrastruktur;
- 3) Pengembangan kemitraan dan/atau kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka mendorong percepatan pembangunan infrastruktur;
- 4) Penyediaan jasa pendukung untuk investor baik investor domestik maupun investor asing seperti konsultasi investasi dan aktivitas lainnya untuk mewujudkan peningkatan investasi dalam bidang infrastruktur;
- 5) Kegiatan penelitian dan pengembangan serta sosialisasi terkait kegiatan infrastruktur;
- 6) Pengelolaan dana dalam rangka optimalisasi dana pembiayaan infrastruktur;
- 7) Kegiatan lainnya terkait upaya percepatan pembangunan infrastruktur.

1. GENERAL

a. Establishment and general information

PT Sarana Multi Infrastructure (Persero) "Company" was established under Government Regulation no. 66 Year 2007, which was amended by the Government Regulation no. 75 Year 2008, having its Deed of Establishment No. 17 dated 26 February 2009 from Notary Lolani Kurniati Irdham - Idroes, SH, LLM. The purpose, objectives and activities of the Company is to accelerate provision of infrastructure financing through partnerships with the private sector and / or multilateral financial institutions.

To perform the above-mentioned purposes, the Company carries out the following infrastructure financing activities and investments:

- 1) *Developing strong partnership with private sectors, State-Owned Enterprises, Government, and other local, foreign , or multilateral financial institution in establishing an infrastructure financing company;*
- 2) *Financing activities to other legal entity either capital investment or loan related to infrastructure industry;*
- 3) *Promoting public private partnership scheme to accelerate infrastructure development in Indonesia;*
- 4) *Providing any supporting services either for domestic or foreign investors such as investment advisory and other related activities to improve investment in infrastructure;*
- 5) *Conducting research and development activities and socialization in infrastructure industry;*
- 6) *Managing idle funds through various investment instruments to optimize return of the investment portfolio;*
- 7) *Other activities related efforts to accelerate infrastructure development.*

PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR (PERSERO)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dan untuk
periode 10 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009

Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

For the year ended 31 December 2010 and for the 10 months period ended
31 December 2009

Expressed in Rupiahs, unless otherwise stated

1. UMUM (Lanjutan)

Dalam melaksanakan kegiatan tersebut di atas, Perusahaan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan No. 100/PMK.010/2009 tentang Pembiayaan Infrastruktur. Sebagaimana dipersyaratkan dalam PMK tersebut, Perusahaan telah memperoleh izin usaha (*Business License*) sebagai perusahaan Pembiayaan Infrastruktur pada tanggal 12 Oktober 2009 sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 396/KMK.010/2009.

b. Anak perusahaan dan perusahaan asosiasi

Perusahaan mempunyai kepemilikan langsung pada perusahaan asosiasi yaitu PT *Indonesia Infrastructure Finance* ("PT IIF"), dengan porsi kepemilikan 40,30% senilai Rp40.3 Miliar (nilai perolehan awal)

PT IIF didirikan oleh Perusahaan bersama-sama dengan *Asian Development Bank (ADB)*, *International Finance Corporation (IFC)*, dan *Deutsche Investitions und Entwicklungsgesellschaft mbH (DEG)* pada tanggal 15 Januari 2010. Penyetoran modal sejumlah Rp 100 miliar dilaksanakan pada tanggal 22 April 2010 setelah terpenuhinya syarat-syarat penyetoran modal, sebagaimana telah disepakati dalam *Founders Agreement* yang merupakan perjanjian di antara para pemegang saham pendiri.

PT IIF bertempat kedudukan di Jakarta yang bergerak dalam bidang usaha Pembiayaan Infrastruktur.

c. Susunan Komisaris , Direksi Perusahaan dan karyawan

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Nomor : 43/KMK.06/2009, tanggal 23 Februari 2009 telah diangkat anggota Dewan Komisaris dengan susunan sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Ngalim Sawega
Komisaris	:	Langgeng Subur
Komisaris	:	Wahyu Utomo

1. GENERAL (Continued)

In carrying out the aforementioned activities, the Company adheres to the Minister of Finance Regulation No. 100/PMK.010/2009 on Infrastructure Financing. As required by the above regulation, the Company received its Business License as Infrastructure Finance Company on 12 October 2009 as stated in the Minister of Finance Decree No. 396/KMK.010/2009.

b. Subsidiary and associate company

The Company has a direct ownership in associate Companies, PT *Indonesia Infrastructure Finance* ("PT IIF"), with 40.30% share ownership worth Rp 40.3 billion (initial value).

PT IIF was established by the Company together with the Asian Development Bank (ADB), International Finance Corporation (IFC), and Deutsche Investitions und Entwicklungsgesellschaft mbH (DEG) on 15 January 2010. Injected capital amounting to Rp 100 billion was held on 22 April 2010 after the fulfillment of the requirements capital injection, based on the Founders Agreement which an agreement among the founding shareholders,

PT IIF is domiciled in Jakarta which is engaged in infrastructure financing.

c. Composition of the board of commissioners, board of directors and employees

Based on the Decree of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia, Number: 43/KMK.06/2009, dated 23 February 2009, the appointed members of the Board of Commissioners are as follows :

Board of Commissioners

President Commissioner
Commissioner
Commissioner

PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR (PERSERO)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dan untuk
periode 10 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009

Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

For the year ended 31 December 2010 and for the 10 months period ended
31 December 2009

Expressed in Rupiahs, unless otherwise stated

1. UMUM (Lanjutan)

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Nomor : 42/KMK.06/2009, tanggal 23 Februari 2009 telah diangkat anggota Dewan Direksi dengan susunan sebagai berikut :

Dewan Direksi

Direktur Utama	:	Emma Sri Martini	:	Board of Directors
Direktur Operasi	:	Frans Nembo Sukardi	:	<i>President Director</i>
Direktur Manajemen Risiko, Keuangan dan Dukungan Kerja	:	Farida Astuti	:	<i>Operation Director</i>

Pada tanggal 31 Desember 2010 dan 2009, Perusahaan memiliki karyawan sebanyak 33 dan 26 orang.

Based on the Decree of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia, Number: 42/KMK.06/2009, dated 23 February 2009, the appointed members of the Board of Directors are as follows :

Board of Directors

President Director

*Risk Management, Finance and
Supporting Unit Director*

As of 31 December 2010 and 2009, the Company has 33 and 26 employees, respectively.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI

Berikut ini adalah ikhtisar kebijakan akuntansi pokok yang diterapkan Perusahaan dalam penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

a. Dasar penyusunan laporan keuangan

Laporan keuangan disusun berdasarkan prinsip kesinambungan usaha dan mengikuti konvensi harga perolehan historis serta atas dasar akrual, kecuali untuk laporan arus kas.

Laporan arus kas disusun menggunakan metode langsung dengan mengklasifikasikan arus kas atas dasar aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Seluruh angka dalam laporan keuangan ini disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain.

2. SUMMARY OF THE SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

The following is a summary of the significant accounting policies applied in preparing the Company's financial statements in accordance with the Indonesian generally accepted accounting principles .

a. Basis of preparation of financial statements

The financial statements were prepared based on the principle of business continuity (going concern) and conform to the convention of historical cost and also on the accrual basis , except for the statement of cash flows.

The statement of cash flows present cash receipts and payments classified on the basis of operating, investing and financing activities.

All figures presented in the notes to the financial statements are stated in Rupiah unless otherwise stated.

PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR (PERSERO)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dan untuk periode 10 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

For the year ended 31 December 2010 and for the 10 months period ended 31 December 2009

Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain

Expressed in Rupiahs, unless otherwise stated

b. Periode akuntansi

Periode akuntansi normal Perusahaan adalah 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Periode akuntansi tahun 2010 dan 2009 adalah tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2010 dan tanggal 3 Maret sampai dengan 31 Desember 2009.

Pembukuan Perusahaan diselenggarakan dalam mata uang Rupiah. Transaksi dalam mata uang selain Rupiah dibukukan ke dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs transaksi. Pada tanggal neraca, aset dan kewajiban moneter dalam mata uang selain Rupiah dijabarkan ke dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada tanggal tersebut yaitu:

<u>Mata uang</u>	<u>31/12/2010</u>	<u>31/12/2009</u>	<u>Currencies</u>
1 Dolar Amerika	Rp8,991	Rp9,400	US Dollar 1

Keuntungan atau kerugian selisih kurs yang timbul dari transaksi dalam mata uang asing dan penjabaran aktiva dan kewajiban moneter dalam mata uang asing diakui pada laporan laba rugi tahun berjalan.

b. Accounting period

The normal operating cycle of the Company's Accounting period is from 1 January to 31 December. The accounting period for 2010 and 2009 is from 1 Januari to 31 Desember 2010 and from 3 March to 31 Desember 2009.

The Company maintains its accounting records in Rupiah. Transactions in currencies other than Rupiah are recorded at the rates of exchange in effect on the date of the transactions. At the balance sheet date, all monetary assets and liabilities in foreign currencies are translated into Rupiah using Bank Indonesia's middle exchange rate prevailing at that date as follows:

c. Kas dan setara kas

Kas dan setara kas mencakup kas, simpanan yang sewaktu-waktu bisa dicairkan, dan investasi jangka pendek likuid lainnya dengan jangka waktu jatuh tempo sampai dengan tiga bulan.

c. Cash and cash equivalents

Cash and cash equivalents includes cash on hand, deposits held on call and other short-term highly liquid investment with original maturities of three months .

d. Aset keuangan dan kewajiban keuangan

Aset keuangan Perusahaan terdiri dari kas dan setara kas, deposito berjangka, pinjaman yang diberikan, piutang pendapatan bunga, Convertible Subordinated Loan dan penyertaan. Kewajiban keuangan Perusahaan yaitu biaya yang masih harus dibayar.

d. Financial assets and liabilities

The Company's financial assets consist of cash and cash equivalents, time deposits, loans, interest income, Convertible Subordinated Loan and investment. The Company's financial liabilities are accrued expenses.

PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR (PERSERO)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dan untuk periode 10 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009

Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

For the year ended 31 December 2010 and for the 10 months period ended
31 December 2009

Expressed in Rupiahs, unless otherwise stated

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (*Lanjutan*)

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") No. 50 (Revisi 2006) "Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan" dan PSAK No. 55 (Revisi 2006) "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran" berlaku untuk laporan keuangan yang periodenya dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2010.

Dampak penerapan awal PSAK No. 50 (Revisi 2006) dan PSAK No. 55 (Revisi 2006) dijelaskan pada Catatan 34.

Aset keuangan - Klasifikasi

Perusahaan mengklasifikasikan aset keuangan dalam kategori sebagai berikut (i) aset keuangan yang nilai wajarnya diakui melalui laporan laba rugi, (ii) pinjaman dan piutang, (iii) aset keuangan yang dimiliki hingga jatuh tempo, dan (iv) aset keuangan yang tersedia untuk dijual. Klasifikasi ini tergantung pada tujuan saat aset keuangan tersebut diperoleh. Manajemen menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada saat pengakuan awal.

- (i) Aset keuangan yang nilai wajarnya diakui melalui laporan laba rugi

Aset keuangan yang nilai wajarnya diakui di laporan laba atau rugi adalah aset keuangan yang diklasifikasikan sebagai aset untuk diperdagangkan. Sebuah aset keuangan diklasifikasikan sebagai aset untuk diperdagangkan jika diperoleh terutama untuk tujuan penjualan atau pembelian kembali dalam waktu dekat dan terdapat bukti yang menunjukkan latar belakang untuk mengambil keuntungan jangka pendek.

- (ii) Pinjaman dan Piutang

Pinjaman dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan yang tidak terpengaruh oleh pasar aktif. Pinjaman dan piutang awalnya diakui sebesar nilai wajar ditambah biaya transaksi dan selanjutnya diukur sebesar biaya perolehan yang diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

**2. SUMMARY OF THE SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(Continued)**

Statement of Financial Accounting Standards ("PSAK") No. 50 (2006 Revision) "Financial Instruments: Presentation and Disclosure" and PSAK No. 55 (2006 Revision) "Financial Instruments: Recognition and Measurement" are applicable to financial statements for the periods beginning on or after January 1, 2010.

The effect of first adoption of PSAK No. 50 (2006 Revision) and PSAK No. 55 (2006 Revision) are stated in Notes 34.

Financial assets - Classification

The company classifies financial assets into the following categories (i) financial assets at fair value are recognized through profit or loss, (ii) loans and receivables, (iii) held to maturity financial assets, and (iv) financial assets available for sale . The classification depends on the purpose for which the financial assets were acquired. Management determines the classification of financial assets at initial recognition.

- (i) *Financial assets at fair value through profit or loss*

Financial assets at fair value that recognized in the profit or loss are financial assets classified as assets to be traded. A financial asset is classified as an asset to be traded if it is obtained primarily for the purpose of sale or purchase in the near future and there is an evidence to suggest the motive to take a short-term advantage.

- (ii) *Loans and Receivables*

Loans and receivables are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments that are not quoted in an active market. Loans and receivables are initially recognized at fair value plus transaction costs and subsequently measured at amortized cost using the effective interest rate method.

PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR (PERSERO)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dan untuk
periode 10 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009

Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

For the year ended 31 December 2010 and for the 10 months period ended
31 December 2009

Expressed in Rupiahs, unless otherwise stated

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (*Lanjutan*)

(iii) Aset keuangan yang dimiliki hingga jatuh tempo

Aset keuangan yang dimiliki hingga jatuh tempo adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran dan jatuh tempo yang tetap serta telah ditentukan dimana manajemen Perusahaan memiliki maksud positif dan kemampuan untuk memiliki hingga jatuh tempo, selain:

- a. aset keuangan Perusahaan yang nilai wajarnya diakui melalui laporan laba rugi;
- b. aset keuangan Perusahaan yang tersedia untuk dijual; dan
- c. aset keuangan yang memenuhi definisi sebagai pinjaman dan piutang.

Aset keuangan ini pada awalnya diakui sebesar nilai wajar termasuk biaya transaksi dan kemudian diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menerapkan metode suku bunga efektif.

(iv) Aset keuangan yang tersedia untuk dijual

Aset keuangan yang tersedia untuk dijual adalah aset keuangan yang dimaksudkan untuk dimiliki hingga jangka waktu yang tak terbatas, yang dapat dijual untuk memenuhi kebutuhan likuiditas atau perubahan suku bunga, nilai tukar, atau yang tidak diklasifikasikan sebagai pinjaman dan piutang, aset keuangan yang dimiliki hingga jatuh tempo atau aset keuangan yang nilai wajarnya diakui melalui laporan laba rugi.

Aset keuangan yang tersedia untuk dijual pada awalnya diakui sebesar nilai wajar, ditambah biaya transaksi, dan kemudian diukur dengan nilai wajar keuntungan dan kerugian yang diakui pada laporan perubahan ekuitas, kecuali untuk kerugian akibat penurunan nilai dan keuntungan dan kerugian selisih kurs, sampai aset keuangan tersebut tidak lagi diakui.

**2. SUMMARY OF THE SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(Continued)**

(iii) *Held to maturity financial assets*

Held to maturity financial assets are non-derivative financial assets with fixed payments or determinable that the Company's management has the positive intention and ability to hold to maturity, other than:

- a those that the Company's upon initial recognition designates as at fair value through profit or loss;*
- b those that the Company's designates as available for sale; and*
- c those that meet the definition of loans and receivables.*

These are initially recognized at fair value including transaction costs and subsequently measured at amortized cost, using the effective interest rate method.

(iv) *Available for sale financial assets*

Financial assets available for sale are financial assets that are held to an unlimited period of time, which can be sold to meet liquidity needs or changes in interest rates, exchange rates, or that are not classified as loans and receivables, financial assets held to maturity tempo or financial assets at fair value are recognized through the income statement.

Available for sale financial assets are initially recognized at fair value plus transaction costs and measured subsequently at fair value gains and losses being recognized in the statement of changes in equity, except for impairment losses and foreign exchange gains and losses, until the financial assets are derecognized.

PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR (PERSERO)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dan untuk
periode 10 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009

Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

For the year ended 31 December 2010 and for the 10 months period ended
31 December 2009

Expressed in Rupiahs, unless otherwise stated

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (*Lanjutan*)

Jika suatu aset keuangan yang tersedia untuk dijual mengalami penurunan nilai, maka akumulasi keuntungan atau kerugian yang sebelumnya telah diakui dalam laporan perubahan ekuitas, akan diakui dalam laporan laba rugi. Namun, bunga dihitung dengan menggunakan metode suku bunga efektif, dan keuntungan atau kerugian mata uang asing atas aset moneter yang diklasifikasikan sebagai aset tersedia untuk dijual diakui dalam laporan laba rugi interim.

Kewajiban keuangan - Klasifikasi

Perusahaan mengklasifikasikan kewajiban keuangan dalam kategori (i) kewajiban keuangan yang nilai wajarnya diakui melalui laporan laba rugi dan (ii) kewajiban keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

(i) Kewajiban keuangan yang nilai wajarnya diakui melalui laporan laba rugi

Kewajiban keuangan yang nilai wajarnya diakui melalui laporan laba rugi adalah kewajiban keuangan yang diklasifikasikan sebagai kewajiban yang diperdagangkan. Sebuah kewajiban keuangan diklasifikasikan sebagai kewajiban yang diperdagangkan jika diperoleh terutama untuk tujuan penjualan atau pembelian kembali dalam waktu dekat dan terdapat bukti yang menunjukkan latar belakang untuk mengambil keuntungan jangka pendek.

Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar derivatif yang dikelola dalam hubungannya dengan kewajiban keuangan yang dimaksud termasuk dalam "laba/rugi selisih kurs".

(ii) Kewajiban keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi

Kewajiban keuangan yang tidak diklasifikasikan sebagai kewajiban keuangan yang nilai wajarnya diakui melalui laporan laba rugi diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

**2. SUMMARY OF THE SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(Continued)**

If an available for sale financial assets is determined to be impaired, the cumulative gain or loss previously recognized in the statement of changes in equity is recognized in the income statement. However, interest is calculated using the effective interest rate method, and foreign currency gains or losses on monetary assets classified as available for sale are recognized in the interim statement of income.

Financial liabilities - Classification

The company classifies its financial liabilities into categories of (i) financial liabilities at fair value are recognized through profit or loss and (ii) financial liabilities measured at amortized cost.

(i) *Financial liabilities at fair value through profit and loss*

Financial liabilities at fair value through profit or loss are financial liabilities classified as held for trading. A financial liability is classified as held for trading if it acquired principally for the purpose of selling or repurchasing it in the near term and for which there is evidence of a recent actual pattern of short term profit taking.

Gains and losses arising from changes in the fair value derivatives that are managed in conjunction with designated financial liabilities are included in "foreign exchange gain / loss".

(ii) *Financial liabilities measured at amortized cost*

Financial liabilities that are not classified as fair value through profit and loss fall into this category and are measured at amortized cost.

PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR (PERSERO)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dan untuk
periode 10 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009

Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

*For the year ended 31 December 2010 and for the 10 months period ended
31 December 2009*

Expressed in Rupiahs, unless otherwise stated

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (*Lanjutan*)

Pengakuan

Pada saat pengakuan awal, aset keuangan atau kewajiban keuangan diukur pada nilai wajar ditambah biaya transaksi dan dikurangi pendapatan transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung atas perolehan aset keuangan atau penerbitan kewajiban keuangan (dikecualikan kelompok yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi setelah pengakuan awal). Pengukuran aset keuangan dan kewajiban keuangan setelah pengakuan awal tergantung pada klasifikasi aset keuangan dan kewajiban keuangan tersebut.

Biaya transaksi hanya meliputi biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk perolehan suatu aset keuangan atau penerbitan suatu kewajiban keuangan dan merupakan biaya tambahan yang tidak akan terjadi apabila instrumen keuangan tersebut tidak diperoleh atau diterbitkan. Untuk aset keuangan, biaya transaksi ditambahkan pada jumlah yang diakui pada awal pengakuan aset, sedangkan untuk kewajiban keuangan, biaya transaksi dikurangkan dari jumlah hutang yang diakui pada awal pengakuan kewajiban (sebelum tanggal 1 Januari 2010, biaya transaksi dicatat pada akun beban tangguhan dan bukan merupakan bagian dari piutang pembiayaan). Biaya transaksi tersebut diamortisasi selama umur instrumen berdasarkan metode suku bunga efektif dan dicatat sebagai bagian dari pendapatan pembiayaan untuk biaya transaksi sehubungan dengan aset keuangan dan sebagai bagian dari beban bunga untuk biaya transaksi sehubungan dengan kewajiban keuangan (sebelum tanggal 1 Januari 2010, amortisasi biaya transaksi dicatat sebagai bagian dari beban perolehan pembiayaan atau sebagai pengurang dari pendapatan pembiayaan, tergantung skema biaya transaksi).

Setelah pengakuan awal, pinjaman yang diberikan dan piutang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif, sedangkan aset keuangan tersedia untuk dijual yang tidak memiliki harga kuotasi dicatat pada biaya perolehan. Setelah pengakuan awal, kewajiban keuangan dicatat pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

**2. SUMMARY OF THE SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(Continued)**

Recognition

At the time of initial recognition, financial assets or financial liabilities measured at fair value plus transaction costs and reduced revenue transactions that are directly attributable to the acquisition of financial assets or issuance of financial liabilities (exclude groups that are measured at fair value through profit or loss from the initial recognition) . Measurement of financial assets and financial liabilities after initial recognition depends on the classification of financial assets and financial liabilities.

Transaction costs only include costs that are directly attributable to the acquisition of a financial asset or issuance of a financial liability and an additional cost that would not happen if the financial instruments are not obtained or issued. For financial assets, transaction costs added to the amounts recognized in the initial recognition of assets, while financial liabilities, transaction costs are deducted from the total liabilities recognized in the early recognition of liabilities (prior to January 1, 2010, transaction costs recorded in deferred charges and is not a part of receivables financing). Transaction costs are amortized over the life of the instrument based on an effective interest rate method and recorded as part of the revenue financing for the transaction costs in relation to financial assets and as part of interest expense for the transaction costs relating to financial liabilities (prior to January 1, 2010, amortization of transaction costs accounted for as part of the burden of financing the acquisition or as a reduction of financing revenue, depending on the scheme transaction costs).

After initial recognition, loans and receivables are recorded at amortized cost using the effective interest rate method, while the financial assets available for sale with no price quotations are recorded at cost. After initial recognition, financial liabilities are recorded at amortized cost using the effective interest rate method.

PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR (PERSERO)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dan untuk periode 10 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009

Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (*Lanjutan*)

Saat Pengakuan

Semua aset dan kewajiban keuangan pada awalnya diakui pada tanggal penyelesaian dimana Perusahaan menjadi suatu pihak dalam ketentuan kontraktual instrumen tersebut. Pembelian dan penjualan aset keuangan yang lazim (regular) juga diakui pada tanggal penyelesaian.

Penghentian Pengakuan

Penghentian pengakuan aset keuangan pada saat hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut kadaluwarsa, atau Perusahaan mentransfer seluruh hak untuk menerima arus kas kontraktual dari aset keuangan dalam transaksi dimana Perusahaan secara substansial telah mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan yang ditransfer. Setiap hak atau kewajiban atas aset keuangan yang ditransfer yang timbul atau yang masih dimiliki oleh Perusahaan diakui sebagai aset atau kewajiban secara terpisah.

Penghentian pengakuan kewajiban keuangan pada saat kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluwarsa.

Dalam transaksi dimana Perusahaan secara substansial tidak memiliki atau tidak mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan, Perusahaan menghentikan pengakuan aset tersebut jika Perusahaan tidak lagi memiliki pengendalian atas aset tersebut. Hak dan kewajiban yang timbul atau yang masih dimiliki dalam transfer tersebut diakui secara terpisah sebagai aset atau kewajiban. Dalam transfer dimana pengendalian atas aset masih dimiliki, Perusahaan tetap mengakui aset yang ditransfer tersebut sebesar keterlibatan berkelanjutan, yang ditentukan oleh besarnya perubahan nilai aset yang ditransfer.

Perusahaan menghapusbukukan saldo pinjaman yang diberikan pada saat Perusahaan menentukan bahwa aset tersebut tidak dapat ditagih lagi. Penerimaan atau pemulihan kembali atas aset keuangan yang telah dihapusbukukan diakui sebagai pendapatan lain-lain.

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

For the year ended 31 December 2010 and for the 10 months period ended 31 December 2009

Expressed in Rupiahs, unless otherwise stated

**2. SUMMARY OF THE SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(Continued)**

Recognition period

All assets and financial liabilities are initially recognized at the settlement date which the Company becomes a party to the contractual provisions of the instrument. Purchases and sales of financial assets are common (regular) were also recognized at the date of completion.

Derecognition

The financial assets derecognised when the contractual rights to receive the cash flows from financial assets are expired, or the Company transfers all rights to receive contractual cash flows of financial assets in a transaction where the Company substantially has transferred all the risks and rewards of ownership of financial assets transferred. Any rights or obligations on the transferred financial assets that arise or are still owned by the Company are recognized as assets or liabilities separately.

The financial liabilities derecognised when the obligation specified in the contract is released or canceled or expired..

In a transaction where the Company has substantially did not have or transfer all the risks and benefits of ownership of financial assets, the Company terminate the recognition of such assets if the company no longer has control over those assets. The rights and obligations arising or that still exists in the transfer are recognized separately as assets or liabilities. In transfers where control over the assets still owned, the Company continued to recognize the transferred assets in the amount of ongoing involvement, which is determined by the amount of change in value of the transferred assets.

The Company writes off outstanding loans at the time the Company determines that assets cannot be collected again. Proceeds or recovery of financial assets are recognized as other income.

PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR (PERSERO)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dan untuk
periode 10 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009

Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

For the year ended 31 December 2010 and for the 10 months period ended
31 December 2009

Expressed in Rupiahs, unless otherwise stated

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (*Lanjutan*)

Saling hapus instrumen keuangan

Aset keuangan dan kewajiban keuangan saling hapus dan nilai bersihnya disajikan dalam neraca jika, dan hanya jika, Perusahaan memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan bermiat untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan kewajibannya secara simultan.

Pendapatan dan beban disajikan dalam jumlah bersih hanya jika diperkenankan oleh standar akuntansi.

Pengukuran biaya perolehan diamortisasi

Biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan atau kewajiban keuangan adalah jumlah aset atau kewajiban keuangan yang diukur pada saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif dengan menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai awal dan nilai jatuh temponya, dan dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai.

Pengukuran nilai wajar

Perusahaan mengukur nilai wajar instrumen keuangan dengan menggunakan harga kuotasi di pasar aktif (jika tersedia) untuk instrumen keuangan tersebut. Suatu pasar dianggap aktif jika harga kuotasi sewaktu-waktu dan secara berkala tersedia dan mencerminkan transaksi pasar yang aktual dan teratur dalam suatu transaksi yang wajar.

Jika pasar untuk suatu instrumen keuangan tidak aktif, Perusahaan menentukan nilai wajar dengan menggunakan teknik penilaian.

Teknik penilaian mencakup penggunaan transaksi pasar terkini yang dilakukan secara wajar oleh pihak-pihak yang memahami, berkeinginan, dan jika tersedia, referensi atas nilai wajar terkini dari instrumen lain yang secara substansial sama, penggunaan analisa arus kas yang didiskonto dan penggunaan model penetapan harga opsi (*option pricing model*).

2. SUMMARY OF THE SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(Continued)

Offsetting financial instruments

Financial assets and financial liabilities are offset and the net amount presented in the balance sheet if, and only if, the Company has the legally enforceable right to offset the recognized amounts and there is an intention to settle on a net basis or to realize the asset and settle liability simultaneously.

Revenue and expenses are presented net only if permitted by accounting standards.

Amortized cost measurement

Cost is amortized from the financial assets or financial liabilities is the amount of assets or financial liabilities that measured at initial recognition minus principal payments, plus or minus by the cumulative amortization using the effective interest rate method, calculated from the difference between initial value and maturity value, and reduced by allowance of impairment losses.

Measurement of fair value

The Company measures the fair value of financial instruments using quoted prices in active markets (if available) for the financial instrument. A market is considered active if quoted prices at any time and regularly available and reflect the actual market transactions and regularly in a transaction that is fair.

If the market for a financial instrument is inactive, the Company determines fair value by using valuation techniques.

Valuation techniques include the use of the latest market transactions conducted properly by those who understand, desire, and if available, reference to the current fair value of another instrument which is substantially the same, the use of discounted cash flow analysis and the use of option pricing model .

PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR (PERSERO)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dan untuk
periode 10 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009

Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

For the year ended 31 December 2010 and for the 10 months period ended
31 December 2009

Expressed in Rupiahs, unless otherwise stated

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (*Lanjutan*)

Teknik penilaian yang dipilih memaksimalkan penggunaan input pasar, dan meminimalkan penggunaan taksiran yang bersifat spesifik dari Perusahaan, memasukkan semua faktor yang akan dipertimbangkan oleh para pelaku pasar dalam menetapkan suatu harga dan konsisten dengan metodologi yang dapat diterima dalam penetapan harga instrumen keuangan. Input yang digunakan dalam teknik penilaian secara memadai mencerminkan ekspektasi pasar dan ukuran atas faktor risiko dan pengembalian (*risk return*) yang melekat pada instrumen keuangan.

Bukti terbaik atas nilai wajar instrumen keuangan pada saat pengakuan awal adalah harga transaksi, yaitu nilai wajar dari pembayaran yang diberikan atau diterima, kecuali jika nilai wajar dari instrumen keuangan tersebut ditentukan dengan perbandingan terhadap transaksi terkini yang dapat diobservasi dari suatu instrumen yang sama atau berdasarkan suatu teknik penilaian yang variabelnya hanya menggunakan data dari pasar yang dapat diobservasi. Jika harga transaksi memberikan bukti terbaik atas nilai wajar pada saat pengakuan awal, maka instrumen keuangan pada awalnya diukur pada harga transaksi dan selisih antara harga transaksi dan nilai yang sebelumnya diperoleh dari model penilaian diakui dalam laporan laba rugi setelah pengakuan awal tergantung pada masing-masing fakta dan keadaan dari transaksi tersebut namun tidak lebih lambat dari saat penilaian tersebut didukung sepenuhnya oleh data pasar yang dapat diobservasi atau saat transaksi ditutup.

Nilai wajar mencerminkan risiko kredit atas instrumen keuangan dan termasuk penyesuaian yang dilakukan untuk memasukkan risiko kredit Perusahaan dan pihak lawan (*counterparty*), mana yang lebih sesuai. Taksiran nilai wajar yang diperoleh dari model penilaian akan disesuaikan untuk mempertimbangkan faktor-faktor lainnya, seperti risiko likuiditas atau ketidakpastian model penilaian, sepanjang Perusahaan yakin bahwa keterlibatan suatu pasar pihak ketiga akan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut dalam penetapan harga suatu transaksi.

2. SUMMARY OF THE SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(Continued)

The selected assessment techniques to maximize the use of market inputs, and minimize the use of a specific provision of the Company, include all the factors will be considered by traders in setting a price and is consistent with the methodology that is acceptable in the pricing of financial instruments. Inputs used in valuation techniques adequately reflect market expectations and measures of risk and return factors (risk return) embedded in financial instruments.

The best evidence of fair value of financial instruments at initial recognition is the transaction price, ie the fair value of payments made or received, except if the fair value of financial instruments is determined by comparison to recent market transactions, which can be observed from the same instrument or based on a valuation technique variables using only data from observable markets. If the transaction price provides the best evidence of fair value upon initial recognition, the financial instruments are measured initially at the transaction price and the difference between transaction price and the value previously obtained from the assessment model is recognized in profit or loss after initial recognition depends on the individual facts and circumstances of the transaction but not later than when the assessment is fully supported by observable market data or when the transaction is closed.

*The fair value reflects the credit risk on financial instruments and include adjustments made to incorporate the credit risk of the Company and the other party (*counterparty*), whichever is appropriate. Estimated fair value obtained from the assessment model will be adjusted to consider other factors, such as liquidity risk or uncertainty assessment model, as long as the Company believes that the involvement of a third party market would consider these factors in pricing a transaction.*

PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR (PERSERO)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dan untuk
periode 10 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009

Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

For the year ended 31 December 2010 and for the 10 months period ended
31 December 2009

Expressed in Rupiahs, unless otherwise stated

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (*Lanjutan*)

Identifikasi dan pengukuran cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN)

Mulai tanggal 1 Januari 2010, pada setiap tanggal neraca, Perusahaan mengevaluasi apakah terdapat bukti obyektif telah terjadinya penurunan nilai atas aset keuangan Perusahaan.

Aset keuangan mengalami penurunan nilai jika bukti obyektif menunjukkan bahwa peristiwa yang merugikan telah terjadi setelah pengakuan awal aset keuangan, dan peristiwa tersebut berdampak pada arus kas masa datang atas aset keuangan yang dapat diestimasi secara handal.

Bukti obyektif bahwa aset keuangan mengalami penurunan nilai meliputi wanprestasi atau tunggakan pembayaran oleh debitur, restrukturisasi pinjaman yang diberikan oleh Perusahaan dengan persyaratan yang tidak mungkin diberikan jika debitur tidak mengalami kesulitan keuangan, indikasi bahwa debitur akan dinyatakan pailit, atau data yang dapat diobservasi lainnya yang terkait dengan kelompok aset keuangan seperti memburuknya status pembayaran debitur dalam kelompok tersebut, atau kondisi ekonomi yang berkorelasi dengan wanprestasi atas aset dalam kelompok tersebut.

Perusahaan menentukan bukti penurunan nilai atas aset keuangan secara individual dan kolektif. Evaluasi penurunan nilai secara individual dilakukan terhadap aset keuangan yang signifikan secara individual.

Semua aset keuangan yang signifikan secara individual yang tidak mengalami penurunan nilai secara individual dievaluasi secara kolektif. Aset keuangan yang tidak signifikan secara individual akan dievaluasi secara kolektif untuk menentukan penurunan nilainya dengan mengelompokkan aset keuangan tersebut berdasarkan karakteristik risiko yang serupa. Aset keuangan yang dievaluasi secara individual untuk penurunan nilai dan dimana kerugian penurunan nilai diakui, tidak lagi termasuk dalam penurunan nilai secara kolektif.

2. SUMMARY OF THE SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

(Continued)

Identification and measurement of allowance for impairment loss (CKPN)

Starting January 1, 2010, at each balance sheet date, the Company evaluates whether there is objective evidence of impairment on the financial assets of the Company.

Financial assets are impaired if objective evidence indicates that adverse events have occurred after initial recognition of financial assets, and these events have an impact on future cash flows of financial assets that can be estimated reliably.

Objective evidence that financial assets are impaired involves default or arrears in payment by the borrower, restructuring of loans granted by the Company with terms that cannot be granted if the debtor is in financial difficulties, an indication that the debtor be declared bankrupt, or other observable data related with a group of financial assets such as worsening of the payment status of borrowers in the group, or economic conditions that correlate with defaults on assets in the group.

The company determines the evidence for decline in value of financial assets individually and collectively. Evaluation of impairment of individually made to the significant financial assets individually.

All significant financial assets that are not individually impaired individually evaluated collectively. Financial assets that are not significant on an individual basis will be evaluated collectively to determine the decline in value by classifying financial assets are based on similar risk characteristics. Financial assets are evaluated individually for impairment and where the impairment loss is recognized, no longer included in the impairment collectively.

PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR (PERSERO)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dan untuk periode 10 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009

Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

For the year ended 31 December 2010 and for the 10 months period ended
31 December 2009

Expressed in Rupiahs, unless otherwise stated

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (*Lanjutan*)

Kerugian penurunan nilai atas aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi diukur sebesar selisih antara nilai tercatat aset keuangan dengan nilai kini estimasi arus kas masa datang yang didiskonto menggunakan suku bunga efektif awal dari aset keuangan tersebut.

Perhitungan nilai kini dari estimasi arus kas masa datang atas aset keuangan dengan agunan (*collateralised financial asset*) mencerminkan arus kas yang dapat dihasilkan dari pengambilalihan agunan dikurangi biaya-biaya untuk memperoleh dan menjual agunan, terlepas apakah pengambilalihan tersebut berpeluang terjadi atau tidak. Kerugian yang terjadi diakui pada laporan laba rugi dan dicatat pada akun cadangan kerugian atas aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi. Pendapatan bunga atas aset keuangan yang mengalami penurunan nilai tetap diakui atas dasar suku bunga yang digunakan untuk mendiskonto arus kas masa datang dalam pengukuran kerugian penurunan nilai.

Ketika peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai diakui menyebabkan kerugian penurunan nilai berkurang, kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui harus dipulihkan dan pemulihannya tersebut diakui pada laporan laba rugi.

Estimasi nilai wajar

Perusahaan menggunakan beberapa teknik penilaian yang digunakan secara umum untuk menentukan nilai wajar dari instrumen keuangan dengan tingkat kompleksitas yang rendah. Input yang digunakan dalam teknik penilaian untuk instrumen keuangan di atas adalah data pasar yang dapat diobservasi.

Nilai wajar instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan di pasar aktif ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian. Perusahaan menggunakan metode diskonto arus kas dengan menggunakan asumsi-asumsi yang didasarkan pada kondisi pasar pada tanggal neraca yang kemudian digunakan untuk menentukan nilai wajar dari instrumen keuangan.

2. SUMMARY OF THE SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(Continued)

The impairment loss on financial assets are recorded at amortized cost is measured by the difference between the carrying value of financial assets with the present value of estimated future cash flows discounted using the financial asset's original effective interest rate .

Calculating the present value of estimated future cash flows of financial assets with collateral reflects the cash flows that can be generated from the acquisition of collateral less costs for obtaining and selling the collateral, regardless of whether the takeover is likely to happen or not. Loss is recognized in the income statement and is recorded in the reserve for possible losses on financial assets and are recorded at amortized cost. Interest income on financial assets that suffered permanent impairment is recognized based on the interest rate used for discounting future cash flows in the measurement of impairment losses.

When the incident that occurred after the impairment loss is recognized causing an impairment loss is reduced, any impairment loss previously recognized must be reversed and recovery is recognized in profit or loss.

Estimated fair value

The Company uses several assessment techniques that are used in general to determine the fair value of financial instruments with a low level of complexity. Inputs used in valuation techniques for financial instruments on the market data that can be observed.

The fair value of financial instruments not traded in active markets is determined using valuation techniques. The Company uses discounted cash flow method using assumptions based on market conditions at balance sheet date which are then used to determine the fair value of financial instruments.

PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR (PERSERO)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dan untuk
periode 10 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009

Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

For the year ended 31 December 2010 and for the 10 months period ended
31 December 2009

Expressed in Rupiahs, unless otherwise stated

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (*Lanjutan*)

e. Investasi dalam Saham

Investasi jangka panjang dalam bentuk penyertaan saham dengan persentase kepemilikan 20% atau lebih tetapi kurang dari 50% dan/atau Perusahaan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap operasi dan kebijakan keuangan perusahaan asosiasi dicatat dengan metode ekuitas. Penyertaan saham dinyatakan sebesar biaya perolehannya ditambah atau dikurangi bagian atas laba atau rugi bersih perusahaan asosiasi. Dividen yang diterima dicatat sebagai pengurang atas nilai penyertaan.

Jika bagian investor atas kerugian perusahaan asosiasi sama atau melebihi nilai tercatat dari investasi maka investasi dilaporkan nihil. Kerugian selanjutnya dicatat oleh investor apabila telah timbul kewajiban atau investor melakukan pembayaran kewajiban perusahaan asosiasi yang dijaminnya. Jika perusahaan asosiasi selanjutnya melaporkan laba, investor akan mengakui penghasilan setelah bagiannya atas laba menyamai bagiannya atas kerugian bersih yang belum diakui.

f. Aset tetap

Aset tetap dinyatakan berdasarkan harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus dengan tarif penyusutan untuk masing-masing aset sebagai berikut:

Server	20%
Peralatan kantor	20%
Perabotan kantor	20%
Partisi	20%

Nilai residu dan masa manfaat ekonomis aset tetap ditinjau kembali dan disesuaikan, jika perlu, pada setiap tanggal neraca.

Biaya-biaya setelah perolehan awal diakui sebagai bagian dari nilai tercatat aset tetap atau sebagai aset yang terpisah hanya apabila kemungkinan besar manfaat ekonomis sehubungan dengan aset tersebut di masa mendatang akan mengalir ke Perusahaan dan biaya perolehannya dapat diukur secara handal. Jumlah tercatat komponen yang diganti, dihapusbukan. Biaya pemeliharaan dan perbaikan lainnya dibebankan di laporan laba rugi pada saat terjadinya.

**2. SUMMARY OF THE SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(Continued)**

e. Stock investment

Long-term investments in shares of stock with ownership interest of 20% or more but less than 50% and / or the Company has a significant influence on operating and financial policies of associates are accounted for using the equity method. Investments in shares are stated at cost plus or minus the net earnings or net losses of associated companies. Dividends received are recorded as a reduction in the value of investments.

If the investors losses in an associate equals or exceeds the carrying amount of investment the investment is reported at nil value. Losses will be recorded by the investor if the investor has incurred obligations or made payments of guaranteed obligations of the association. If the associate subsequently reports profits, investors will recognize profits after its share of profits equals the share of net losses not recognized.

f. Fixed assets

Fixed assets are stated at historical cost less depreciation. The depreciation on fixed assets is calculated using the straight line method with the rate of depreciation for each assets are as follows:

Server	
Office equipment	
Office furniture	
Partitions	

The estimated useful lives and residual values are reviewed and adjusted , if necessary , every balance sheet date.

The costs after initial incurred subsequently to add to, replace part of, or service, an item of fixed assets, are recognized as asset if, and only if it is probable that future economic benefits associated with the item will flow to the entity and the cost of the item can reliably measured. The carrying value of changed component will be write-off. Other maintenance and service expense are charged in income statement as incurred.

PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR (PERSERO)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dan untuk periode 10 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009

Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

For the year ended 31 December 2010 and for the 10 months period ended
31 December 2009

Expressed in Rupiahs, unless otherwise stated

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (*Lanjutan*)

Perusahaan melakukan penelaahan atas kemungkinan adanya indikasi penurunan nilai aset. Apabila terdapat indikasi, Perusahaan mengestimasi nilai yang dapat diperoleh kembali dari aset, dan jika nilai tercatat dari aset lebih besar dari nilai yang dapat diperoleh kembali, nilai tercatat aset diturunkan menjadi sebesar nilai yang dapat diperoleh kembali, dimana nilai tersebut ditentukan sebagai nilai tertinggi antara harga jual bersih atau nilai pakai.

Aset dalam penyelesaian dinyatakan sebesar biaya perolehan. Akumulasi biaya perolehan akan dipindahkan ke masing-masing aset tetap yang bersangkutan pada saat selesai dan siap digunakan.

g. Aset tak berwujud

Aset tak berwujud berupa perangkat lunak komputer, diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus sesuai dengan taksiran masa manfaatnya selama 5 tahun.

h. Pengakuan pendapatan dan beban

Pendapatan diakui secara akrual. Pendapatan Operasional Perusahaan berasal dari pendapatan dari pinjaman yang diberikan, pendapatan hasil penyertaan dan pendapatan dari pengelolaan dana.

Beban diakui pada saat kejadian dan dicatat serta disajikan dalam laporan keuangan pada periode terjadinya.

Pendapatan dan beban bunga

Mulai tanggal 1 Januari 2010, pendapatan dan beban bunga diakui pada laporan laba rugi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran dan penerimaan kas dimasa datang selama perkiraan umur dari aset keuangan atau kewajiban keuangan (atau jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat) untuk memperoleh nilai tercatat bersih dari aset keuangan atau kewajiban keuangan.

**2. SUMMARY OF THE SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(Continued)**

Company conducted a review of the indications of asset impairment. If there were indications, the Company estimates the recoverable value of assets, and if the carrying value of an asset more than the recoverable value, the carrying value of assets was reduced to the recoverable value, where the value is determined as the highest value of the net sales price or useful value.

Asset in progress is recognized at cost. The accumulation of initial cost transferred to the respective fixed assets account when completed and ready for use.

g. Intangible Assets

Intangible assets such as computer software are amortized using the straight-line method in accordance with the estimated useful life of 5 years.

h. Revenues and expenses recognition

Revenue is recognized on an accrual basis. The Company operating income came from revenues from loans, investments and revenues from fund management.

Expenses are recognized at the time of the incident and recorded and presented in the financial statements in the period incurred.

Interest income and expense

Starting January 1, 2010, income and interest expense are recognized in the income statement using the effective interest rate method. Effective interest rate is the interest rate appropriately discounting the estimated cash payments and receipts in the future over the expected life of the financial asset or financial liability (or if more appropriate, use a shorter period) to obtain the net carrying value of financial assets or financial liabilities.

PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR (PERSERO)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dan untuk
periode 10 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009

Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

For the year ended 31 December 2010 and for the 10 months period ended
31 December 2009

Expressed in Rupiahs, unless otherwise stated

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (*Lanjutan*)

Pada saat menghitung suku bunga efektif, Perusahaan mengestimasi arus kas di masa datang dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam instrumen keuangan tersebut, namun tidak mempertimbangkan kerugian kredit di masa mendatang. Perhitungan suku bunga efektif mencakup biaya transaksi dan seluruh imbalan/provisi dan bentuk lain yang dibayarkan atau diterima yang merupakan bagian tak terpisahkan dari suku bunga efektif.

i. Provisi dan Komisi

Mulai tanggal 1 Januari 2010, pendapatan dan beban provisi dan komisi yang signifikan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari suku bunga efektif atas aset keuangan atau kewajiban keuangan, dimasukkan dalam pengukuran suku bunga efektif.

Pendapatan provisi dan komisi diakui pada saat penarikan pinjaman. Atas komitmen pinjaman yang tidak ada penarikan pinjaman, provisi dari komitmen pinjaman tersebut diakui berdasarkan metode garis lurus selama jangka waktu komitmen.

Sebelum tanggal 1 Januari 2010, pendapatan dan beban provisi dan komisi, termasuk yang berhubungan dengan kegiatan pemberian pinjaman dan/atau mempunyai jangka waktu tertentu dan jumlahnya signifikan, diakui sebagai pendapatan ditangguhkan/beban dibayar dimuka dan diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus selama jangka waktunya. Saldo pendapatan provisi dan komisi yang ditangguhkan dari pinjaman yang diselesaikan sebelum jatuh tempo, diakui sebagai pendapatan pada saat penyelesaian pinjaman.

Pendapatan dan beban provisi dan komisi yang tidak berkaitan langsung dengan jangka waktu tertentu diakui dalam laporan laba rugi pada saat terjadinya transaksi.

2. SUMMARY OF THE SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(Continued)

When calculating the effective interest rate, the Company estimates future cash flows considering all contractual requirements in financial instruments, but does not consider future credit losses. The calculation of effective interest rate includes transaction costs and all benefits / fees and other forms of consideration paid or received that form an integral part of the effective interest rate.

i. Provision and Commission

Starting January 1, 2010, revenues and expenses specifically significant fees and commissions are considered integral part of the effective interest rate on financial assets or financial liabilities and are included in the measurement of the effective interest rate.

Fees and commissions are recognized upon drawdown. Top loan commitment that no withdrawal of loan, fees from loan commitments are recognized using the straight-line method over the term of commitment.

Prior to January 1, 2010, revenues and fees and commissions, including those related to lending activities and / or related to a specific period and the amount are significant, are deferred / prepaid expenses and amortized using the straight-line method over the terms. The balance of fees and commission costs of borrowing, which were completed prior to maturity, are recognized as revenue upon completion of the loan.

Revenue and expenses of provision and commissions that are not directly related to specific period are recognized in profit or loss on the transaction.

PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR (PERSERO)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dan untuk
periode 10 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009

Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

*For the year ended 31 December 2010 and for the 10 months period ended
31 December 2009*

Expressed in Rupiahs, unless otherwise stated

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (*Lanjutan*)

j. Perpajakan

Beban pajak kini ditetapkan berdasarkan taksiran penghasilan kena pajak dalam tahun berjalan dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku.

Semua perbedaan temporer antara, jumlah tercatat aktiva dan kewajiban dengan dasar pengenaan pajak diakui sebagai pajak tangguhan. Pajak tangguhan diukur dengan tarif pajak yang berlaku saat ini. Koreksi terhadap kewajiban perpajakan diakui saat ketetapan pajak diterima atau jika mengajukan keberatan, pada saat keputusan atas keberatan tersebut telah ditetapkan.

k. Imbalan pasca kerja karyawan

Ketentuan mengenai pengakuan dan pencatatan transaksi yang terkait dengan pemberian imbalan pasca kerja kepada karyawan mengacu kepada PSAK No. 24 (Revisi 2004) dan Undang-undang No. 13/2003. Kewajiban dan beban diakui sebesar nilai kini kewajiban yang diestimasikan akan dibayarkan oleh Perusahaan kepada karyawan pada saat pasca kerja, setelah memperhitungkan beban bunga dan keuntungan / kerugian aktuarial serta biaya jasa lalu yang belum diperhitungkan. Berdasarkan PSAK No. 24 (Revisi 2004), beban yang disisihkan untuk imbalan pasca kerja menggunakan metode "projected unit credit". Keuntungan dan kerugian aktuarial diakui sebagai penghasilan atau beban apabila akumulasi keuntungan dan kerugian aktuarial bersih yang belum diakui pada akhir periode pelaporan sebelumnya melebihi 10% dari nilai imbalan pasti pada tanggal tersebut. Keuntungan atau kerugian tersebut diakui dengan metode garis lurus sepanjang prakiraan rata-rata sisa umur kerja para karyawan. Selanjutnya, biaya jasa lalu yang timbul dari penerapan program imbalan pasti atau perubahan dalam kewajiban imbalan kerja pada program imbalan pasti yang sudah ada, diharuskan untuk diamortisasi selama periode rata-rata sampai imbalan kerja tersebut menjadi hak atau *vested*.

2. SUMMARY OF THE SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(Continued)

j. Taxation

Current tax expense is determined based on the estimated taxable income for the year computed using the prevailing tax rates.

Deferred tax income is provided using the liabilities method, for all temporary differences arising between the tax bases of assets and liabilities and their carrying values for financial reporting purposes. Currently enacted tax rates are used to determine deferred tax income. Adjustment to taxation are recorded when an assessment is received or when the result of the appeal is determined.

k. Post-employment benefits

Recognition and recording of transaction policy related to post employee benefit is conducted according to PSAK No. 24 (Revision 2004) and Labor Law No. 13/2003. Liability and expense are accounted for current amount of liability which are estimated to be paid to employees after retirement and after considering interest expenses actuarial gains/losses past service cost. Under PSAK No. 24 (Revised 2004), the cost of providing employee benefits under the law is determined using the projected unit credit actuarial valuation method. Actuarial gains and losses are recognized as income or expense when the net cumulative unrecognized actuarial gains and losses for each individual plan at the end of the previous reporting year exceeded 10% of the defined benefit obligation at that date. These gains or losses are recognized on a straight line basis over the expected average remaining working lives of the employees. Further, past-service costs arising from the introduction of a defined benefit plan or changes in the benefit payable of an existing plan are required to be amortized over the period until the benefits concerned become vested.

PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR (PERSERO)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dan untuk
periode 10 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009

Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

For the year ended 31 December 2010 and for the 10 months period ended
31 December 2009

Expressed in Rupiahs, unless otherwise stated

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI (*Lanjutan*)

i. Transaksi dengan pihak hubungan istimewa

Perusahaan mempunyai transaksi dengan pihak hubungan istimewa. Definisi pihak hubungan istimewa yang dipakai adalah sesuai dengan PSAK No. 7, "Pengungkapan Pihak-Pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa". Seluruh transaksi yang material dengan pihak hubungan istimewa telah diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan.

m. Penggunaan estimasi

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia mengharuskan manajemen untuk membuat estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah aktiva dan kewajiban serta pengungkapan aktiva dan kewajiban kontinjensi pada tanggal laporan keuangan serta jumlah pendapatan dan beban selama periode pelaporan. Hasil yang sebenarnya dapat berbeda dengan jumlah yang diestimasi.

3. MANAJEMEN RESIKO

Perusahaan menyakini pendekatan *Enterprise Risk Management* sebagai pendekatan yang tepat dalam mengelola risiko-risiko perusahaan secara menyeluruhan, dimana pengelolaan risiko dilakukan secara efektif dan sistematis dalam kerangka kerja pengelolaan risiko yang memungkinkan adanya proses umpan balik yang berkesinambungan.

Pengelolaan risiko dilakukan melalui 5 (lima) tahapan proses pengelolaan, yaitu: komunikasi dan konsultansi, penentuan konteks, asesmen risiko, perlakuan risiko, serta monitoring dan reviu. Untuk itu telah disusun pedoman yang terdiri atas kebijakan dan prosedur yang merupakan bagian dari metodologi pengelolaan risiko sebagai komponen vital dalam penerapan pengelolaan risiko di Perusahaan. Secara operasional proses pengelolaan risiko perusahaan dilakukan oleh Divisi Manajemen Risiko (DMR).

**2. SUMMARY OF THE SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
(Continued)**

i. Transactions with related parties

The Company have transactions with related parties. The definition of related parties used is in accordance with PSAK No. 7, "Related Party Disclosures". All material transactions with related parties are disclosed in the notes to the financial statements.

m. Use of estimates

The preparation of financial statements in conformity with the Indonesian generally accepted accounting principles requires the management to make estimates and assumptions that affect the reported amounts of assets and liabilities and the disclosure of contingent assets and liabilities at the dates of the financial statements and the reported amounts of revenues and expenses during the reporting periods. Actual results could differ from those estimates.

3 RISK MANAGEMENT

Companies believe Enterprise Risk Management approach as the right approach in managing the risks the company as a whole, where risk management is done effectively and systematically in the risk management framework that allows for continuous feedback process.

Risk management is carried out through 5 (five) stages of the management process, namely: communication and consultation, establishing the context, risk assessment, risk treatment, monitoring and review. For that has been prepared which consists of policy guidelines and procedures that are part of the methodology of risk management as a vital component in the implementation of risk management in the Company. Operationally, risk management process conducted by Risk Management Division (DMR).

PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR (PERSERO)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dan untuk
periode 10 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009

Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

For the year ended 31 December 2010 and for the 10 months period ended
31 December 2009

Expressed in Rupiahs, unless otherwise stated

3. MANAJEMEN RESIKO (Lanjutan)

Pada area-area tertentu yang memiliki tingkat risiko yang signifikan seperti pemberian fasilitas pembiayaan infrastruktur, investasi / divestasi, treasury, penyediaan pendanaan, dan *balance sheet management*, Direksi telah membentuk Komite Investasi yang secara berkala melakukan pertemuan untuk membahas dan menganalisis berbagai risiko yang mungkin dihadapi Perusahaan.

Berikut adalah langkah-langkah peningkatan yang telah diterapkan oleh Perusahaan selama tahun 2010 dalam mengelola berbagai aspek risiko yang dihadapi.

Pengelolaan Risiko Kredit

Risiko kredit timbul sebagai akibat kegagalan pihak lawan transaksi (*counter party*) memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian pembiayaan yang telah disepakati dengan Perusahaan.

Berdasarkan data yang ada risiko kredit memiliki level risiko yang moderat. Hal ini merupakan suatu keniscayaan mengingat *core business* dari Perseroan adalah pembiayaan infrastruktur. Terhadap risiko kredit yang ada Perusahaan telah melakukan serangkaian langkah pengelolaan risiko kredit, meliputi:

- a. Penyempurnaan prosedur dan sistem manajemen risiko yang antara lain mengatur mengenai alur kerja proses pengelolaan kredit sehingga tercipta proses kredit yang efektif dan efisien.
- b. Pengembangan sistem pemeringkatan risiko internal yang lebih dikenal dengan *Internal Rating System (IRS)* yang memungkinkan Perusahaan mengukur dan menganalisa kelayakan debitur dan/atau proyek infrastruktur dengan menggunakan perangkat pengukuran yang konsisten serta memantau dan menjaga kualitas kredit termasuk pengembangan sejumlah *early warning indicator* untuk mendeteksi perubahan atas portofolio dan *counterparty*.
- c. Pengaktifan Komite Investasi yang dapat memberikan pandangan berimbang dan komprehensif kepada pejabat berwenang dalam memutuskan pemberian fasilitas pembiayaan dan investasi.

3 RISK MANAGEMENT (Continued)

In specific areas that has significant risk level, such infrastructure financing facilities, investment / divestment, treasury, providing funding and balance sheet management, the Board of Directors has established an Investment Committee which regularly meets to discuss and analyze the various risks that may face by the Company.

Following are the steps that have been applied by the Company during 2010 in managing various aspects of the risks faced.

Credit Risk Management

Credit risk arises as a result of the failure of the counter party to meet its obligations under the financing agreements that have been agreed by the Company.

Based on existing data of credit risk the Company has a moderate risk level. That is impossible considering the Company's core business is infrastructure financing. Regarding an existing credit risk, The Company has conducted a series of credit risk management measures, including:

- a. *Completion of procedures and risk management systems which include regulating the credit management process workflow process so as to create an effective and efficient credit.*
- b. *The development of internal risk rating systems better known as the Internal Rating System (IRS) which enables the Company to measure and analyze the feasibility of the debtor and / or infrastructure projects using a consistent measurement devices and monitoring and maintaining credit quality, including the development of early warning indicators to detect changes over portfolio and the counterparty.*
- c. *Activation of the Investment Committee to provide balanced and comprehensive view of the authorities in deciding on financing and investment facility.*

PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR (PERSERO)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dan untuk
periode 10 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009

Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

For the year ended 31 December 2010 and for the 10 months period ended
31 December 2009

Expressed in Rupiahs, unless otherwise stated

3. MANAJEMEN RISIKO (Lanjutan)

- d. Penerapan *Risk Based Pricing* perhitungan tingkat suku bunga ditetapkan berdasarkan risiko dimana struktur penetapan suku bunga dilakukan dengan memperhatikan peringkat obligasi korporat di pasar sekunder, memperhatikan tingkat bunga, reinvestasi, volatilitas nilai tukar, inflasi, politik, dan kejadian-kejadian lain yang memiliki pengaruh signifikan.

Pengelolaan Risiko Pasar

Risiko pasar adalah risiko yang timbul dari perubahan nilai tukar mata uang atau perubahan suku bunga, termasuk dalam hal ini perubahan nilai harga saham yang dapat merugikan Perusahaan.

Memperhatikan kondisi perusahaan dimana belum terdapat portofolio dalam mata uang asing dan portofolio treasury yang masih terkonsentrasi pada instrumen perbankan yang konservatif maka tingkat risiko pasar adalah rendah dengan pengendalian risiko yang dapat diandalkan.

Risiko pasar dikelola secara efektif melalui strategi investasi yang terukur dan terencana, kebijakan dan prosedur pengelolaan dana yang mengatur tahapan proses perencanaan, eksekusi sampai dengan monitoring dan pelaporan kepada Komite Investasi dan Direksi.

Terhadap asset perusahaan yang sensitif dengan pergerakan suku bunga seperti pembiayaan maka Komite Investasi secara berkala memantau perkembangan pasar dan menyesuaikan tingkat suku bunga yang diberikan, dengan memperhatikan tingkat risiko dan return yang optimal.

Pengelolaan Risiko Likuiditas

Risiko likuiditas timbul karena ketidakmampuan Perusahaan untuk menyediakan dana dalam jumlah yang memadai sehingga gagal melaksanakan pembayaran atas kewajiban dan/atau komitmen Perusahaan.

3 RISK MANAGEMENT (Continued)

- d. Application of Risk-Based Pricing interest rate calculation is based on the risk, whereby the structure of interest rates made by the rating of corporate bonds in the secondary market, considering the interest rate, reinvestment, exchange-rate volatility, inflation, politics, and other events that has a significant influence.

Market Risk Management

Market risk is the risk arising from changes in currency exchange rates or interest rate changes, including in this case the value of stock price changes that could harm the Company.

Noting the condition of the company where there are no portfolios in foreign currency and treasury portfolio has been concentrated on the banking instrument are conservative and the level of market risk is low with a reliable risk control.

Market risk is managed effectively through a strategy of measured and planned investment, funds management policies and procedures governing the stages of the process of planning, execution to monitoring and reporting to the Investment Committee and Board of Directors.

For the Company's assets that are sensitive to interest rate movements, such as financing , the Investment Committee regularly monitor market developments and adjust interest rates provided, taking into account the level of risk and optimal return.

Liquidity Risk Management

Liquidity risk arises due to the inability of the Company to provide funds in adequate amounts so that failed to undertake payment of the Company's obligations and / or the Company's commitment.

PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR (PERSERO)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dan untuk
periode 10 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009

Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

For the year ended 31 December 2010 and for the 10 months period ended
31 December 2009

Expressed in Rupiahs, unless otherwise stated

3. MANAJEMEN RESIKO (Lanjutan)

Fungsi pengelolaan kebutuhan likuiditas secara operasional dilakukan oleh Treasuri dengan menerapkan *Asset Liability Management* (ALM). Dengan memperhatikan kondisi keuangan perusahaan pada tahun 2010 dimana rasio likuiditas perusahaan masih cukup tinggi serta struktur sumber dana Perusahaan yang sepenuhnya merupakan penyertaan modal negara, maka tingkat risiko likuiditas perusahaan adalah rendah. Dengan memperhatikan hal tersebut maka pengelolaan risiko likuiditas dirasakan cukup dilakukan melalui mekanisme pelaporan keuangan, khususnya arus kas secara bulanan kepada Direksi.

Pengelolaan Risiko Operasional

Risiko operasional adalah risiko yang disebabkan ketidakcukupan dan atau tidak berfungsi proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem atau adanya masalah eksternal yang mempengaruhi pelaksanaan kegiatan usaha Perusahaan.

Selain itu, untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan dan penanganan risiko pada area-area tertentu, Direksi telah membentuk Komite Investasi yang secara berkala melakukan pertemuan untuk membahas dan menganalisis berbagai risiko yang mungkin dihadapi Perusahaan khususnya pada pemberian fasilitas pembiayaan infrastruktur, investasi/divestasi, treasury, penyediaan pendanaan, dan *balance sheet management*.

Manajemen resiko dilakukan dengan mengembangkan terlebih budaya sadar risiko pada seluruh jajaran Perusahaan, untuk kemudian diformalkan menjadi pedoman bagi semua unit kerja dalam menentukan tanggung jawab, akuntabilitas dan koordinasi proses kerja. Untuk itu pada semester 2 tahun 2010, Divisi Manajemen Risiko (DMR) bersama dengan Divisi Audit Internal (DAI) telah melakukan inisiasi analisa proses bisnis (*business process analysis*) dan menyusun Tugas Pokok & Fungsi Divisi sesuai dengan struktur organisasi Perusahaan yang baru (Mei 2010), sehingga dapat diwujudkan struktur tata kelola (*governance structure*) yang baik.

3 RISK MANAGEMENT (Continued)

The function of managing operational liquidity requirements are conducted by the Treasury by applying the Asset Liability Management (ALM). By considering the Company's financial condition in 2010 where the Company's liquidity ratio is still high and the structure of the source of the funds of the Company which fully represents the state capital participation, and the level of corporate liquidity risk is low. Considerately, the perceived liquidity risk management is conducted through the financial reporting mechanisms, particularly the cash flow on a monthly basis to the Directors.

Operational Risk Management

Operational risk is the risk that is caused by insufficient or inadequacy and or dysfunction of internal processes, human error, system failure or external problems affecting the implementation of the activities of the Company.

In addition to improve the effectiveness of the management and handling of risk in specific areas, the Board of Directors has established an Investment Committee which meets regularly to discuss and analyze the various risks that may face the Company particularly in the provision of infrastructure financing facilities, investment / divestment, treasury, providing funding and balance sheet management.

Risk management is done by developing a culture of risk awareness especially at all levels of the Company, to later be formalized into guidelines for all work units in determining the responsibility, accountability and coordination of work processes. Therefore in semester 2 of 2010, the Risk Management Division (DMR), along with the Internal Audit Division (DAI) has conducted the initiation of business process analysis and formulate Duty & Function Division in accordance with the new organizational structure of the Company (May 2010), in order to promote good corporate governance structure.

PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR (PERSERO)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dan untuk
periode 10 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009

Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

For the year ended 31 December 2010 and for the 10 months period ended
31 December 2009

Expressed in Rupiahs, unless otherwise stated

3. MANAJEMEN RISIKO (Lanjutan)

Analisa proses bisnis bertujuan untuk memberikan gambaran utuh kegiatan usaha Perusahaan, identifikasi aktivitas pembentuk kegiatan serta keterkaitannya dalam rangka menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi stakeholder. Tersedianya mapping proses bisnis akan meningkatkan kehandalan respon risiko sehingga dapat tercipta pengendalian risiko yang memadai.

Selanjutnya, terhadap seluruh proses bisnis yang ada, DMR bersama dengan divisi-divisi yang melaksanakan transaksi (*Risk Taking Divisions*) melakukan pengukuran dan menentukan kecukupan pengendalian dan atau bentuk respon risiko yang telah diterapkan.

Dalam tahun 2010, tingkat risiko operasional Perusahaan adalah rendah. Hal ini terkait dengan kondisi belum kompleksnya kegiatan usaha perusahaan, tidak ada kerugian (*loss event*) yang disebabkan oleh risiko operasional, dan tidak terjadinya pelanggaran yang signifikan terhadap ketentuan yang ada.

Untuk mempertahankan kecukupan pengendalian risiko operasional tetap pada tingkatan yang memadai serta mengelola peningkatan kualitas proses operasional secara berkelanjutan, DMR telah menetapkan langkah tindak sebagai berikut :

- a. Membangun sistem informasi risiko operasional, terdiri dari:
 - 1) *Loss Event Database (LED)* yaitu database mengenai jenis-jenis kerugian (*loss event*) yang pernah dialami oleh perusahaan akibat dari risiko operasional;
 - 2) *Risk Control Self Assessment (RCSA)* atau *Risk Register* yaitu alat untuk mendokumentasi risk assessment yang telah dilakukan. Alat tersebut akan menyajikan informasi antara lain jenis risiko, peluang dan dampak risiko, prioritas risiko, penanganan risiko, dan petugas yang bertanggungjawab (*officer in charge*), sehingga pengelolaan risiko akan lebih terarah, karena tahapan-tahapan pengelolaannya telah terdokumentasi.

3 RISK MANAGEMENT (Continued)

Analysis of business processes aims to provide an overall picture of business activities, the identification of building activity and its associated activities in order to create value-added (value added) for stakeholders. Availability of mapping business processes will increase the reliability of risk responses that can create sufficient risk control.

Furthermore, the entire business process, DMR together with the divisions that carry out the transaction (Risk Taking Divisions) take measurements and determine the adequacy of controls and risk responses or forms that have been applied.

In the year 2010, the level of operational risk is low. This is related to the complexity of the situation about the business, and there were no losses (loss event) caused by operational risk, and no significant violations of existing provisions.

To maintain the adequacy of operational risk control at adequate levels and manage the quality improvement of operational processes in a sustainable, DMR has set up measures as follows:

- a. *Developing operational risk information system, comprising:*
 - 1) *Loss Event Database (LED)* is a database on the types of losses (loss event) ever experienced by the Company resulting from operational risk;
 - 2) *Risk Control Self Assessment (RCSA) or Risk Register* is a tool for documenting the risk assessment made. The tool will provide information such as types of risks, opportunities and impact of risk, risk priorities, risk handling, and the person in charge (officer in charge), so that risk management will be more focused, because the stages of its management have been documented.

PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR (PERSERO)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dan untuk
periode 10 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009

Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

For the year ended 31 December 2010 and for the 10 months period ended
31 December 2009

Expressed in Rupiahs, unless otherwise stated

3. MANAJEMEN RESIKO (Lanjutan)

- b. Mengembangkan budaya risiko (*risk culture*), mengingat bahwa pengelolaan risiko harus diimplementasikan kepada setiap personil Perusahaan, dari jenjang yang paling bawah sampai dengan jenjang yang paling tinggi.

Pengelolaan Risiko Hukum

Risiko hukum timbul karena adanya kelemahan pengikatan perjanjian/kontrak, klaim, atau agunan, dan tuntutan atau gugatan hukum oleh pihak ketiga terhadap Perusahaan serta akibat perubahan ketentuan hukum, termasuk perubahan ataupun ketidadaan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Adapun pada tahun 2010, tingkat risiko hukum Perusahaan adalah rendah.

Risiko hukum dikelola dengan memastikan bahwa semua kegiatan dan hubungan antara Perusahaan dengan pihak ketiga telah sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta senantiasa menjaga kondisi yang melindungi kepentingan Perusahaan dari segi hukum.

Pengelolaan Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan timbul ketika Perusahaan tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku, sehingga berpotensi pada pengenaan denda, hukuman, atau rusaknya reputasi sebagai akibat ketidakmampuan Perusahaan memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku. Adapun pada tahun 2010, tingkat risiko kepatuhan Perusahaan adalah rendah.

Dalam rangka menerapkan manajemen risiko kepatuhan yang efektif, Perusahaan senantiasa melakukan identifikasi dan analisa faktor-faktor penyebab, yaitu dengan melakukan:

- a. Pemantauan terhadap setiap perubahan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta memastikan penerapannya di lingkungan Perusahaan.

3 RISK MANAGEMENT (Continued)

- b. Developing a culture of risk, given that risk management must be implemented to any personnel of the Company, from the lowest level to the highest level.

Legal Risk Management

Legal risk arises because of the weakness of the binding agreement / contract, or collateral, and claim or lawsuits by third parties against the Company and due to changes in legal provisions, including changes or absence of regulation and legislation in force. As of the year 2010, the Company's legal risk is low.

Legal risk is managed by ensuring that all activities and the relationship between the Company and third parties in accordance with the provisions of laws and legislation in force and continues to maintain conditions that protect the interests of the Company from a legal perspective.

Compliance Risk Management

Compliance risks arise when the Company does not comply with or implement legislation and other related provisions, which may potentially impose fines, penalties, or loss of reputation as a result of the inability of the Company to comply with the applicable provisions. As of the year 2010, the level of compliance risk is low.

In order to implement an effective compliance risk management, the Company continues to identify and analyze the factors that may cause it, through :

- a. Monitoring of any changes in regulations and legislation in force and ensure its implementation within the Company.

PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR (PERSERO)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dan untuk
periode 10 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009

Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

For the year ended 31 December 2010 and for the 10 months period ended
31 December 2009

Expressed in Rupiahs, unless otherwise stated

3. MANAJEMEN RESIKO (Lanjutan)

- b. Penilaian secara aktif dan berkala terhadap kecukupan pedoman (kebijakan dan prosedur) internal yang dimiliki oleh Perusahaan untuk memastikan kesesuaianya terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Melakukan identifikasi dan analisa kepatuhan atas skema pembiayaan atau aktivitas baru guna memastikan kepatuhannya terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Melakukan pemantauan kepatuhan terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Pengelolaan Risiko Strategis

Risiko strategis timbul dari adanya keputusan atau penerapan strategi Perusahaan yang kurang tepat atau kegagalan Perusahaan dalam merespon perubahan-perubahan eksternal.

Pengukuran risiko strategis dilakukan dengan dengan membandingkan indikator risiko strategis yaitu sasaran strategis yang ditetapkan dalam target kinerja Perseroan terhadap realisasi pencapaiannya. Risiko strategis dari perusahaan berada pada tingkat moderat.

Pengelolaan risiko strategis yang telah dilakukan oleh Perusahaan, antara lain:

- a. Menetapkan rencana strategis perusahaan yang tertuang dalam RKAP dan RJPP dimana indikator-indikator pentingnya telah dirangkumkan dalam Penilaian Kinerja Perusahaan (*Key Performance Indicator*) sebagai suatu Kontrak Manajemen.
- b. Melakukan pemantauan atas pelaksanaan rencana strategis secara berkala dengan memantau realisasi pencapaian dibandingkan dengan target kerja.

3 RISK MANAGEMENT (Continued)

- b. *Active and periodic assessment of the adequacy guidelines (policies and procedures) that are owned by the Company internally to ensure compliance with regulations and legislation in force.*
- c. *Identifying and analyzing compliance with financing scheme or a new activity to ensure compliance with regulations and legislation in force.*
- d. *Monitoring compliance with the rules and regulations.*

Strategic Risk Management

Strategic risk arises from the decision or the implementation of company strategies that are less precise or failure of the Company in responding to external changes.

Strategic risk measurement done by comparing the strategic risk indicators of strategic objectives set forth in the Company's performance targets against actual accomplishments. Strategic risks of the company are at moderate levels.

The Strategic risks that were made by the Company's, are as follows:

- a. *Setting the company's strategic plan set forth in CBP and RJPP where the importance of these indicators have been summarized in the Corporate Performance Assessment (Key Performance Indicators) as a Management Contract.*
- b. *To monitor the implementation of the strategic plan periodically to monitor the realization of achievement compared with the target job.*

PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR (PERSERO)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dan untuk
periode 10 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009

Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

For the year ended 31 December 2010 and for the 10 months period ended
31 December 2009

Expressed in Rupiahs, unless otherwise stated

3. MANAJEMEN RESIKO (Lanjutan)

- c. Melaksanakan Rapat Direksi dan Rapat Komisaris yang antara lain membahas kondisi perusahaan termasuk permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan dan langkah strategis yang harus dilakukan. Selain itu, forum-forum rapat dimaksud juga merupakan media untuk memutuskan langkah strategis lainnya sebagai alternatif apabila terjadi perubahan dari skenario yang direncanakan sebagai akibat dari perubahan faktor internal dan eksternal yang menciptakan peluang ataupun menimbulkan ancaman bagi Perusahaan.

Pengelolaan Risiko Reputasi

Risiko reputasi timbul dari adanya pemberitaan negatif mengenai kegiatan usaha Perusahaan atau persepsi negatif terhadap Perusahaan. Dalam tahun 2010, tidak diperoleh informasi yang dapat dikategorikan sebagai publikasi negatif terhadap Perseroan yang memiliki dampak terhadap reputasi, sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat risiko reputasi perseroan adalah rendah.

Secara preventif, Perusahaan secara rutin melakukan pemantauan berita yang berhubungan dengan Perusahaan dalam berbagai media. Selain itu, Perusahaan telah pula membangun website yang memungkinkan masyarakat luas memperoleh informasi terkait Perusahaan serta melakukan kontak dan memberikan saran, masukan, informasi lainnya kepada Perusahaan secara timbal balik dan secara berkelanjutan melaksanakan kegiatan komunikasi baik secara internal dan eksternal dengan para pemangku kepentingan, melalui kegiatan - kegiatan yang dapat menciptakan citra perusahaan yang baik (*positive corporate image*).

3 RISK MANAGEMENT (Continued)

- c. Conducting the Board of Directors Meeting and the Meeting of Commissioners, among others, discussion of the condition of the Company including the problems faced and strategic steps to be done. In addition conducting forums or a media conference to decide on other strategic initiatives as an alternative if there is a change from the planned scenario as a result of changes in internal and external factors that create opportunities or pose a threat to the Company.

Reputation Risk Management

Reputational risk arising from the existence of negative news about the activities of the Company or the negative perceptions of the Company. In the year 2010, there was no information which can be categorized as negative publicity against the Company that have an impact on its reputation, so it can be concluded that corporate reputation risk level is low.

Preventively, the Company routinely monitor news related to the Company in various media. In addition, the Company has also built a website that allows the public to obtain information concerning the Company and make contact and provide suggestions, feedback, other information to the Company mutually and sustainably implement communication activities both internally and externally with stakeholders, through activities - activities that can create a good corporate image (*positive corporate image*.)

PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR (PERSERO)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dan untuk
periode 10 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

For the year ended 31 December 2010 and for the 10 months period ended
31 December 2009

Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain

Expressed in Rupiahs, unless otherwise stated

4. KAS DAN SETARA KAS

Kas	2010	2009
Rupiah:		
	25,000,000	25,000,000
	25,000,000	25,000,000

4. CASH AND CASH EQUIVALENTS

Bank		Cash on hand
Rupiah:		Rupiah:
Bank Rakyat Indonesia,Tbk	353,504,754	208,769,050
Bank Mandiri, Tbk	8,321,081	461,603,246
Bank Danamon, Tbk	2,404,195,277	1,904,511,177
Bank Mega, Tbk	860,000	
Bank ANZ Panin	-	
	2,766,881,112	2,574,883,474

USD		USD
Bank Rakyat Indonesia,Tbk (USD 980,12 pada tahun 2010)	8,812,259	-
	8,812,259	-

Deposito on Call (DOC)		
Bank Rakyat Indonesia,Tbk	1,000,000,000,000	-
	1,000,000,000,000	-

Deposito berjangka		
Bank Rakyat Indonesia,Tbk	38,255,588,000	689,184,000,000
Bank Tabungan Negara,Tbk	1,105,524,700	34,003,438,226
Bank Syariah Mandiri	-	50,000,000,000
Bank Muamalat Indonesia,Tbk	39,619,574,008	50,000,000,000
Bank BTPN	10,070,575,344	50,000,000,000
Bank Syariah Bukopin	8,000,000,000	25,000,000,000
Bank Syariah Mega	-	25,000,000,000
Bank Syariah BRI	-	25,000,000,000
Bank Jabar Banten	37,881,716,542	-
	134,932,978,594	948,187,438,226
	1,137,733,671,965	950,787,321,700

Kisaran tingkat suku bunga Deposito Berjangka per tahun	7% – 10%	7% - 12,25%
--	----------	-------------

Range of interest rate of time
deposits per annum .

Tingkat suku bunga efektif rata - rata tertimbang Deposito Berjangka per tahun	8.075%	9.671%
--	--------	--------

Effective interest rate -
weighted average of time
deposits per annum .

PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR (PERSERO)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dan untuk periode 10 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009

Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
For the year ended 31 December 2010 and for the 10 months period ended 31 December 2009

Expressed in Rupiahs, unless otherwise stated

5. EFEK - EFEK

Efek - efek yang dimiliki perusahaan berdasarkan klasifikasi dan jenisnya adalah:

Tersedia untuk dijual

	2010	
Obligasi		
Rupiah	-	
	-	

Available for Sale

	Bond
	Rupiah
	50,148,154,503

Dimiliki Hingga Jatuh Tempo

	2010	
Reksadana Penyertaan		
Terbatas (RDPT)		
- Danareksa Sinergi BUMN I	20,000,000,000	
- Mandiri Optima Terbatas 2	20,000,000,000	
- Mandiri Optima Terbatas 5	148,913,182,078	
	188,913,182,078	

Held To Maturity

	Limited Mutual Fund (LMF)
	Danareksa Sinergi BUMN I
	Mandiri Optima Terbatas 2
	Mandiri Optima Terbatas 5

Obligasi adalah *Medium Term Note (MTN)* PT Pembangunan Perumahan (Persero). Perusahaan mengklasifikasikan MTN tersebut dalam kelompok tersedia untuk dijual. Nilai wajar dihitung dengan menggunakan *market yield* dari obligasi yang memiliki rating setara pada tanggal 31 Desember 2009.

Marketable securities represents Medium Term Note (MTN) from PT Pembangunan Perumahan (Persero). Obligation is classified as available-for-sale security by the Company. The computation of fair value uses the market yield of bond with a similar rating on 31 December 2009.

RDPT diklasifikasikan dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo. Nilai wajar dihitung dengan menggunakan harga perolehan yang diamortisasi (*amortized cost*).

LMF is classified as held to maturity. The computation of fair value uses amortized cost.

6. PINJAMAN YANG DIBERIKAN

Pinjaman yang diberikan merupakan saldo outstanding pinjaman yang telah dilakukan penarikan dalam rangka pembiayaan projek dalam berbagai sektor infrastruktur yaitu (1) transportasi; (2) jalan; (3) pengairan; (4) air minum; (5) air limbah; (6) telekomunikasi; (7) ketenagalistrikan; (8) minyak dan gas bumi; (9) multisector (lebih dari 1 jenis); dan infrastruktur lainnya.

6. LOANS

Loans represent actual disbursement of loans committed to provide financing in infrastructure project in several sectors such as (1) transportation, (2) roads, (3) irrigations, (4) drinking water installations, (5) wastewater treatment installations, (6) telecommunications, (7) electricities, (8) oil and gases, (9) multisectors infrastructure, and other infrastructures.

PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR (PERSERO)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dan untuk
periode 10 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

For the year ended 31 December 2010 and for the 10 months period ended
31 December 2009

Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain

Expressed in Rupiahs, unless otherwise stated

6. PINJAMAN YANG DIBERIKAN (Lanjutan)

Pinjaman yang diberikan menurut sektor infrastruktur
terdiri dari:

	2010	2009	
Infrastruktur transportasi	10,290,000,000	19,073,112,716	Transportations infrastructure
Infrastruktur jalan	10,000,000,000	-	Roads infrastructure
Infrastruktur pengairan	-	30,000,000,000	Irrigations infrastructure
Infrastruktur ketenagalistrikan	86,323,990,860	-	Electricity infrastructure
Infrastruktur minyak dan gas bumi	68,000,000,000	-	Oil and gases infrastructure
	174,613,990,860	49,073,112,716	

Dikurangi :

Pendapatan diterima dimuka yang belum diamortisasi	(827,770,866)	-	: Less Unamortized deferred revenue
	173,786,219,994	49,073,112,716	

Dikurangi :

Cadangan kerugian penurunan nilai	(1,746,139,908)	-	: Less Allowance for impairment loss
	172,040,080,086	49,073,112,716	

**Klasifikasi pinjaman yang diberikan
menurut jangka waktu**

a. Kurang dari 1 tahun	60,290,000,000	49,073,112,716	a.Less than 1 year
Dikurangi :			: Less
Pendapatan diterima dimuka yang belum diamortisasi	(157,293,034)	-	Unamortized deferred revenue
	60,132,706,966	49,073,112,716	
Dikurangi :			: Less
Cadangan kerugian penurunan nilai	(602,900,000)	-	Allowance for impairment loss
	59,529,806,966	49,073,112,716	

PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR (PERSERO)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dan untuk periode 10 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

For the year ended 31 December 2010 and for the 10 months period ended 31 December 2009

Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain

Expressed in Rupiahs, unless otherwise stated

6. PINJAMAN YANG DIBERIKAN (Lanjutan)

b. Lebih dari 1 tahun	114,323,990,860
Dikurangi :	
Pendapatan diterima dimuka yang belum diamortisasi	(670,477,831)
	113,653,513,029
Dikurangi :	
Cadangan kerugian penurunan nilai	(1,143,239,909)
	112,510,273,120

6. LOANS (Continued)

b. More than 1 year	-
: Less	

Unamortized deferred revenue

: Less

Allowance for impairment loss

Kisaran tingkat suku bunga kontraktual pinjaman yang diberikan per tahun

11,25% - 15%

13% - 16%

The range of contractual interest rates of loans per year

Kisaran Tingkat suku bunga efektif pinjaman yang diberikan per tahun

11,52% - 15,95%

The range of effective interest rate loan granted per year

Perusahaan telah melakukan evaluasi secara individual terhadap aset keuangan yang signifikan dengan hasil tidak terdapat penurunan nilai, sehingga manajemen menentukan cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) secara kolektif.

The Company has been individually evaluated on significant financial assets with the result there was no impairment, the management determines allowance for impairment losses (CKPN) collectively.

7. PIUTANG PENDAPATAN BUNGA

	2010
Piutang bunga pinjaman	3,611,111
Piutang bunga deposito	336,934,224
Piutang bunga efek	815,426,606
Piutang Bunga CSL	3,154,663,726
	4,310,635,667

7. INTEREST RECEIVABLE

	2009
	338,344,924
	3,427,776,017
	269,166,667
	-
	4,035,287,608

Merupakan akrual pengakuan penerimaan pendapatan bunga Deposito, Reksadana Penyertaan Terbatas dan Convertible Subordinated Loan (CSL).

This account represents accrual revenue recognized from Time deposit interest, Limited Mutual Fund interest and Convertible Subordinated Loan (CSL) interest.

PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR (PERSERO)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dan untuk periode 10 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

For the year ended 31 December 2010 and for the 10 months period ended 31 December 2009

Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain

Expressed in Rupiahs, unless otherwise stated

8. ASET LANCAR LAINNYA

	2010	2009
Deposito yang dijaminkan	16,493,989,500	-
Uang muka operasional	90,146,296	170,434,063
Beban dibayar dimuka	1,109,291,314	820,787,071
Piutang lainnya	-	3,066,993,081
	17,693,427,110	4,058,214,215

Deposito yang dijaminkan merupakan jaminan pembayaran atas transaksi L/C untuk kepentingan debitur.

Uang muka operasional adalah uang muka kerja yang diberikan kepada karyawan.

Beban dibayar dimuka merupakan pembayaran dimuka atas sewa ruangan, asuransi, langganan internet dan langganan parkir.

8. OTHER CURRENT ASSETS

	2010	2009	
Guarantee deposits	16,493,989,500	-	Guarantee deposits
Advance payments	90,146,296	170,434,063	Advance payments
Prepaid expenses	1,109,291,314	820,787,071	Prepaid expenses
Other receivables	-	3,066,993,081	Other receivables
	17,693,427,110	4,058,214,215	

Guarantee deposits represent guarantee of payment for L/C transaction.

Advance payments are payment made to employees for operational activities.

Prepaid Expenses are prepayments for the office rent, insurance, internet and parking service.

Rincian beban dibayar dimuka adalah :

	2010
Sewa	310,831,315
Asuransi	762,613,728
Internet	-
Parkir	35,846,270
	1,109,291,314

The details of prepaid expense are as follows:

	2009	
Lease	150,503,445	
Insurance	643,828,869	
Internet	2,013,000	
Parking	24,441,757	
	820,787,071	

Rincian piutang lainnya adalah :

	2010
PT IIF	-
Piutang Terkait Debitur	-
	-

The details of other receivables are as follows:

	2009	
PT IIF	3,046,993,081	
Receivable from debtor	20,000,000	
	3,066,993,081	

Piutang kepada PT Indonesia Infrastructure Finance (PT IIF) merupakan pembayaran biaya konsultan hukum sehubungan dengan persiapan pendirian PT IIF sampai dengan 31 Desember 2009 yang akan ditagihkan kepada PT IIF. Atas Piutang tersebut, PT IIF telah melunasi seluruh tagihannya dalam tahun 2010.

Receivables to PT Indonesia Infrastructure Finance (PT IIF) are expenses related to preparation of establishment of PT IIF including legal consultant fees until 31 December 2009 which are reimbursable to the PT IIF. In connection to those receivable, PT IIF has been paid all the receivable in 2010.

Piutang terkait debitur adalah biaya akte notaris yang terhutang kepada debitur, atas piutang tersebut dalam tahun 2010 telah dilunasi seluruhnya.

Receivables from debtor are notarial document fee and payable to debtor, all receivable in 2010 has been fully paid.

PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR (PERSERO)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dan untuk periode 10 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009

Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

For the year ended 31 December 2010 and for the 10 months period ended 31 December 2009

Expressed in Rupiahs, unless otherwise stated

9. CONVERTIBLE SUBORDINATED LOAN

	2010
Convertible Subordinated Loan	559,700,000,000
	559,700,000,000

Merupakan *Convertible Subordinated Loan* (CSL) kepada PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF) sejak tanggal 22 April 2010.

CSL akan dikonversi sebagai penyertaan modal di IIF sebagaimana diatur dalam *Convertible Subordinated Loan Agreement* tanggal 15 Januari 2010, antara PT SMI dengan PT IIF, International Finance Corporation (IFC), Asian Development Bank (ADB) dan Deutsche Investitions Und Entwicklungsgesellschaft mbH (DEG).

CSL merupakan Pinjaman Bersubstansi Ekuitas yang dicatat sebesar biaya perolehan (*at cost*).

9. CONVERTIBLE SUBORDINATED LOAN

	2009	
	-	Convertible Subordinated Loan
	-	

This account represent *Convertible Subordinated Loan* (CSL) to PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF) since 22 April 2010.

CSL will be converted as equity participation in the IIF as set forth in the Subordinated Convertible Loan Agreement dated January 15, 2010, between PT SMI with PT IIF, International Finance Corporation (IFC), Asian Development Bank (ADB) and Deutsche Investitions Und Entwicklungsgesellschaft mbH (DEG).

CSL is a substantial equity loans that are recorded at cost .

10. PENYERTAAN

	2010
Nilai Perolehan	40,300,000,000
Bagian Perusahaan Anak	Laba(rugi)
	(6,233,970,630)
	34,066,029,370

Merupakan penyertaan Perusahaan pada PT Indonesia Infrastructure Finance sebesar 40,3% (dari modal disetor sebesar Rp100.000.000.000) sejak tanggal 22 April 2010.

10. INVESTMENT

	2009	
	-	Acquisition cost
	-	Profit (loss) Subsidiary Company
	-	
	-	

This account represents the Company's investment in PT Indonesia Infrastructure Finance, by 40.3% (of the paid up capital of Rp.100.000.000.000) since 22 April 2010.

PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR (PERSERO)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dan untuk
periode 10 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

*For the year ended 31 December 2010 and for the 10 months period ended
31 December 2009*

Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain

Expressed in Rupiahs, unless otherwise stated

11. ASET TETAP

11. FIXED ASSETS

31 Desember 2010 / 31 December 2010

	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Saldo akhir/ Ending balance	Acquisition cost
Harga perolehan					
Server	114,580,950	117,818,243	-	232,399,193	Server
Peralatan kantor	651,678,211	358,563,233	-	1,010,241,444	Office equipment
Perabotan kantor	490,114,392	398,201,740	-	888,316,132	Office furniture
Partisi	459,003,872	436,555,044	-	895,558,916	Partitions
	1,715,377,425	1,311,138,260	-	3,026,515,685	
Akumulasi penyusutan					Accumulated depreciation
Server	15,277,456	29,533,482	-	44,810,938	Server
Peralatan kantor	59,505,311	154,664,347	-	214,169,658	Office equipment
Perabotan kantor	63,732,848	143,038,475	-	206,771,323	Office furniture
Partisi	61,091,180	142,732,200	-	203,823,380	Partitions
	199,606,795	469,968,504	-	669,575,299	
Nilai buku	1,515,770,630			2,356,940,386	Book value

31 Desember 2009/ 31 December 2009

	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Saldo akhir/ Ending balance	Acquisition cost
Harga perolehan					
Server	-	114,580,950	-	114,580,950	Server
Peralatan kantor	-	651,678,211	-	651,678,211	Office equipment
Perabotan kantor	-	490,114,392	-	490,114,392	Office furniture
Partisi	-	459,003,872	-	459,003,872	Partitions
	-	1,715,377,425	-	1,715,377,425	
Akumulasi penyusutan					Accumulated depreciation
Server	-	15,277,456	-	15,277,456	Server
Peralatan kantor	-	59,505,311	-	59,505,311	Office equipment
Perabotan kantor	-	63,732,848	-	63,732,848	Office furniture
Partisi	-	61,091,180	-	61,091,180	Partitions
	-	199,606,795	-	199,606,795	
Nilai buku	-			1,515,770,630	Book value

Penyusutan aset tetap dialokasikan ke beban umum dan administrasi

Depreciation of fixed assets allocated to general and administrative expenses

PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR (PERSERO)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dan untuk periode 10 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

For the year ended 31 December 2010 and for the 10 months period ended 31 December 2009

Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain

Expressed in Rupiahs, unless otherwise stated

12. ASET TAK BERWUJUD

	2010	2009	
Perangkat lunak	331,337,897	251,810,882	Software
Akumulasi amortisasi	(67,604,052)	(14,591,012)	Accumulated amortization software
	<u>263,733,845</u>	<u>237,219,870</u>	

Penyusutan aset tak berwujud dialokasikan ke beban umum dan administrasi

12. INTANGIBLE ASSETS

Depreciation of intangible assets allocated to general and administrative expenses

13. ASET LAIN-LAIN

	2010	2009	
Aset dalam tahap pengembangan	782,441,363	-	Asset in development
Piutang pegawai	33,463,152	196,458,334	Employee receivables
Uang jaminan telepon	42,000,000	31,500,000	Phone deposit
Uang jaminan parkir	33,812,621	18,036,452	Parking deposit
Uang jaminan lain-lain	120,000	120,000	Other deposit
	<u>891,837,136</u>	<u>246,114,786</u>	

Aset dalam pengembangan merupakan pembayaran atas pekerjaan implementasi Oracle Financial dan Administrasi Pembiayaan PT SMI yang sedang dalam tahap penyelesaian.

13. OTHER ASSETS

Asset in development represents amount paid by PT SMI on Oracle Financial and loan administration implementation which are still in progress.

14. BEBAN YANG MASIH HARUS DIBAYAR

	2010	2009	
Pengadaan aset tetap	243,674,030	107,942,717	Acquisition of fixed assets
Jasa konsultan	11,880,000	846,935,119	Consultant fees
Jasa audit	245,454,546	164,844,131	Audit fee
Asuransi dan rawat jalan	56,051,043	56,791,926	Insurance and employee medical
Perjalanan dinas	8,508,033	656,987,955	Business traveling
Sewa	22,684,536	44,700,107	Rent
Iklan	47,823,160	-	Advertising
Barang cetakan	148,690,000	-	Printing
Beban terkait debitur	13,200,000	54,519,625	Expenses related to the debtor
Apresiasi karyawan	1,652,250,000	1,161,642,857	Employee bonus
Pencadangan biaya tantiem	1,276,000,000	872,142,857	Provision for tantiem
Lain-lain	75,671,685	49,703,745	Other expenses
	<u>3,801,887,033</u>	<u>4,016,211,039</u>	

PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR (PERSERO)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dan untuk periode 10 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

For the year ended 31 December 2010 and for the 10 months period ended 31 December 2009

Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain

Expressed in Rupiahs, unless otherwise stated

15. PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA

	2010	2009	
Pendapatan Diterima Dimuka	-	550,000,000	<i>Deferred income</i>
	-	550,000,000	

Pendapatan diterima dimuka adalah provisi yang diterima terkait pinjaman yang diberikan.

Sesuai dengan berlakunya PSAK No. 50 (Revisi 2006) dan PSAK No. 55 (Revisi 2006), biaya perolehan yang diperoleh sebelumnya dan masih bersaldo pada saat awal penerapan, diperhitungkan sebagai bagian arus kas dimasa yang akan datang dalam perhitungan bunga efektif.

15. DEFERRED INCOME

Deferred income represents provision from loans.

Based on implementation of PSAK No.50 (Revised 2006) and PSAK No.55 (Revised 2006) , the balance of transaction cost are amortized over the terms of the instruments based on the effective interest method.

16. HUTANG LAIN-LAIN

	2010	2009	
Hutang Lain-lain	16,493,989,500	-	<i>Other Payables</i>
	16,493,989,500	-	

Merupakan dana titipan debitur yang akan digunakan sebagai pembayaran atas transaksi L/C debitur.

16. OTHER PAYABLES

This account represent the debtor deposit funds to be used as payment for transactions of L/C debtor.

17. PERPAJAKAN

a. Pajak dibayar dimuka

	2010	2009	
Pajak Pertambahan Nilai	-	142,870,092	<i>VAT- In</i>
PPh Badan pasal 28a	1,791,848,763	-	<i>Income tax art.28a</i>
	1,791,848,763	142,870,092	

b. Hutang pajak

	2010	2009	
PPh pasal 21	898,433,147	779,189,520	<i>Income tax art. 21</i>
PPh pasal 23	20,408,138	23,389,924	<i>Income tax art. 23</i>
PPh pasal 4 (2)	3,485,066	1,337,022	<i>Income tax art. 4 (2)</i>
Pajak Pertambahan Nilai	100,567,766	-	<i>Value Added Tax</i>
	1,022,894,117	803,916,466	

PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR (PERSERO)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dan untuk periode 10 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

For the year ended 31 December 2010 and for the 10 months period ended 31 December 2009

Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain

Expressed in Rupiahs, unless otherwise stated

17. PERPAJAKAN (Lanjutan)

c. Manfaat / (beban) pajak penghasilan

	2010	2009	
Beban pajak kini	(1,502,131,000)	-	<i>Current tax expense</i>
Manfaat / (beban) pajak tangguhan	<u>(2,330,310,316)</u>	<u>3,436,703,386</u>	<i>Deferred tax income /(expense)</i>
	<u>(3,832,441,316)</u>	<u>3,436,703,386</u>	

d. Pajak kini

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan dan estimasi laba (rugi) pajak berdasarkan fiskal adalah sebagai berikut:

17.TAXATION (Continued)

c. Tax income/ (expense)

d. Current Tax

The reconciliation between income before tax and estimated taxable income (fiscal loss) are as follows:

	2010	2009	
Laba sebelum beban pajak penghasilan badan:	44,936,010,552	54,399,254,053	<i>Profit before corporate income tax expenses:</i>
Beda temporer:			
Beban imbalan pasca kerja - bersih	861,311,665	326,530,059	<i>Employee benefits expense - net</i>
Beban apresiasi karyawan	490,607,143	1,161,642,857	<i>Employees' bonus</i>
Beban tantiem	403,857,143	872,142,857	<i>Tantiem</i>
Penyusutan aset tetap	<u>(75,156,785)</u>	<u>(36,258,796)</u>	<i>Depreciation of fixed assets</i>
Amortisasi aset tetap tak berwujud	<u>(13,253,306)</u>	<u>(7,030,587)</u>	<i>Amortization of intangible assets</i>
Beban perabotan kantor	133,021,905	235,969,401	<i>Furniture expenses</i>
Beban software	22,265,761	49,922,964	<i>Software expenses</i>
Kompensasi kerugian	<u>(11,143,894,790)</u>	<u>-</u>	<i>Compensation of loss</i>
	<u>(9,321,241,264)</u>	<u>2,602,918,755</u>	
Beda tetap:			
Penghasilan yang telah dikenakan pajak final	(41,424,730,255)	(71,930,447,151)	<i>Income subjected to final tax</i>
Jasa Giro - net	(99,581,909)	(121,943,241)	<i>Current account - net</i>
Beban yang tidak dapat dikurangkan	8,748,060,427	119,437,256	<i>Non-deductible expenses</i>
Koreksi atas pajak final	<u>3,170,007,163</u>	<u>3,786,885,538</u>	<i>Correction of final tax</i>
	<u>(29,606,244,574)</u>	<u>(68,146,067,598)</u>	
Estimasi laba (rugi) fiskal	<u>6,008,524,715</u>	<u>(11,143,894,790)</u>	<i>Estimated fiscal profit (loss)</i>

PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR (PERSERO)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dan untuk periode 10 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

For the year ended 31 December 2010 and for the 10 months period ended 31 December 2009

Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain

Expressed in Rupiahs, unless otherwise stated

17. PERPAJAKAN (Lanjutan)

e. Aset / (kewajiban) pajak tangguhan

	2010	2009	
Asset Pajak Tangguhan- Awal	3,436,703,386	-	Deferred tax assets- Beginning
Beban imbalan pasca kerja	215,327,916	81,632,515	Post-employment benefit expense
Beban apresiasi karyawan	122,651,786	290,410,714	Employees' bonus
Beban tantiem	100,964,286	218,035,714	Tantiem
Penyusutan aset tetap	(18,789,196)	(9,064,699)	Depreciation of fixed assets
Amortisasi aset tak berwujud	(3,313,327)	(1,757,647)	Amortization of intangible assets
Beban perabotan kantor	33,255,476	58,992,350	Furniture expenses
Beban software	5,566,440	12,480,741	Software expenses
Rugi fiskal	(2,785,973,698)	2,785,973,698	Fiscal loss
Manfaat/(bebannya) pajak tangguhan	(2,330,310,316)	3,436,703,386	Deferred tax income /(expense)
Aset pajak tangguhan - bersih	1,106,393,070	3,436,703,386	Deferred tax asset - net

f. Administrasi

Berdasarkan undang-undang perpajakan Indonesia, Perusahaan dapat mengajukan pengembalian pajak atas dasar perhitungan sendiri (*self assessment*). Otoritas pajak dapat menilai atau mengubah pajak dalam jangka waktu sepuluh (10) tahun dari tanggal pajak yang telah jatuh tempo.

17.TAXATION (Continued)

e. Assets / (Liabilities) Deffered tax

f. Administration

Based on the taxation laws of Indonesia, the Company may file tax returns on the basis of self-assessment. Tax authorities may assess or change the tax within a period of ten (10) years from the date the tax was due.

18. KEWAJIBAN IMBALAN PASCA KERJA

Pada tahun 2009, Perseroan mengadopsi PSAK 24 (Revisi 2004) - "Employee Benefits". Kewajiban imbalan pasca kerja per 31 Desember 2010 dan 2009 dilakukan oleh aktuaris independen (PT Sienco Aktuarindo Utama) dengan menggunakan metode projected unit credit dan asumsi-asumsi tertentu sebagai berikut:

18. EMPLOYMENT BENEFITS LIABILITY

In the year 2009, the Company adopted PSAK 24 (Revised 2004) - "Employee Benefits". Employee benefits liability as of 31 December 2010 and 2009 are calculated by independent actuarial (PT Sienco Aktuarindo Utama) using the projected unit credit method and certain assumptions as follows:

	2010	2009	
Tingkat mortalita :	CS080	CS080	Mortality rate
Usia normal pensiun :	56 tahun	56 tahun	Normal retirement age
Tingkat ketidakmampuan :	1% x CS0 80	1% x CS0 80	Disability rate
Tingkat kenaikan upah :	8%	8%	Future salary increases
Tingkat diskonto :	9.30%	10.70%	Discount rate

PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR (PERSERO)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dan untuk periode 10 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009

Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

For the year ended 31 December 2010 and for the 10 months period ended 31 December 2009

Expressed in Rupiahs, unless otherwise stated

18. KEWAJIBAN IMBALAN PASCA KERJA (Lanjutan)

Kewajiban Manfaat Karyawan sebagai berikut :

	2010
Nilai kini kewajiban	861,311,665
Biaya jasa lalu yang diakui	326,530,059
Biaya jasa lalu yang belum diakui	-
Keuntungan (kerugian) aktuaria yang tidak diakui	-
Kewajiban penghentian	-
Kewajiban imbalan kerja yang diakui di neraca	1,187,841,724

18. EMPLOYEMENT BENEFITS LIABILITY (Continued)

Employee benefits liability is as follows:

	2009	
Present value of obligation	326,530,059	
Unrecognized past service cost - vested	-	
Unrecognized past service cost - non vested	-	
Unrecognized actuarial gain (losses)	-	
<i>Liability for termination</i>		
Net liability in the balance sheet	326,530,059	

Pengakuan beban (manfaat) dalam laporan laba rugi

	2010
Biaya jasa kini	826,372,949
Biaya bunga	34,938,716
Hasil yang diharapkan dari aktiva program	-
Amortisasi biaya jasa lalu yang belum menjadi hak	-
Pengakuan biaya jasa lalu yang diakui	-
Biaya penghentian	-
Jumlah	861,311,665

Recognition of expense (benefit) in the income statement

	2009	
Current service cost	326,530,059	
Interest cost	-	
Expected return on plan assets	-	
Amortization of past service cost-non vested	-	
Immediate recognition of past service cost - vested	-	
Termination cost	-	
Total	326,530,059	

19. MODAL SAHAM

Sesuai dengan akta notaris No. 17 tanggal 26 Februari 2009 dari Lolani Kurniati Irdham - Idroes, SH, LLM notaris di Jakarta, modal dasar Perusahaan berjumlah Rp4.000.000.000.000.

Modal Negara yang telah disetorkan adalah sebesar Rp1.000.000.000.000 terdiri dari 1.000.000 lembar saham dengan nilai Rp 1.000.000 per saham pada tanggal 3 Maret 2009 sesuai dengan PP No. 66 Tahun 2007 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di bidang pembiayaan infrastruktur yang telah diubah dengan PP No. 75 tahun 2008.

19. SHARE CAPITAL

In accordance with the notarial deed No. 17 dated 26 February 2009 from Lolani Kurniati Irdham - Idroes, SH, LLM in Jakarta, the share capital of the Company amounted to Rp4,000,000,000,000.

The paid up capital from state amounted Rp1,000,000,000,000 consist of 1,000,000 share with Rp1,000,000 per share on 3 March 2009 in accordance with Government Regulation No. 66 year 2007 on Capital Investment in the Republic of Indonesia for the Establishment of Company (Persero) in infrastructure financing as amended by Government Regulation No. 75 year 2008.

PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR (PERSERO)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dan untuk periode 10 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009

Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

For the year ended 31 December 2010 and for the 10 months period ended 31 December 2009

Expressed in Rupiahs, unless otherwise stated

20. TAMBAHAN MODAL DISETOR

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 85 tahun 2010 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sarana Multi Infrastruktur, negara RI melakukan penambahan penyertaan modal Negara kedalam modal saham Perusahaan sebesar Rp1.000.000.000.000. Penambahan modal disetor efektif diterima oleh perusahaan pada tanggal 31 Desember 2010. Namun pencatatan tambahan modal disetor tersebut sebagai Modal Saham yang disetor menunggu keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Keputusan RUPS dalam bentuk Keputusan Menteri Keuangan sebagai pelaksanaan dari PP 85 Tahun 2010 sebagaimana disebut di atas, sedang dalam tahap penandatangan oleh Menteri Keuangan.

Selanjutnya setelah dibuatkan akta pernyataan keputusan rapat oleh Notaris, putusan dimaksud akan dilaporkan kepada Menteri Hukum dan HAM sebagaimana diwajibkan dalam UU Perseroan Terbatas.

20. ADDITIONAL PAID UP CAPITAL

Based on Government Regulation (PP) No.85 year 2010 on Additional Capital Investment of the Republic of Indonesia in Capital Shares of PT Sarana Multi Infrastructure (Persero) , the Government of RI invested additional paid up capital into shares of the Company amounting to Rp1,000,000,000,000. The additional capital was received by the Company on 31 December 2010. The recording of additional capital as authorized, subscribed and fully paid is pending due to General Meeting of Shareholders (GMS).

The result of General Meeting of Shareholders (GMS) as implemented through PP No.85 Year 2010 as mentioned above, is in process of signature Minister of Finance.

Furthermore, the deed statement of the result of General Meeting of Shareholders (GMS) made by the Notary Public will be reported to the Minister of Justice and Human Rights, as required by the Law of Limited Liability Company.

21. PEMBAGIAN LABA

Berdasarkan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang diadakan pada tanggal 24 Juni 2010, pemegang saham menyetujui penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2009 sebagai berikut:

Cadangan umum	5,783,595,744	Reserves
Program Bina Lingkungan	578,359,574	Community Development Program
Laba Ditahan	51,474,002,121	Retained Earnings
	57,835,957,439	

22. PENDAPATAN USAHA

	2010	2009	
Pendapatan bunga pinjaman	37,746,637,046	812,386,592	Loans interest income
Pendapatan provisi	1,508,391,277	77,272,727	Loans provision income
Pendapatan denda	1,434,827,507	-	Loans penalty income
Hasil investasi jangka pendek			Short term investment-
- deposito berjangka	30,938,305,610	69,949,738,499	time deposits
Hasil investasi jangka pendek			Short term investment-
- bunga obligasi	6,563,830,600	1,980,708,651	bonds
Hasil investasi jangka pendek			Short term investment-
- saham dan reksadana	3,922,594,044	-	stocks and limited mutual fund
	82,114,586,085	72,820,106,470	

PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR (PERSERO)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dan untuk periode 10 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009

Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

For the year ended 31 December 2010 and for the 10 months period ended 31 December 2009

Expressed in Rupiahs, unless otherwise stated

23. BEBAN USAHA

	2010	2009
Beban pengembangan usaha	6,208,731,612	3,667,372,947
Beban umum dan administrasi	23,214,530,223	14,080,324,153
Beban operasional lainnya	652,381,870	723,090,338
Kerugian penurunan nilai wajar aset keuangan	1,746,139,908	-
	<u>31,821,783,613</u>	<u>18,470,787,438</u>

Beban pengembangan usaha merupakan biaya yang terkait langsung dengan kegiatan pembiayaan dan investasi, terdiri dari beban SDM, beban konsultan, perjalanan dinas, sosialisasi dan riset pengembangan.

Beban umum dan administrasi terdiri dari beban SDM, beban kantor dan umum, dan beban penyusutan /amortisasi.

Beban operasional lainnya terdiri dari beban pendidikan dan pelatihan dan beban kegiatan karyawan.

23. OPERATING EXPENSES

	2010	2009	
Business development expenses			
General and administrative expenses			
Others expenses			
Impairment loss financial instruments			
	<u>31,821,783,613</u>	<u>18,470,787,438</u>	

Business development expenses represent costs directly related to financing and investing activities, consists of HR expenses, consultant expenses, business travel, socialization and research development.

General and administrative expenses consists of HR expenses, office and general expenses and depreciation / amortization expenses.

Other operating expenses consists of education and training expenses and employee activities expenses.

24. PENDAPATAN NON OPERASIONAL

	2010	2009	
Jasa giro - net	99,581,909	121,943,241	<i>Interest income</i>
Pendapatan selisih kurs	497,827,413	8,192	<i>Gain on foreign exchange</i>
Lain-lain	431,191,623	1,537,013	<i>Others</i>
	<u>1,028,600,945</u>	<u>123,488,446</u>	

24. NON-OPERATING INCOME

	2010	2009	
Interest income			
Gain on foreign exchange			
Others			
	<u>1,028,600,945</u>	<u>123,488,446</u>	

25. BEBAN NON OPERASIONAL

	2010	2009	
Beban kegiatan karyawan	94,396,766	47,541,195	<i>Employee activities charged</i>
Rugi Selisih kurs	36,011,151	151,838	<i>Loss on foreign exchange</i>
Lain-lain	21,014,318	25,860,392	<i>Others</i>
	<u>151,422,235</u>	<u>73,553,425</u>	

25. NON-OPERATING EXPENSE

	2010	2009	
Employee activities charged			
Loss on foreign exchange			
Others			
	<u>151,422,235</u>	<u>73,553,425</u>	

26. LABA (RUGI) PERUSAHAAN ASOSIASI

Perusahaan mengakui kerugian berupa bagian rugi atas penyertaan pada PT Indonesia Infrastructure Finance, sebesar 40,30% atau senilai Rp6.233.970.630.

26. PROFIT (LOSS) ASSOCIATED COMPANY

The Company recognized loss from its associated company (PT Indonesia Infrastructure Finance) amounting to 40.30% or equivalent to Rp6,233,970,630.

PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR (PERSERO)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dan untuk
periode 10 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

*For the year ended 31 December 2010 and for the 10 months period ended
31 December 2009*

Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain

Expressed in Rupiahs, unless otherwise stated

27. KOMITMEN

27. COMMITMENT

Komitmen adalah merupakan fasilitas pinjaman untuk pembiayaan infrastruktur yang belum digunakan per 31 Desember 2010 dan 2009.

The commitment is unused a loan facility to finance infrastructure that has not been used per 31 December 2010 and 2009.

2010		
Sektor Infrastruktur / Infrastructure Sector	Plafon / Loan limit	Sisa Plafon / Unused loans
Transportasi / Transportation	20,000,000,000	9,710,000,000
Jalan / Roads	24,931,761,971	14,931,761,971
Pengairan / Irrigations	35,068,238,029	35,068,238,029
Ketenagalistrikan / Electricity	252,397,000,000	165,394,437,711
Minyak dan gas Bumi / Oil and gas	68,000,000,000	-
	400,397,000,000	225,104,437,711

2009		
Sektor Infrastruktur / Infrastructure Sector	Plafon / Loan limit	Sisa Plafon / Unused loans
Transportasi, pengairan, dan jalan (Transportation, irrigations, and roads)	125,000,000,000	75,926,887,284
	125,000,000,000	75,926,887,284

**28. INFORMASI MENGENAI PIHAK HUBUNGAN
ISTIMEWA**

28. RELATED PARTY INFORMATION

Sifat hubungan istimewa

Nature of Relationship

PT Indonesia Infrastructure Finance adalah perusahaan
asosiasi.

*PT Indonesia Infrastructure Finance (IIF) is an associated
company.*

Transaksi dengan pihak hubungan istimewa

Transactions with Related Parties

Perusahaan melakukan transaksi dengan pihak-pihak
hubungan istimewa dengan perlakuan wajar. Transaksi
tersebut dengan anak perusahaan berupa penempatan
dana CSL sebesar Rp 559.700.000.000 sebagaimana
yang diatur dalam *Convertible Subordinated Loan
Agreement* tanggal 15 Januari 2010.

*In the normal course of business, the Company entered
into certain transactions with related parties. The
transaction with a subsidiary represents the placement of
CSL fund amounting to Rp 559,700,000,000 as arranged
in the Subordinated Convertible Loan Agreement dated 15
January 2010.*

PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR (PERSERO)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dan untuk periode 10 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

For the year ended 31 December 2010 and for the 10 months period ended 31 December 2009

Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain

Expressed in Rupiahs, unless otherwise stated

29. ASET DAN KEWAJIBAN MONETER DALAM MATA UANG ASING

Pada tanggal 31 Desember 2010, aset dan kewajiban moneter dalam mata uang asing adalah sebagai berikut:

	US Dollar <i>US Dollar</i>
Aset moneter	
Kas dan setara kas	980.12
Deposito yang dijaminkan	1,834,500.00
	1,835,480.12
Kewajiban moneter	
Hutang lain-lain	1,834,500.00
Jumlah aset moneter bersih	980.12

29. MONETARY ASSETS AND LIABILITIES IN FOREIGN CURRENCY

As at 31 December 2010, monetary assets and liabilities in foreign currency are as follows:

	Ekuivalen Rupiah <i>Rupiah Equivalent</i>	Monetary assets <i>Cash and cash equivalents</i>
		<i>Guarantee deposits</i>
Aset moneter		
Kas dan setara kas	8,812,259	8,812,259
Deposito yang dijaminkan	16,493,989,500	16,493,989,500
	16,502,801,759	16,502,801,759
Kewajiban moneter		
Hutang lain-lain	16,493,989,500	16,493,989,500
Jumlah aset moneter bersih	8,812,259	Total net monetary assets

30. ASET DAN KEWAJIBAN KEUANGAN

Berikut ini adalah kategori aset dan kewajiban keuangan Perusahaan per 31 Desember 2010:

30. FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES

Following is the financial assets and financial liabilities of the Company as of 31 December 2010:

	Jumlah/ Total	Pinjaman dan piutang / <i>Loans and receivables</i>	Dimiliki Hingga Jatuh Tempo/ <i>Held To Maturity</i>	Investasi dalam ekuitas menggunakan biaya perolehan/ <i>Investment in equity used at cost</i>	Aset dan kewajiban keuangan lainnya/ <i>Other financial assets and liabilities</i>
Aset keuangan/ Financial assets					
Kas dan setara kas/ <i>Cash and cash equivalents</i>	1,137,733,671,965	1,137,733,671,965	-	-	-
Efek-efek / <i>Securities</i>	188,913,182,078	-	188,913,182,078	-	-
Deposito yang dijaminkan/ <i>Guarantee Deposits</i>	16,493,989,500	16,493,989,500	-	-	-
Pinjaman yang diberikan / <i>Loans</i>	173,786,219,994	173,786,219,994	-	-	-
Convertible Subordinated Loan/ <i>Convertible Subordinated Loan</i>	559,700,000,000	-	-	559,700,000,000	-
Piutang Pegawai/ <i>Employee receivables</i>	33,463,152	33,463,152	-	-	-
Jumlah/ Total	2,076,660,526,689	1,328,047,344,611	188,913,182,078	559,700,000,000	-
Kewajiban keuangan/ Financial liabilities					
Biaya yang masih harus dibayar / <i>Accrued expenses</i>	3,801,887,033	-	-	-	3,801,887,033
Hutang Lain -lain/Other payables	16,493,989,500	-	-	-	16,493,989,500
Jumlah/ Total	20,295,876,533	-	-	-	20,295,876,533

PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR (PERSERO)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dan untuk periode 10 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009

Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

For the year ended 31 December 2010 and for the 10 months period ended 31 December 2009

Expressed in Rupiahs, unless otherwise stated

30. ASET DAN KEWAJIBAN KEUANGAN (Lanjutan)

Perusahaan belum mengklasifikasikan aset / kewajiban keuangan derivatif lindung nilai karena belum ada transaksi derivatif.

Berikut ini adalah penyajian nilai tercatat dan nilai wajar aset dan kewajiban keuangan Perusahaan per 31 Desember 2010:

	Nilai tercatat <i>Carrying value</i>	Nilai wajar <i>Fair value</i>	
Aset keuangan			<i>Financial assets</i>
Kas dan setara kas	1,137,733,671,965	1,137,733,671,965	<i>Cash and cash equivalent</i>
Efek-efek	188,913,182,078	189,963,701,076	<i>Securities</i>
Pinjaman yang diberikan	173,786,219,994	173,786,219,994	<i>Loans</i>
Convertible Subordinated Loan	559,700,000,000	559,700,000,000	<i>Convertible Subordinated Loan</i>
Deposito yang dijaminkan	16,493,989,500	16,493,989,500	<i>Guarantee deposits</i>
Piutang Pegawai	33,463,152	33,463,152	<i>Employee receivables</i>
	2,076,660,526,689	2,077,711,045,687	
Kewajiban keuangan			<i>Financial liabilities</i>
Biaya ymhd	3,801,887,033	3,801,887,033	<i>Accrued expenses</i>
Hutang lain-lain	16,493,989,500	16,493,989,500	<i>Other payables</i>
	20,295,876,533	20,295,876,533	

31. PERJANJIAN PENTING

Perjanjian CSL

Pada tanggal 15 Januari 2010, *International Finance Corporation (IFC)*, *Asian Development Bank (ADB)*, dan *Deutsche Investitions-Und Entwicklungsgesellschaft mbH (DEG)*, PT IIF dan Perusahaan menandatangani Perjanjian Pinjaman Konversi Subordinasi (*Convertible Subordinated Loan Agreement*). Dalam perjanjian ini Perusahaan setuju untuk menempatkan CSL pada PT IIF sebesar Rp 559,700,000,000. Pada tanggal 22 April 2010 Perusahaan telah menempatkan dana tersebut pada PT IIF.

30. FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES (Continued)

The Company not yet classified the hedging derivatives financial assets / liabilities due no derivatives transaction.

Following is carrying and fair value presentation of those financial assets and liabilities of the Company as of 31 December 2010:

	Nilai wajar <i>Fair value</i>		
Aset keuangan			<i>Financial assets</i>
Cash and setara kas	1,137,733,671,965		<i>Cash and cash equivalent</i>
Securities	189,963,701,076		
Loans	173,786,219,994		
Convertible Subordinated Loan	559,700,000,000		
Guarantee deposits	16,493,989,500		
Employee receivables	33,463,152		
	2,077,711,045,687		
Kewajiban keuangan			<i>Financial liabilities</i>
Accrued expenses	3,801,887,033		
Other payables	16,493,989,500		
	20,295,876,533		

31. SIGNIFICANT AGREEMENTS

CSL Agreement

On January 15, 2010, the International Finance Corporation (IFC), Asian Development Bank (ADB), and Deutsche Investitions-Und Entwicklungsgesellschaft mbH (DEG), PT IIF and the Company entered into a Convertible Subordinated Loan Agreement. In this agreement the Company agreed to place the CSL in PT IIF amounting to Rp 559,700,000,000. On 22 April 2010 the Company had placed these funds in PT IIF.

PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR (PERSERO)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dan untuk
periode 10 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009

Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

For the year ended 31 December 2010 and for the 10 months period ended
31 December 2009

Expressed in Rupiahs, unless otherwise stated

31. PERJANJIAN PENTING (Lanjutan)

Tujuan dari CSL adalah:

1. Untuk memenuhi bagian Perusahaan sehubungan dengan pengambilan bagian atas saham-saham yang mungkin dikeluarkan PT IIF.
2. Sebagai dana bagi IIF jika IIF diharuskan untuk melakukan pembayaran kepada Perusahaan untuk memenuhi kewajiban Perusahaan dalam hal "Put Option".

Klarifikasi perjanjian CSL

Pada rapat Dewan Komisaris dan Direksi PT IIF pada tanggal 6 Desember 2010, semua perwakilan pemegang saham menyetujui: untuk mengklarifikasi pengertian dasar dari (i) *Convertible Subordinated Loan ("CSL")* dari Perusahaan kepada PT IIF; (ii) pendapatan yang didapat dari pinjaman ini dan (iii) opsi "Put" terhadap Perusahaan oleh tiga pemegang saham pendiri lainnya.

Surat klarifikasi para pemegang saham tertanggal 30 Desember 2010 disampaikan ke PT IIF sebagai penjelasan tambahan dan klarifikasi Perjanjian CSL antara lain mengklarifikasi pengertian dasar dari beberapa pasal dalam CSLA serta pendapat mengenai mekanisme escrow dan gadai yang dipandang sudah tidak diperlukan sehingga CSLA tidak lagi dibutuhkan. Sehingga diperlukan penulisan ulang secara legal dan diharapkan selesai pada awal tahun 2011.

32. KEJADIAN SETELAH TANGGAL NERACA

Rencana amandemen Perjanjian Para Pemegang Saham
dan terminasi Perjanjian Pinjaman Konversi Subordinasi

Pada tanggal 27 Februari 2011, telah dilaksanakan pertemuan antar pemegang saham yang dihadiri oleh wakil-wakil dari Perusahaan, IFC, ADB dan DEG. Pertemuan tersebut adalah tindak lanjut dari pertemuan pada tanggal 6 Desember 2010 dan penyampaian surat klarifikasi para pemegang saham tertanggal 30 Desember 2010.

Surat klarifikasi sebagai penjelasan tambahan dan klarifikasi Perjanjian CSL antara lain mengklarifikasi pengertian dasar dari beberapa pasal dalam CSLA serta pendapat mengenai mekanisme escrow dan gadai yang dipandang sudah tidak diperlukan sehingga CSLA tidak lagi dibutuhkan.

31. SIGNIFICANT AGREEMENTS (Continued)

The purpose of CSL are:

1. *To meet SMT's share in respect of subscription for share that IIF may issue.*
2. *For IIF to repay Company to meet Company's obligation to make any payment further to the exercise of the "Put Option"*

Clarification of CSL Agreement

At a meeting of Board of Commissioners and Directors of PT IIF on 6 December 2010, all representatives of the shareholders approved: to clarify the basic understanding of (i) Convertible Subordinated Loan ("CSL") of the company to the PT IIF, (ii) income earned from these loans and (iii) the option "Put" to the company by the three other founding shareholders.

Letter clarifying the shareholders dated 30 December 2010 filed with the PT IIF as additional explanation and clarification of CSL Agreement, among others, to clarify the basic understanding of several articles in the CSLA and opinions about the escrow mechanism and the lien is not deemed necessary so that CSLA is no longer needed. So that rewriting is legally required and expected to be completed in early 2011.

32. SUBSEQUENT EVENT

The plan to amendments the Shareholders Agreement and
termination of Convertible Subordinated Loan Agreement

On 27 February 2011, has held meetings between shareholders, which was attended by representatives of the Company, IFC, ADB and DEG. The meeting is a follow-up of the meeting on 6 December 2010 and submitting shareholders' clarification letter dated 30 December 2010.

The clarification letter as additional explanation and clarification of CSL Agreement include clarifying the basic understanding of several articles in the CSLA and opinions about the escrow mechanism and the lien is not deemed necessary so that CSLA is no longer needed.

PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR (PERSERO)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dan untuk
periode 10 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009

Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

For the year ended 31 December 2010 and for the 10 months period ended
31 December 2009

Expressed in Rupiahs, unless otherwise stated

32. KEJADIAN SETELAH TANGGAL NERACA (Lanjutan)

Dalam pertemuan tanggal 27 Februari 2011 telah
disepakati beberapa hal yaitu:

1. Dikembalikannya dana CSL sebesar Rp 559,7 miliar dari PT IIF kepada Perusahaan dan selanjutnya Perusahaan akan memperlakukan dana ini sebagai *restricted asset* yang ditujukan untuk pembelian saham PT IIF oleh Perusahaan sebagai bentuk komitmen investasi Pemerintah melalui Perusahaan pada PT IIF yang berjumlah keseluruhan maksimum Rp 600 miliar.
2. Perubahan-perubahan sebagaimana dimaksud pada butir 1 di atas akan ditindaklanjuti dalam amandemen Perjanjian Para Pemegang Saham/*Shareholders Agreement*; yang diharapkan dapat difinalisasi dan ditandatangani selambatnya pada bulan April 2011.

Sampai dengan tanggal 28 Februari 2011, amandemen Perjanjian Para Pemegang Saham tersebut masih berbentuk draft dan dalam proses review oleh para pemegang saham PT IIF.

33. PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN

Standar akuntansi yang akan berlaku efektif untuk laporan keuangan untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2011:

- a. PSAK No. 1 (Revisi 2009), "Penyajian Laporan Keuangan". Standar ini akan menggantikan PSAK No. 1 (Revisi 1998), "Penyajian Laporan Keuangan".
- b. PSAK No. 2 (Revisi 2009), "Laporan Arus Kas". Standar ini akan menggantikan PSAK No. 2 (1994), "Laporan Arus Kas".
- c. PSAK No. 15 (Revisi 2009), "Investasi pada Entitas Asosiasi". Standar ini akan menggantikan PSAK No. 15 (1994), "Akuntasi untuk Investasi dalam Perusahaan Asosiasi".
- d. PSAK No. 25 (Revisi 2009), "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan". Standar ini akan menggantikan PSAK No. 25 (1994), "Laba atau Rugi Bersih untuk Periode Berjalan, Kesalahan Mendasar dan Perubahan Kebijakan Akuntansi".

32. SUBSEQUENT EVENT (Continued)

In a meeting on 27 February 2011 has been agreed a few things:

1. *CSL fund return amounting to Rp 559.7 billion from PT IIF to the Company and the Company will treat this as a restricted asset fund designated for the purchase of shares of IIF by the Company as an investment commitment of the Government through the Company at PT IIF, amounting to a maximum of Rp 600 billion overall.*
2. *The changes referred to in item 1 above will be followed up in the amendment of the Shareholders Agreement, which is expected to be finalized and signed at the latest in April 2011.*

As of 28 February 2011, amendments to the Shareholders Agreement is still a draft and in the process of review by the shareholders of PT IIF.

33. FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS STATEMENT

Accounting standards were effective for financial statements beginning on or after 1 January 2011:

- a. *PSAK 1 (revised 2009), Presentation of Financial Statements. This standard will replace PSAK No.1 (revised 1998),Presentation of Financial Statements.*
- b. *PSAK 2 (revised 2009), Statements of Cash Flows. This standard will replace PSAK No.2 (1994), Statements of Cash Flows.*
- c. *PSAK 15 (revised 2009), Accounting for Investments in Associates Entity. This standard will replace PSAK No.15 (1994) , Accounting for Investment in Associates Company.*
- d. *PSAK 25 (revised 2009), Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors. This standard will replace PSAK No.25 (1994), Net Profit or Loss for Current Period, Basic Errors and Changed Accounting Policies.*

PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR (PERSERO)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dan untuk
periode 10 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009

Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

For the year ended 31 December 2010 and for the 10 months period ended
31 December 2009

Expressed in Rupiahs, unless otherwise stated

**33. PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN
(Lanjutan)**

- e. PSAK No. 48 (Revisi 2009), "Penurunan Nilai Aset". Standar ini akan menggantikan PSAK No. 48 (1998), "Penurunan Nilai Aktiva".
- f. PSAK No. 57 (Revisi 2009), "Provisi, Liabilitas Kontinjenji dan Aset Kontinjenji". Standar ini akan menggantikan PSAK No. 57 (2000), "Kewajiban Diestimasi, Kewajiban Kontinjenji, dan Aktiva Kontinjenji".
- g. PSAK No. 7 (Revisi 2010), "Pihak-pihak Berelasi". Standar ini akan menggantikan PSAK No. 7 (1994), "Pengungkapan Pihak-pihak yang Mempunyai Hubungan Istimewa".
- h. PSAK No. 23 (Revisi 2010), "Pendapatan". Standar ini akan menggantikan PSAK No. 23 (1994), "Pendapatan".
- i. PSAK No. 19 (Revisi 2010), "Aset Tidak Berwujud". Standar ini akan menggantikan PSAK No. 19 (2000), "Aktiva Tidak Berwujud".

Perusahaan masih mempelajari dampak yang mungkin timbul dari penerapan standar-standar ini terhadap laporan keuangan.

**33. FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS STATEMENT
(Continued)**

- e. *PSAK 48 (revised 2009), Impairment of Assets. This standard will replace PSAK No. 48 (1998) Impairment of Assets.*
- f. *PSAK 57 (revised 2009), Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets. This standard will replace PSAK No.57 (2000) Estimated Liabilities, Contingency Liabilities and Contingency Assets.*
- g. *PSAK No.7 (revised 2010) Related Party. This standard will replace PSAK No.7 (1994) Disclosure of Related Party.*
- h. *PSAK No. 23 (revised 2010), Income. This standard will replace PSAK No.23 (1994), Income.*
- i. *PSAK No. 19 (revised 2010), Intangible Assets. This standard will replace PSAK No. 19 (2000), Intangible Assets.*

The Company is still evaluating the possible impact of these standards on the financial statements.

**34. PENERAPAN PERTAMA PSAK NO. 50 (REVISI 2006)
DAN PSAK NO. 55 (REVISI 2006)**

Standar akuntansi PSAK No. 50 (Revisi 2006), "Instrumen Keuangan: Penyajian dan Pengungkapan" dan PSAK No. 55 (Revisi 2006), "Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran" berlaku efektif untuk laporan keuangan dengan periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2010 dan diterapkan secara prospektif.

Untuk penerapan standar baru ini, Perusahaan telah mengidentifikasi penyesuaian transisi berikut sesuai dengan standar akuntansi tersebut. Penyesuaian transisi tersebut adalah sebagai berikut :

**34. FIRST ADOPTION OF PSAK NO. 50 (REVISED 2006)
AND PSAK NO. 55 (REVISED 2006)**

Accounting standard PSAK No. 50 (Revised 2006), "Financial Instruments: Presentation and Disclosure" and PSAK No. 55 (Revised 2006), "Financial Instruments: Recognition and Measurement" became effective for financial statements with periods beginning on or after January 1, 2010 and applied were prospectively.

To implement this new standard, the Company has identified the following transition adjustments in accordance with those standards. Transitional adjustments are as follows:

PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR (PERSERO)

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2010 dan untuk
periode 10 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2009

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

For the year ended 31 December 2010 and for the 10 months period ended
31 December 2009

Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain

Expressed in Rupiahs, unless otherwise stated

**34. PENERAPAN PERTAMA PSAK NO. 50 (REVISI 2006)
DAN PSAK NO. 55 (REVISI 2006) (Lanjutan)**

**34. FIRST ADOPTION OF PSAK NO. 50 (REVISED 2006)
AND PSAK NO. 55 (REVISED 2006) (Continued)**

1 Januari 2010/ 1 January 2010			
Yang dilaporkan / <i>Reported</i>	Efek dari penerapan PSAK No.50 dan PSAK No.55 / <i>The implementation effects of PSAK No.50 and PSAK No.55</i>	Setelah penyesuaian , <i>After adjustment</i>	
Aset/ assets			
Pinjaman yang diberikan/ <i>Loans</i>	49,073,112,716	(550,000,000)	48,523,112,716
Kewajiban/ Liabilities			
Pendapatan diterima dimuka/ <i>Defered income</i>	550,000,000	(550,000,000)	-
Perusahaan telah melakukan evaluasi secara individual terhadap aset keuangan yang signifikan dengan hasil tidak terdapat penurunan nilai, sehingga manajemen pada awal tahun tidak membentuk cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN).			
<i>The Company has been individually evaluated on significant financial assets with the result there was no impairment, in the beginning of the year, the management did not establish allowance for impairment loss (CKPN).</i>			

35. PENYELESAIAN LAPORAN KEUANGAN

35. COMPLETION OF THE FINANCIAL STATEMENTS

Manajemen Perusahaan bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2010 telah diselesaikan pada tanggal 28 Februari 2011.

The Company's management is responsible for preparation and presentation of the financial statements for the period ended 31 December 2010 had completed on 28 February 2011.

PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)

BRI II Building, 29th Floor, Suite 2905

JI. Jend. Sudirman Kav. 44-46

Jakarta 10210 - Indonesia

Tel: +6221 - 5785 1313

Fax: +6221 - 570 9460

Website: www.ptsmi.co.id

Email: coperatesecretary@ptsmi.co.id

